

# **LAPORAN AKTUALISASI**

**PEMBUATAN *LEAFLET*  
DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEMAHAMAN PENGELOLA  
TENTANG SKEMA PELAPORAN  
RUMAH DATA KEPENDUDUKAN**

**PELATIHAN DASAR PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN III  
PADA SUB DIREKTORAT SOSIAL EKONOMI  
DIREKTORAT ANALISIS DAMPAK KEPENDUDUKAN  
BKKBN PUSAT**



Oleh:  
NURUL SAFITRI  
NIP : 199503032019022011

**PELATIHAN DASAR CALON PNS GOLONGAN III  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
JAKARTA, TAHUN 2019**

LEMBAR PERSETUJUAN  
LAPORAN AKTUALISASI  
PELATIHAN DASAR CALON PNS GOLONGAN III

PEMBUATAN *LEAFLET*  
DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEMAHAMAN PENGELOLA  
TENTANG SKEMA PELAPORAN  
RUMAH DATA KEPENDUDUKAN

Nama : Nurul Safitri  
NIP : 199503032019022011  
Unit Kerja/Tempat Magang : Direktorat Analisis Dampak  
Kependudukan / BKKBN Pusat

Telah Disetujui untuk Mengikuti Seminar  
Pada Hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019

Mentor  


Reni Ardiahti, S.Kom, M.Si  
NIP.198407022006042012

Coach  

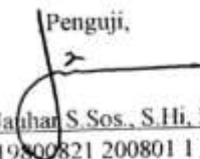

Yenie Wulandari, S.Sos, M.A  
NIP. 1984022520101220001


BERITA ACARA  
LAPORAN AKTUALISASI  
PELATIHAN DASAR CALON PNS GOLONGAN III

PEMBUATAN *LEAFLET*  
DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEMAHAMAN PENGELOLA  
TENTANG SKEMA PELAPORAN  
RUMAH DATA KEPENDUDUKAN

Nama : Nurul Safitri  
NIP : 199503032019022011  
Unit Kerja/Tempat Magang : Direktorat Analisis Dampak  
Kependudukan/  
BKKBN Pusat

Telah diuji di depan Tim Penguji  
Pada Hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019

Penguji,  
  
Najid Jahlan S.Sos., S.Hi, M.Si  
NIP. 19800821 200801 1 008

*Coach*  
  
Yenic Wulandari, S.Sos, M.A  
NIP. 19840225 20101220001

Mengetahui,  
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan  
Kependudukan dan Keluarga Berencana

.....  
NIP. ....

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Rancangan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar ANEKA serta Peran dan Kedudukan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada Pendidikan Pelatihan Dasar Golongan III.

Kegiatan aktualisasi merupakan syarat dalam penyelesaian pendidikan dan pelatihan dasar (Diklatsar) di Balatbang Perwakilan BKKBN Provinsi DI Yogyakarta. Kegiatan aktualisasi juga bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi pegawai ASN. Selain memahami materi, CPNS juga dituntut agar dapat mengimplementasikan materi yang didapat selama *on-campus* menjadi kegiatan-kegiatan nyata di unit kerja masing-masing.

Penulis berterima kasih banyak kepada semua pihak yang telah berperan dan memotivasi penulis dalam pelaksanaan Latsar ini diantaranya:

1. Orang tua yang selalu mendukung baik secara moril maupun materil.
2. Balatbang Perwakilan BKKBN Provinsi DI Yogyakarta beserta staff dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengikuti Diklat Dasar Golongan III Tahun 2019.
3. Ibu Yenie Wulandari, S.Sos, M.A selaku *coach* penulis yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan Rancangan Aktualisasi.
4. Ibu Reni Ardianti, S.Kom, M.Si selaku mentor penulis yang telah memberikan banyak masukan dan bimbingan dalam menganalisa isu- isu yang dimuat dalam Rancangan Aktualisasi.

5. Rekan-Rekan Peserta Diklat Dasar Golongan III yang telah memberikan *support* bagi penulis.
6. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah berperan dalam suksesnya kegiatan Diklat Dasar Tahun 2019 ini.

Kemudian penulis menyadari masih banyak kekurangan dari rancangan aktualisasi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan laporan ini.

Jakarta, Oktober 2019

Penulis,

**Nurul Safitri, S. Kesos.**

NIP. 19950303 201902 2 011

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>vii</b>
A. PROFIL LEMBAGA .....	1
B. VISI MISI ORGANISASI .....	5
C. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI .....	6
D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ASN/PNS .....	9
E. TUJUAN DAN MANFAAT (PENULISAN AKTUALISASI) .....	10
A. BAGI DIRI SENDIRI .....	10
B. BAGI ORGANISASI .....	11
<b>BAB II RANCANGAN AKTUALISASI</b> .....	<b>12</b>
A. ANALISA LINGKUNGAN KERJA .....	12
B. MATRIK ANALISA LINGKUNGAN KERJA .....	17
C. DESKRIPSI GAGASAN /KEGIATAN .....	20
D. MATRIK RANCANGAN AKTUALISASI .....	29
E. JADWAL RENCANA AKTUALISASI .....	39
F. RENCANA ANTISIPASI KENDALA YANG DIHADAPI .....	42
<b>BAB III CAPAIAN PELAKSANAAN AKTUALISASI</b> .....	<b>45</b>
A. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN AKTUALISASI.....	45
B. ANALISA DAMPAK JIKA ISU TIDAK DILAKSANAKAN.....	74
C. MATRIKS PELAKSANAAN AKTUALISASI .....	77
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>86</b>
A. KESIMPULAN .....	86
B. SARAN .....	86
C. RENCANA TINDAK LANJUT .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	Error! Bookmark not defined.89
<b>LAMPIRAN</b> .....	91

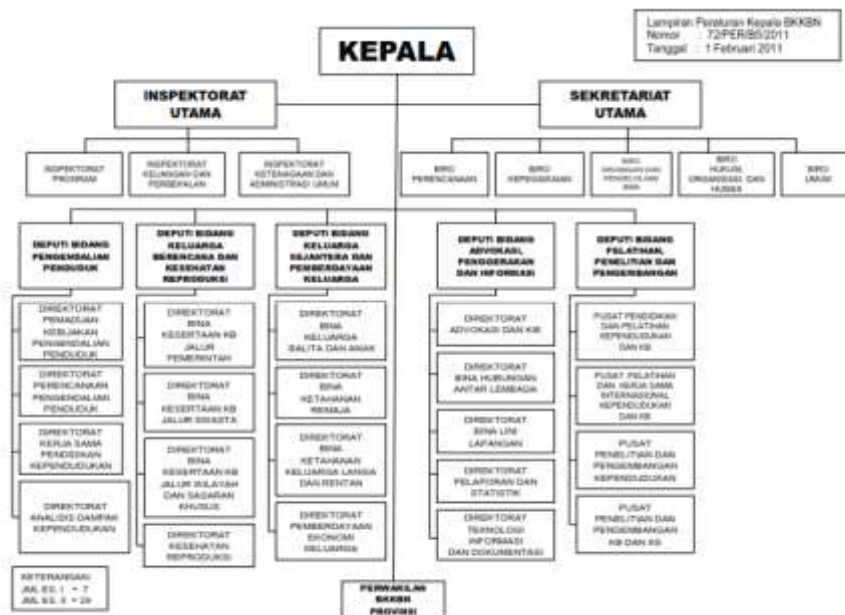
# BAB I PENDAHULUAN

## A. Profil Lembaga

Dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut dengan BKKBN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BKKBN dikoordinasikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

Susunan Organisasi BKKBN terdiri atas:

- a) Kepala;
- b) Sekretariat Utama;
- c) Deputi Bidang Pengendalian Penduduk;
- d) Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- e) Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;
- f) Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi;
- g) Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan;
- h) Inspektorat Utama.



Gambar 1 : Struktur Organisasi

Berikut merupakan nilai-nilai organisasi BKKBN:

1. Integritas (jujur, dipercaya, disiplin, bertanggung jawab, dan tidak munafik)

Integritas berasal dari bahasa Perancis *intégrité* atau Latin *integritas*, yang memiliki akar kata *integer*, yang berarti utuh, menyatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan; kejujuran. Pada intinya, integritas berarti kata menjadi satu dengan perbuatan. Hal ini harus dimaknai sebagai apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang kita ucapkan.

2. Etos kerja (kerja keras, kerja cerdas, berdaya saing, optimis, inovatif, dan produktif)

Etos berasal dari bahasa Latin modern, Yunani *ethos*, yang berarti karakter asli, karakter bawaan, yang membedakan seseorang atau kelompok dari yang lain. Menurut KBBI, etos adalah pandangan hidup yang khas dari suatu golongan social, sementara etos kerja berarti semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok.

3. Gotong royong (kerja sama, solidaritas, komunal, dan berorientasi pada kemaslahatan umum)

Menurut KBBI, gotong royong, berarti bekerja bersama-sama (tolong-menolong, bantu-membantu). Makna nilai gotong royong mirip dengan nilai kerja sama, yang merupakan salah satu nilai yang dianut BKKBN. Dengan menerapkan gotong royong, berarti kita dapat meninggalkan mentalitas silo, kondidi di mana salah satu atau banyak bagian organisasi bekerja secara terpisah dari yang lain. Dengan bergotong royong, kita akan dapat bekerjasama untuk mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, ditetapkan bahwa Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang



tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Untuk itu diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan yang menangani penyelenggaraan urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB di tingkat provinsi, dan kabupaten/kota agar dapat sepenuhnya mengacu pada ketentuan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan KB sebagaimana telah ditetapkan di dalam RPJMN dan Renstra BKKBN 2015-2019.

Selain itu, dengan adanya bentuk kelembagaan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB maka akan memudahkan saat penyusunan Program, Indikator dan Kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB baik di dalam RPJMD, Renstrada, dan RKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penguatan fasilitasi, sosialisasi, pendampingan dan pembinaan, terutama dalam menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dalam rangka penguatan kelembagaan Pengendalian Penduduk dan KB diperlukan beberapa langkah kegiatan, diantaranya:

- 1) Penguatan kapasitas pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB, minimal berkaitan dengan;
  - a) Penguatan kapasitas yang berkaitan dengan kedudukan, fungsi, klasifikasi lembaga daerah yang menangani pengendalian penduduk dan KB.
  - b) Penguatan kapasitas infrastruktur regulasi yang mendukung operasional maupun eksistensi lembaga sebagai tindak lanjut perubahan peraturan perundangan (peraturan daerah, peraturan Bupati/Walikota atau regulasi lain) yang berfungsi menjaga kualitas dan sinergitas kebijakan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi program.
  - c) Penguatan kompetensi/kapasitas sumber daya manusia baik tenaga pengelola Program, tenaga pelaksana maupun tenaga masyarakat yang menyelenggarakan Program KKBPK sesuai tingkatan wilayah.

- d) Penguatan program dan penguangan kegiatan sebagai tindak lanjut penerapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) program KKBPK sebagai penetapan arah Kebijakan umum pembangunan di daerah, Renstrada dan Rencana Kegiatan dan Anggaran SKPD pembangunan pengendalian penduduk dan KB.
  - e) Penguatan kapasitas dukungan sarana, prasarana dan anggaran untuk menyelenggarakan program KKBPK di kabupaten/kota, kecamatan dan desa dalam upaya menjaga kesinambungan dan keberlangsungan pelayanan pengendalian penduduk dan KB kepada masyarakat.
- 2) Menyelenggarakan sistem informasi keluarga yang berkaitan dengan penyelenggaraan PELAPORAN Keluarga, pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi dan pencatatan dan pelaporan pengendalian lapangan program KKBPK secara akurat dan tepat waktu.
  - 3) Memperkuat kedudukan dan peran penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB terutama berkaitan dengan pengelolaan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun tenaga non ASN yang didayagunakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota serta pelaksanaan sertifikasi penyuluh KB;
  - 4) Memperkuat kedudukan hukum PPKBD, SUB PPKBD dan kader KB sebagai penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di dalam Pasal 150 dinyatakan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat khususnya yang bertugas untuk melakukan pemberdayaan masyarakat desa, berperan serta aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan melakukan pelayanan Program KKBPK secara langsung kepada masyarakat.
  - 5) Memperkuat pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengendalian pelayanan/pembinaan kesertaan ber-KB serta dalam pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
  - 6) Memperkuat pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di kabupaten/kota.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Kependudukan pada dasarnya selaras dan mendukung agenda sasaran dan arah kebijakan nasional maupun pembangunan bidang manusia. Sesuai amanat Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pada Pasal 56 Ayat (1), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memiliki tugas melaksanakan Pengendalian Penduduk dan menyelenggarakan Keluarga Berencana. Kemudian untuk melaksanakan tugas tersebut, pada Pasal 56 ayat (2) BKKBN mempunyai fungsi, antara lain:

- a) Perumusan kebijakan nasional;
- b) Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK);
- c) Pelaksanaan advokasi dan koordinasi;
- d) Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi;
- e) Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi; dan
- f) Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di Bidang Pengendalian Penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana.

Dalam melaksanakan fungsi perumusan kebijakan nasional, BKKBN mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahap III periode tahun 2015-2019, dimana sasaran-sasaran yang harus dicapai dalam Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB telah ditetapkan. Sasaran RPJMN tersebut harus dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan dan strategi implementasinya melalui berbagai output, indikator, komponen dan sub komponen pada Rencana Strategis (Renstra) BKKBN tahun 2015-2019.

## **B. Visi Misi Organisasi**

Visi dari BKKBN adalah Menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas. Sedangkan, misi dari BKKBN adalah

1. Mengarus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan.
2. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.

3. Memfasilitasi Pembangunan Keluarga.
4. Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
5. Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten.

## **C. Tugas dan Fungsi Organisasi**

### **C.1 Tugas Pokok dan fungsi BKKBN**

BKKBN diperkuat Undang-Undang Republik Indonesia No 52 Tahun 2009 tentang Pengembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang telah diundangkan melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2009 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080. Undang-Undang ini merupakan Pengganti atas Undang-Undang No 10 Tahun 1992 Tentang Pengembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Dari perubahan Undang-Undang ini, BKKBN pun mengalami perubahan secara kelembagaan dari yang bernama “Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional” menjadi “Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional”. Dengan ini, BKKBN diberikan mandat untuk mengemban tugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan Keluarga Berencana.

BKKBN menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- b) penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- c) pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- d) penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- e) penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;

- f) pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

BKKBN juga menyelenggarakan fungsi:

- a) penyelenggaraan pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- b) pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di lingkungan BKKBN;
- c) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKKBN; pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBN; dan
- d) penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

## **C.2 Tugas Pokok dan Fungsi Deputy Pengendalian Kependudukan**

Perubahan Peraturan Presiden tentang kelembagaan BKKBN terutama terkait dengan penambahan fungsi tidak hanya yang tertera pada Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tetapi juga melaksanakan tugas fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dalam lampiran dinyatakan bahwa Kewenangan Pemerintah dalam hal ini BKKBN yang berkaitan dengan Kedeputian Pengendalian Penduduk, yaitu: 1) Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk; 2) Penetapan perkiraan pengendalian penduduk secara nasional.

## **C.3 Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Analisis Dampak Kependudukan**

Direktorat Analisis Dampak Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang analisis dampak kependudukan.

Direktorat Analisis Dampak Kependudukan menyelenggarakan fungsi:

- a) penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang analisis dampak kependudukan terhadap sosial ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, serta analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisis dampak kependudukan terhadap sosial ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, serta analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- c) penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang analisis dampak kependudukan terhadap sosial ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, serta analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- d) pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang analisis dampak kependudukan terhadap sosial ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, serta analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
- e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pengendalian Penduduk.

#### **C.4 Tugas Pokok dan Fungsi Sub Direktorat Sosial Ekonomi**

Subdirektorat Analisis Dampak Sosial Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang analisis dampak kependudukan terhadap sosial dan ekonomi.

- a) Subdirektorat Analisis Dampak Sosial Ekonomi menyelenggarakan fungsi: penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang analisis dampak kependudukan terhadap sosial dan ekonomi;
- b) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang analisis dampak kependudukan terhadap sosial dan ekonomi;

- c) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisis dampak kependudukan terhadap sosial dan ekonomi;
- d) penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang analisis dampak kependudukan terhadap sosial dan ekonomi; dan
- e) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang analisis dampak kependudukan terhadap sosial dan ekonomi.

### **C.5 Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Analisis Sosial**

Seksi Analisis Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang analisis dampak kependudukan terhadap sosial.

### **D. Tugas Pokok dan Fungsi ASN/PNS**

Dalam UU No.5 Tahun 2014, Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai ASN melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dan mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Pegawai ASN juga berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, pelaksana kebijakan, perekat dan pemersatu bangsa.

Sejalan dengan fungsinya, terdapat berbagai macam profesi pegawai ASN, salah satunya adalah penyusun bahan data kependudukan dan KB yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 41 tahun 2018 tentang

Jabatan Penyusun Bahan Data Kependudukan dan Keluarga Berencana. Uraian kegiatan tugas Jabatan Penyusun Bahan Data Kependudukan dan Keluarga Berencana memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan kegiatan penyusunan bahan data kependudukan dan keluarga berencana. Jabatan ini termasuk dalam Jabatan Administrasi yang mempunyai fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

## **E. Tujuan dan Manfaat (penulisan Rancangan Aktualisasi)**

### **E.1 Bagi Diri Sendiri**

Adapun tujuan umum yang hendak dicapai dalam penulisan Rancangan Aktualisasi pada Pelatihan Dasar CPNS Golongan III ini bagi diri sendiri :

- 1) Mengaktualisasikan Nilai-nilai Dasar ASN yang terangkum dalam ANEKA, serta kedudukan dan peran PNS dalam Pelayanan Publik, Manajemen ASN, dan *Whole of Government* di setiap kegiatan penyelesaian isu terkait, serta kegiatan lain di unit kerja;
- 2) Memenuhi salah satu syarat kelulusan Pelatihan Dasar CPNS Gol. III di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan RI sesuai dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017. Laporan aktualisasi yang dibuat diharapkan dapat mempermudah ASN dalam menerapkan nilai-nilai dasar PNS dalam melayani masyarakat dan kegiatan ini merupakan salah satu persyaratan bagi CPNS agar lulus dalam mengikuti kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dasar CPNS.

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan Rancangan Aktualisasi pada Pelatihan Dasar CPNS Golongan III ini bagi diri sendiri, antara lain:

- 1) Peserta pelatihan dasar CPNS Golongan III dapat mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN (Aparatur Sipil Negara) di tempat tugas masing-masing. Rancangan aktualisasi ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan penerapan nilai-nilai ANEKA serta kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, terutama di Sub Direktorat Dampak Sosial Ekonomi.



## **E.2 Bagi Organisasi**

Adapun tujuan umum yang hendak dicapai dalam penulisan Rancangan Aktualisasi pada Pelatihan Dasar CPNS Golongan III ini bagi instansi, antara lain:

1. Mengkaji isu aktual pada unit kerja Sub Direktorat Dampak Sosial Ekonomi yang berada di Direktorat Analisis Dampak Kependudukan;
2. Merumuskan solusi konkret penyelesaian isu terkait sebagai komitmen diri sendiri dan kontribusi terhadap penyempurnaan unit kerja.

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan Rancangan Aktualisasi pada Pelatihan Dasar CPNS Golongan III ini bagi instansi, antara lain:

1. Menjadi bahan dalam melakukan bimbingan dan evaluasi terkait pelaksanaan aktualisasi nilai-nilai ANEKA serta kedudukan dan peran ASN dalam NKRI di Direktorat Dampak Sosial Ekonomi.

## **BAB II**

### **RANCANGAN AKTUALISASI**

#### **A. Analisa Lingkungan Kerja**

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, terdapat beberapa kendala yang ditemukan di Subdirektorat Analisis Dampak Sosial Ekonomi yang kemudian dalam rancangan aktualisasi ini akan dicari solusinya. Beberapa masalah yang menjadi fokus penulis, antara lain:

- 1) Kurangnya pemahaman pengelola rumah data kependudukan terkait alur pendaftaran K0, khususnya pada skema pelaporan.
- 2) Belum optimalnya ketersediaan dan pemanfaatan hasil kajian di Subdirektorat Analisis Dampak Sosial Ekonomi
- 3) Belum tersedianya infografis Rumah Data Kependudukan yang berkualitas

Berdasarkan identifikasi isu yang dipaparkan, selanjutnya perlu dilakukan pemilihan isu utama atau *core issue* dengan menggunakan analisa terhadap prioritas masalah. Dalam aktualisasi ini, penulis menggunakan metode USG untuk menentukan salah satu isu yang akan diaktualisasikan. Metode analisa USG (Urgency, Seriousness, and Growth) menggunakan indikator skala likert, yaitu dengan perhitungan bahwa skala 1 berarti sangat rendah, skala 2 berarti rendah, skala 3 berarti sedang, skala 4 berarti tinggi dan skala 5 berarti sangat tinggi. Metode USG untuk menetapkan prioritas masalah dengan metode teknik *scoring* dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Urgency, menjelaskan seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas dikaitkan dengan waktu yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu tersebut untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu terkait.
- 2) Seriousness, menjelaskan seberapa serius isu tersebut perlu dibahas dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut atau akibat yang menimbulkan masalah-masalah lain kalau masalah penyebab isu tidak dipecahkan. Perlu dimengerti bahwa dalam keadaan yang sama, suatu

masalah yang dapat menimbulkan masalah lain adalah lebih serius bila dibandingkan dengan suatu masalah lain yang berdiri sendiri.

- 3) Growth, menjelaskan seberapa kemungkinan-kemungkinannya isu tersebut menjadi berkembang dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan makin memburuk kalau dibiarkan.

Dengan metode USG, identifikasi *core issue* yang didapatkan adalah sebagai berikut :

NO	MASALAH	Teknik <i>Scoring</i>			
		U	S	G	Total
1.	Belum optimalnya ketersediaan dan pemanfaatan hasil kajian di Subdirektorat Analisis Dampak Sosial Ekonomi	2	3	3	8
2.	Belum tersedianya infografis Rumah Data Kependudukan yang berkualitas.	2	3	1	6
3.	Kurangnya pemahaman pengelola rumah data kependudukan terkait alur pendaftaran K0, khususnya pada skema pelaporan.	4	4	4	12

Tabel 1. Hasil Identifikasi Masalah Prioritas

Alasan diberikannya skor 4 dalam hal urgensi dari masalah, keseriusan masalah yang dihadapi, dan kemungkinan berkembangnya masalah tersebut sehingga ditetapkan sebagai prioritas masalah dapat dijelaskan sebagai berikut

- 1) Berdasarkan aspek *urgency*, isu kurangnya pemahaman pengelola rumah data kependudukan terkait alur pendaftaran K0 diberikan nilai 4 karena mendesak untuk diselesaikan dengan melihat waktu yang

tersedia untuk melaporkan rumah data kependudukan berakhir di bulan November 2019. Selain itu, Rumah Data Kependudukan saat ini tercatat keberadaannya pada 2.829 titik diseluruh Indonesia nyatanya tidak dibarengi dengan mekanisme pencatatan, pengendalian, dan evaluasi yang baik. Isu kurangnya pemahaman pengelola rumah data kependudukan terkait skema pelaporan rumah data kependudukan ini dampaknya terkait juga dengan sistem evaluasi kedepan yang harus diawali dengan pemahaman akan pelaporan yang baik.

- 2) Berdasarkan aspek *seriousness*, isu kurangnya pemahaman pengelola rumah data kependudukan terkait alur pendaftaran K0 diberikan nilai 4 karena dapat berakibat pada timbulnya kebingungan pada tingkat pengelola rumah data kependudukan yang jika tidak dipecahkan dapat memicu keterlambatan dalam mengumpulkan pelaporan form K0. Sebagai model strategis yang menjadi fokus utama di Subdirektorat Analisis Dampak Sosial Ekonomi, Rumah Data Kependudukan yang saat ini melekat pelaksanaannya dengan Kampung KB secara konseptual merupakan program yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan intervensi sosial berdasarkan partisipasi masyarakat dan peran strategis data. Proses ini dilakukan dengan menyederhanakan kondisi masyarakat yang kompleks kedalam data, dan kemudian melalui pemeranan kader masyarakat menyediakan skema intervensi dalam proses percepatan pembangunan di tingkat lokal. Secara teknis, proses ini membutuhkan relasi lintas institusi pemerintah. Dengan skema interaksi yang kompleks antara berbagai tingkat BKKBN dan perwakilan daerah yang dimiliki ini.
- 3) Berdasarkan aspek *growth*, isu kurangnya pemahaman pengelola rumah data kependudukan terkait skema pelaporan pendaftaran K0 tersebut dapat menyebabkan rantai kordinasi pelaporan rumah data kependudukan dari tingkat pusat ke pengelola pelaporan dapat terhambat atau bahkan tidak berjalan baik. Isu ini jika tidak terselesaikan dapat berkembang dari mulai tidak tercapainya tujuan proses pelaporan awal ini yang dimaksudkan untuk mendapatkan

informasi tentang ketersediaan data di Rumah Data Kependudukan, pengembangan sumber daya manusia pengelola, pemanfaatan dan manfaat Rumah Data Kependudukan hingga. Pada akhirnya, isu ini dikhawatirkan dapat menyebabkan sulitnya intervensi yang efektif.

Berdasarkan pertimbangan diatas, didapatkanlah hasil peringkat pertama dalam analisis USG, maka permasalahan/isu utama atau *core issue* yang diangkat adalah kurangnya pemahaman pengelola Rumah Data Kependudukan terkait alur pendaftaran K0, khususnya pada skema pelaporan.

Rumah Data Kependudukan sendiri merupakan rumah/tempat yang difungsikan sebagai pusat data KKBPK dan data kebutuhan intervensi permasalahan kependudukan yang mencakup sistem pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan di tingkat mikro, mulai dari mengidentifikasi, mengumpulkan, memverifikasi, menganalisis data yang bersumber dari, oleh dan untuk masyarakat sebagai basis untuk intervensi pembangunan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pembentukan Rumah Data Kependudukan:

- a) Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dan mitra kerja dalam pengelolaan data lintas sektor di Kampung KB.
- b) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya data dan informasi untuk peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku yang berwawasan kependudukan.
- c) Meningkatkan sinergitas program KKBPK dan program pembangunan sektor lainnya dalam penyediaan dan pemanfaatan data dan informasi untuk intervensi berbagai permasalahan kependudukan.
- d) Meningkatkan modal sosial, wahana belajar dan berinteraksi masyarakat melalui media data, modul-modul, buku-buku bacaan dan atau melalui penggunaan jaringan internet di Kampung KB.

Form K0 Rumah Data Kependudukan melingkupi proses pendirian, struktur keorganisasian, kelengkapan sarana dan prasarana, dan aspek-aspek legal-formal lainnya yang berkaitan dengan rumah data. Selain itu, pelaporan awal ini juga dimaksudkan untuk mendapatkan informasi

tentang ketersediaan data di Rumah Data Kependudukan, pengembangan sumber daya manusia pengelola, pemanfaatan dan manfaat Rumah Data Kependudukan.

**B. Matrik Analisa Lingkungan Kerja Hingga Menemukan Gagasan/Kegiatan Pemecahan Isu**

NO	URAIAN TUGAS	PERMASALAHAN	URGENCY	SERIOUSNESS	GROWTH	TOTAL	Keterkaitan dengan Substansi (Manajemen ASN, Pelayanan Publik, WoG)	GAGASAN/KEGIATAN PEMECAHAN ISU
1	Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang analisis dampak kependudukan terhadap sosial.	a.) Belum optimalnya ketersediaan dan pemanfaatan hasil kajian di Subdirektorat Analisis Dampak Sosial Ekonomi	2	3	3	8	Pelayanan Publik	
		b.) Belum tersedianya infografis Rumah Data Kependudukan yang berkualitas	2	3	1	6	Pelayanan Publik	

		c.) Belum dianggarkannya dana operasional kader untuk memproses pelaporan Rumah Data Kependudukan	2	2	2	6		
		d.) Minimnya dana untuk melakukan sosialisasi pendaftaran KO Rumah Data Kependudukan	2	2	3	7		
		e) Terbatasnya sumberdaya di BKKBN Provinsi untuk melakukan sosialisasi pendaftaran KO Rumah Data Kependudukan	3	3	3	9		



	f) Kurangnya pemahaman pengelola rumah data kependudukan terkait alur pendaftaran K0, khususnya pada skema pelaporan	4	4	4	12	Pelayanan Publik	<p>1) Membuat <i>leaflet</i> sebagai media komunikasi dalam rangka meningkatkan pemahaman pengelolaan pelayanan pendaftaran form K0 pada model strategis Rumah Data Kependudukan BKKBN</p> <p>2) Membuat Form Penilaian <i>leaflet</i></p> <p>3) Melakukan uji coba <i>leaflet</i> ke kampung KB</p> <p>4) Melakukan perbaikan <i>leaflet</i> atas masukan dari ujicoba dengan pengelola rumah data</p> <p>5) Melakukan sosialisasi <i>leaflet</i> Rumah data kependudukan</p> <p>6) Melakukan monitoring pemanfaatan <i>leaflet</i></p>
--	--	---	---	---	----	------------------	--

## C Deskripsi Gagasan /Kegiatan

Berdasarkan latar belakang masalah dan data pendukung di atas yang menjelaskan Kurangnya pemahaman pengelola rumah data kependudukan terkait alur pendaftaran K0, khususnya pada skema pelaporan beresiko besar terhadap rantai kordinasi pelaporan rumah data kependudukan dari tingkat pusat ke pengelola pelaporan dapat terhambat atau bahkan tidak berjalan baik, maka berikut merupakan gagasan program untuk mengatasi isu yang terjadi.

- 1) Membuat *leaflet* sebagai media komunikasi dalam rangka meningkatkan pemahaman pengelolaan pelayanan pendaftaran form K0 pada model strategis Rumah Data Kependudukan BKKBN
- 2) Membuat Form Penilaian *leaflet*
- 3) Melakukan uji coba *leaflet* ke kampung KB
- 4) Melakukan perbaikan *leaflet* atas masukan dari ujicoba dengan pengelola rumah data
- 5) Melakukan sosialisasi *leaflet* Rumah data kependudukan
- 6) Melakukan monitoring pemanfaatan *leaflet*

Berikut dijelaskan mengenai pengertian terkait Nilai Dasar ASN yang selanjutnya akan dikaitkan dengan rancangan aktualisasi. Nilai-nilai dasar yang menjadi acuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan tugas terdiri dari Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi. Kelima nilai dasar ini disingkat menjadi ANEKA.

### C.1 Akuntabilitas

Akuntabilitas sering disamakan dengan tanggung jawab atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya, kedua konsep itu memiliki makna yang berbeda. Tanggung jawab adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Akuntabilitas adalah suatu kewajiban pertanggungjawaban yang harus

dicapai sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai.

Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Akuntabilitas publik memiliki tiga fungsi utama (Bovens, 2007), yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis (peran demokratis); untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (peran konstitusional); dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas (peran belajar).

Akuntabilitas publik merupakan landasan bagi proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Aparatur pemerintah harus mempertanggung jawabkan tindakan dan pekerjaannya pertama kepada publik dan kedua kepada organisasi tempat kerjanya. Dengan akuntabilitas publik setiap aparat harus dapat menyajikan informasi yang benar dan lengkap untuk menilai kinerjanya baik yang dilakukan oleh masyarakat, organisasi/instansi kerjanya, kelompok pengguna pelayanannya, maupun profesinya. Setiap aparat harus bertanggungjawab (*responsible*) atas pelaksanaan tugas-tugasnya secara efektif yaitu dengan menjaga tetap berlangsungnya tugas-tugasnya dengan baik dan lancar, mengelolanya secara profesional, dan pelaksanaan berbagai peran yang dapat dipercaya.

Pada dasarnya akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja pejabat publik kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas Publik adalah kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk

dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya baik fiskal, manajerial dan program. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu: akuntabilitas vertikal (pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi) dan akuntabilitas horizontal (pertanggungjawaban pada masyarakat luas). Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas tidak akan terwujud apabila tidak ada alat akuntabilitas berupa: Perencanaan Strategis, Kontrak Kinerja, dan Laporan Kinerja.

## C.2 Nasionalisme

Nasionalisme sangat penting dimiliki oleh setiap pegawai ASN. Bahkan tidak hanya sekedar wawasan saja tetapi kemampuan mengaktualisasikan nasionalisme dalam menjalankan fungsi dan tugasnya merupakan hal yang lebih penting. Diharapkan dengan nasionalisme yang kuat, maka setiap pegawai ASN memiliki orientasi berpikir mementingkan kepentingan publik, bangsa, dan negara. Nilai-nilai yang berorientasi pada kepentingan publik menjadi nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai ASN. Pegawai ASN dapat mempelajari bagaimana aktualisasi sila demi sila dalam Pancasila agar memiliki karakter yang kuat dengan nasionalisme dan wawasan kebangsaannya.

Secara umum Nasionalisme merupakan paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan suatu negara yang memiliki tujuan dan cita-cita bersama untuk kepentingan nasional. Sedangkan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Nasionalisme berasal dari kata “nasional” dan “isme” yaitu paham kebangsaan yang mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki rasa kebanggaan sebagai bangsa, atau memelihara kehormatan bangsa. Nasionalisme dalam arti sempit merupakan sikap yang meninggikan bangsanya sendiri, sekaligus tidak

menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya. Dalam arti luas, nasionalisme berarti pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, sekaligus menghormati bangsa lain.

Sifat Nasionalisme hendaklah harus ada pada jiwa suatu bangsa, karena tanpa adanya rasa nasionalisme di dalam jiwa setiap bangsa, maka yang terjadi adalah perang saudara, perang suku seperti yang sering kita saksikan belakangan ini, oleh karena itulah penting bagi kita, khususnya sebagai ASN, untuk terus menjaga rasa Nasionalisme di dalam diri agar terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan, sebagai mana yang telah terjadi di masa lampau, Rasa nasionalisme menciptakan masyarakat yang solid, yang bersatu antar satu sama lain, yang berjuang bersama, tanpa Nasionalisme maka Indonesia belum tentu merdeka, karena kemerdekaan itu bisa di raih karena usaha bersama-sama dengan satu tujuan yang sama.

### C.3. Etika Publik

Etika dapat dipahami sebagai sistem penilaian perilaku serta keyakinan untuk menentukan perbuatan yang pantas guna menjamin adanya perlindungan hak-hak individu, mencakup cara-cara pengambilan keputusan untuk membantu membedakan hal-hal yang baik dan buruk serta mengarahkan apa yang seharusnya dilakukan sesuai nilai-nilai yang dianut (Catalano, 1991).

Konsep etika sering disamakan dengan moral. Padahal ada perbedaan antara keduanya. Etika lebih dipahami sebagai refleksi yang baik atau benar. Sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Etika juga dipandang sebagai karakter atau etos individu/kelompok berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma luhur.

Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus, sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip

dalam bentuk ketentuan tertulis. Kode etik profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku / etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu.

Etika publik adalah refleksi tentang standar/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Etika publik fokusnya pada pelayanan publik yang berkualitas, responsif dan relevan. Realitasnya seringkali kebijakan publik tidak relevan, sebatas menguntungkan pembuat kebijakan namun tidak menjawab kebutuhan masyarakat. Yang tidak kalah penting adalah modalitas etika yakni semua yang menjembatani dari norma ke tindakan. Hal ini menjadi penting karena banyak dari kita mengira jika sudah tahu maka berarti sudah menjalankan, sementara antara tahu dan melakukan terdapat jarak yang jauh. Tekanan etika publik terutama pada menjembatani antara norma atau yang seharusnya dengan tindakan nyata atau yang faktual. Modalitas berbentuk aturan dan sistem, serta tidak bisa hanya disandarkan pada niat baik. Jadi fokus etika publik adalah menyediakan fasilitas, sarana, membuat sistem yang baru supaya ada perubahan.

Etika publik masuk pada etika sosial bukan hanya etika individual sehingga tidak tergantung pada oknum. Bahwa oknum juga berpengaruh tetapi juga terdapat sistem di sana. Perbedaannya etika individual hanya berkaitan dengan perilaku individu dalam masyarakat sedang etika publik berkaitan dengan tanggung jawab dan kewajiban dalam bermasyarakat. Jadi objeknya hukum, politik, strategi, praktik kelompok dan komunitas serta institusi sosial. Sedang validitasnya pada etika individual tergantung pada kesahihan premisnya, artinya sejauh dapat dipertanggungjawabkan secara rasional, maka tidak menjadi masalah. Sementara etika publik tidak cukup hanya dapat dipertanggungjawabkan secara rasional, tetapi harus disetujui

sebanyak mungkin anggota masyarakat. Karena itu dibutuhkan mediasi dalam etika sosial atau etika publik. Profesi ikut berperan, misalnya dalam pemerintahan, ASN harus senantiasa memegang teguh standar pelayan publik dimana pun dan kapan pun sesuai dengan kode etik ASN yang diberlakukan di seluruh Indonesia.

#### C.4. Komitmen Mutu

Komitmen mutu adalah janji pada diri kita sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam tindakan kita untuk menjaga mutu kinerja pegawai. Bidang apapun yang menjadi tanggung jawab pegawai negeri sipil semua mesti dilaksanakan secara optimal agar dapat memberi kepuasan kepada *stakeholder*. Komitmen mutu merupakan tindakan untuk menghargai efektivitas, efisiensi, inovasi dan kinerja yang berorientasi mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Ada empat indikator dari nilai-nilai dasar komitmen mutu yang harus diperhatikan, yaitu efektif, efisien, inovasi, orientasi mutu.

#### C.5. Anti Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu *Corruptio* yang artinya kerusakan, kebobrokan dan kebusukan. Korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan luar biasa, karena dampaknya yang luar biasa, menyebabkan kerusakan baik dalam ruang lingkup pribadi, keluarga, masyarakat dan kehidupan yang lebih luas. Kerusakan tidak hanya terjadi dalam kurun waktu yang pendek, namun dapat berdampak secara jangka panjang. Objek korupsi tidak hanya sesuatu yang dapat dinilai dari nilai rupiah seperti korupsi uang, tetapi juga hal-hal lain terkait kewajiban yang harus dilaksanakan seperti korupsi waktu, korupsi kewenangan, dan lain sebagainya.

Adapun penjelasan mengenai nilai-nilai dasar ASN dalam gagasan/kegiatan yang akan diangkat dalam aktualisasi ini jika adalah :

1. Membuat *leaflet*

Perwujudan nilai-nilai dasar ASN dalam aktualisasi:

- Akuntabilitas: berupaya menyediakan informasi yang akurat pada *leaflet* yang dibuat.
- Nasionalisme: musyawarah untuk menentukan konten dan semata berorientasi pada kepentingan publik dalam memberikan kemudahan pada pengelola rumah data dalam mengerjakan *leaflet* skema pelaporan kartu pendaftaran rumah data kependudukan
- Komitmen Mutu: berorientasi pada mutu dan kreatif dalam pembuatan *leaflet*
- Antikorupsi: menerapkan nilai peduli semata untuk memudahkan pekerjaan pengelola dalam melakukan pelaporan dengan tidak mendesai *leaflet* dengan semenarik mungkin dan semudah mungkin untuk dipahami.

2. Pembuatan Form Penilaian *leaflet*

Perwujudan nilai-nilai dasar ASN dalam aktualisasi:

- Akuntabilitas: mewujudkan transparansi dengan mendorong komunikasi yang lebih besar dengan masyarakat tentang ketersediaan *leaflet*.
- Nasionalisme: musyawarah untuk menentukan indikator dalam form penilaian *leaflet*
- Etika Publik: cermat dalam membangun dan mengumpulkan masukan dari publik
- Komitmen mutu: konsisten mengikuti indikator yang telah ditetapkan
- Antikorupsi: Bertanggung jawab terhadap tugas merancang indikator



### 3. Melakukan ujicoba *leaflet*

Perwujudan nilai-nilai dasar ASN dalam aktualisasi:

- Akuntabilitas: pengecekan ketersesuaian *leaflet* dengan kebutuhan publik
- Nasionalisme: Memanfaatkan form penilaian dengan semangat untuk memudahkan publik memahami rumah data kependudukan.
- Etika Publik: bermindset sebagai pelayan publik dan mendengarkan aspirasi dan masukan dalam ujicoba *leaflet*
- Komitmen Mutu: efektif dan efisien dalam melaksanakan uji coba *leaflet*
- Anti Korupsi: Bertanggung jawab terhadap tugas dan tidak melakukan tindakan korupsi dalam pelaksanaan ujicoba *leaflet*.

### 4. Melakukan perbaikan *leaflet* atas masukan dari ujicoba dengan pengelola rumah data

Perwujudan nilai-nilai dasar ASN dalam aktualisasi:

- Akuntabilitas: Keterbukaan atas semua masukan yang disampaikan dan melakukan evaluasi
- Nasionalisme: Memanfaatkan informasi dengan semangat untuk kepentingan umum bukan kepentingan individu.
- Etika Publik: Melakukan pola kerja beretika dengan sikap hormat dan sopan dalam pembuatan *leaflet*
- Komitmen Mutu: efektifitas, efisiensi dengan berorientasi pada hasil yang memuaskan dalam merevisi *leaflet*
- Anti Korupsi: bekerja keras dalam melakukan tugas.

### 5. Sosialisasi *Leaflet* ke Rumah Data di Kampung KB

Perwujudan nilai-nilai dasar ASN dalam aktualisasi:

- Akuntabilitas: Keterbukaan atas semua tindakan yang dilakukan
- Nasionalisme: Memanfaatkan data/informasi dengan semangat untuk kepentingan umum bukan kepentingan individu

- Etika Publik: Melakukan pola kerja beretika dengan sikap hormat dan sopan dalam mensosialisasikan leaflet
- Komitmen Mutu: efektif dan efisien dalam melakukan sosialisasi
- Anti Korupsi: Bertanggung jawab terhadap tugas; penempatan sumber daya yang tepat, dan evaluasi dalam melakukan sosialisasi

#### 6. Monitoring Pemanfaatan *Leaflet*

Perwujudan nilai-nilai dasar ASN dalam aktualisasi:

- Akuntabilitas: keterbukaan atas hasil pemanfaatan di lapangan
- Nasionalisme: memanfaatkan data/informasi dengan semangat untuk perbaikan kinerja
- Etika publik: profesional dalam menjalankan pekerjaan
- Komitmen mutu: efektifitas, efisiensi dengan berorientasi pada hasil berupa kebermanfaatan produk yang dihasilkan dan menjamin komitmen mutu dengan tetap memantau proses di lapangan
- Anti korupsi: bertanggung jawab terhadap tugas hingga selesai dan memperbaiki kinerja dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat

#### D.Matrik Rancangan Aktualisasi

<b>Unit Kerja:</b>	: Direktorat Analisis Dampak Kependudukan
<b>Identifikasi Isu</b>	: 1. Belum optimalnya ketersediaan dan pemanfaatan hasil kajian di Unit Kerja 2. Belum tersedianya infografis Rumah Data Kependudukan yang berkualitas 3. Kurangnya pemahaman pengelola rumah data kependudukan terkait alur pendaftaran K0, khususnya pada skema pelaporan.
<b>Isu yang Diangkat</b>	: Kurangnya pemahaman pengelola rumah data kependudukan terkait alur pendaftaran K0, khususnya pada skema pelaporan
<b>Gagasan/Kegiatan Pemecahan Isu</b>	1) Membuat <i>leaflet</i> sebagai media komunikasi dalam rangka meningkatkan pemahaman pengelolaan pelayanan pendaftaran form K0 pada model strategis Rumah Data Kependudukan BKKBN 2) Membuat Form Penilaian <i>leaflet</i> 3) Melakukan uji coba <i>leaflet</i> ke kampung KB 4)Melakukan perbaikan <i>leaflet</i> atas masukan dari ujicoba dengan pengelola rumah data 5) Melakukan sosialisasi <i>leaflet</i> Rumah data kependudukan 6) Melakukan monitoring pemanfaatan <i>leaflet</i>

NO	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	KETERKAITAN SUBSTANSI	KONTRIBUSI VISI/MISI	PENGUATAN NILAI ORGANISASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Membuat <i>leaflet</i> sebagai Media Komunikasi dalam Rangka Meningkatkan Pemahaman Pengelolaan Pelayanan Pendaftaran Form K0 pada Model Strategis Rumah Data Kependudukan BKKBN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempelajari panduan Rumah Data Kependudukan Ditdamduk</li> <li>2. Inventarisasi materi yang akan dimasukkan ke dalam <i>leaflet</i></li> <li>3. Pemilihan desain</li> <li>4. Penyusunan <i>leaflet</i> rumah dataku</li> <li>5. Konsultasi ketersesuaian <i>leaflet</i> dengan Kasubdit</li> <li>6. Melakukan perbaikan <i>leaflet</i> berdasarkan masukan dari</li> </ol>	<p><b>Output:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pemahaman tentang pelaksanaan Rumah Data Kependudukan</li> <li>b) Terinventarisasinya materi</li> <li>c) Terpilihnya desain</li> <li>d) Tersedianya <i>leaflet</i> untuk direvisi</li> <li>e) Tercetaknya <i>leaflet</i> yang telah direvisi</li> </ol> <p><b>Evidence:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) <i>Leaflet</i> (sebelum direvisi)</li> <li>b) <i>Leaflet</i> (sesudah direvisi Kasubdit)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a) Akuntabilitas: berupaya menyediakan informasi yang akurat pada <i>leaflet</i> yang dibuat</li> <li>b) Nasionalisme: musyawarah untuk menentukan konten dan semata berorientasi pada kepentingan publik dalam memberikan kemudahan pada pengelola rumah data dalam mengerjakan <i>leaflet</i> skema pelaporan kartu pendaftaran rumah data kependudukan</li> <li>c) Komitmen Mutu: berorientasi pada</li> </ol>	Mengarus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan	Kegiatan ini merupakan perwujudan dari nilai kerja cerdas, yakni bekerja dengan teliti dan akurat.

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>TAHAPAN KEGIATAN</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>KETERKAITAN SUBSTANSI</b>	<b>KONTRIBUSI VISI/MISI</b>	<b>PENGUATAN NILAI ORGANISASI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		Kasubdit 7. Melakukan koordinasi dengan Ditvokom 8. Melakukan perizinan ke Kasubdit untuk mencetak <i>leaflet</i> 9. Mencetak <i>leaflet</i>		mutu dan kreatif dalam pembuatan <i>leaflet</i> d) Antikorupsi: menerapkan nilai peduli semata untuk memudahkan pekerjaan pengelola dalam melakukan pelaporan dengan tidak mendesai <i>leaflet</i> dengan semenarik mungkin dan semudah mungkin untuk dipahami.		

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>TAHAPAN KEGIATAN</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>KETERKAITAN SUBSTANSI</b>	<b>KONTRIBUSI VISI/MISI</b>	<b>PENGUATAN NILAI ORGANISASI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
2	Membuat Form Penilaian <i>leaflet</i>	1) Inventarisasi indikator penilaian yang akan dimasukkan ke dalam form penilaian <i>leaflet</i> 2) Mengkonsultasikan form indikator dengan Kasubdit 3) Membuat <i>form</i> 4) Melakukan perizinan ke Kasubdit untuk mencetak form penilaian <i>leaflet</i> 5) Mencetak form penilaian <i>leaflet</i>	<b>Output:</b> a) Terinventarisasinya indikator penilaian yang akan dimasukkan ke dalam form penilaian <i>leaflet</i> b) Tercetaknya form penilaian <i>leaflet</i>  <b>Evidence:</b> Form penilaian <i>leaflet</i>	a) Akuntabilitas: mewujudkan transparansi dengan mendorong komunikasi yang lebih besar dengan masyarakat tentang ketersediaan <i>leaflet</i> b) Nasionalisme: musyawarah untuk menentukan indikator dalam form penilaian <i>leaflet</i> c) Etika Publik: cermat dalam membangun dan mengumpulkan masukan dari publik d) Komitmen mutu: konsisten mengikuti indikator yang telah ditetapkan e) Antikorupsi: Bertanggung	Mengarus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan	Kegiatan ini juga mewujudkan nilai teliti, yaitu teliti dalam membuat program dengan tetap berusaha memenuhi penilaian baik dari masyarakat.

NO	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	KETERKAITAN SUBSTANSI	KONTRIBUSI VISI/MISI	PENGUATAN NILAI ORGANISASI
1	2	3	4	5	6	7
				jawab terhadap tugas merancang indikator		
3.	Melakukan ujicoba <i>leaflet</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkonsultasikan lokus ujicoba dengan Kasubdit</li> <li>2. Membuat surat tugas untuk ujicoba <i>leaflet</i></li> <li>3. Melakukan ujicoba ke Rumah Data Kependudukan di kampung KB</li> <li>4. Mengumpulkan form masukan <i>leaflet</i> dari pengelola</li> </ol>	<p><b>Output:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Terpilihnya lokus ujicoba <i>leaflet</i></li> <li>b) Terbuatnya surat tugas untuk melakukan ujicoba</li> <li>c) Dilaksanakannya ujicoba</li> <li>d) Terkumpulnya form masukan <i>leaflet</i> dari pengelola rumah data</li> <li>e) Terinventarisasinya masukan dari pengelola rumah data untuk perbaikan <i>leaflet</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a) Akuntabilitas: pengecekan ketersesuaian <i>leaflet</i> dengan kebutuhan publik</li> <li>b) Nasionalisme: Memanfaatkan form penilaian dengan semangat untuk memudahkan publik memahami rumah data kependudukan.</li> <li>c) Etika Publik: bermindset sebagai pelayan publik dan mendengarkan aspirasi dan</li> </ol>	Mengarus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan	Kegiatan ini juga mewujudkan nilai tangguh, yaitu sikap pantang menyerah dalam mencapai hasil yang memuaskan

NO	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	KETERKAITAN SUBSTANSI	KONTRIBUSI VISI/MISI	PENGUATAN NILAI ORGANISASI
1	2	3	4	5	6	7
		rumah data. 5. Menginventarisasi masukan dari pengelola rumah data untuk perbaikan <i>leaflet</i>	<b>Evidence</b> a) Notulensi hasil uji coba b) Foto dokumentasi c) Form penilaian <i>leaflet</i> yang telah diisi oleh pengelola rumah data	masukan dalam uji coba <i>leaflet</i> d) Komitmen Mutu: efektif dan efisien dalam melaksanakan uji coba <i>leaflet</i> e) Anti Korupsi: Bertanggung jawab terhadap tugas dan tidak melakukan tindakan korupsi dalam pelaksanaan uji coba <i>leaflet</i>		
4.	Melakukan perbaikan <i>leaflet</i> atas masukan dari uji coba dengan pengelola rumah data	1) Mengkonsultasikan hasil uji coba dengan Kasubdit 2) Melakukan revisi <i>leaflet</i> rumah dataku	<b>Output:</b> a) Terkonsultasikannya hasil uji coba <i>leaflet</i> dengan Kasubdit b) Dilakukannya revisi <i>leaflet</i>  <b>Evidence:</b> <i>Leaflet</i> (sesudah	a) Akuntabilitas: Keterbukaan atas semua masukan yang disampaikan dan melakukan evaluasi b) Nasionalisme: Memanfaatkan informasi dengan semangat untuk kepentingan umum bukan kepentingan individu c) Etika Publik:	Mengarus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan	Kegiatan ini juga mewujudkan nilai teliti, yaitu teliti dalam membuat program dengan tetap berusaha memenuhi penilaian baik dari masyarakat.



NO	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	KETERKAITAN SUBSTANSI	KONTRIBUSI VISI/MISI	PENGUATAN NILAI ORGANISASI
1	2	3	4	5	6	7
			memasukan revisi dari pengelola rumah data)	Melakukan pola kerja beretika dengan sikap hormat dan sopan dalam pembuatan <i>leaflet</i> d) Komitmen Mutu: efektifitas, efisiensi dengan berorientasi pada hasil yang memuaskan dalam merevisi <i>leaflet</i> e) Anti Korupsi: bekerja keras dalam melakukan tugas		
5.	Sosialisasi <i>leaflet</i> ke Rumah Data di Kampung KB	1. Berkonsultasi dengan atasan 2. Membuat surat tugas untuk sosialisasi 3. Membuat surat perizinan ke kampung KB 4. Follow Up	<b>Output:</b> a) Dilakukannya konsultasi dengan atasan b) Terbuatnya surat tugas untuk sosialisasi c) Terbuatnya surat perizinan ke	a) Akuntabilitas: Keterbukaan atas semua tindakan yang dilakukan b) Nasionalisme: Memanfaatkan data/informasi dengan semangat untuk kepentingan umum bukan kepentingan	Mengarus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan	Kegiatan ini merupakan perwujudan dari nilai kerjasama, yaitu perilaku membangun hasil yang memuaskan melalui

NO	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	KETERKAITAN SUBSTANSI	KONTRIBUSI VISI/MISI	PENGUATAN NILAI ORGANISASI
1	2	3	4	5	6	7
		5. Melakukan kunjungan	<p>kampung KB</p> <p>d) Dilakukannya <i>Follow Up</i></p> <p>e) Dilakukan kunjungan</p> <p><b>Evidence:</b></p> <p>a) Notulensi sosialisasi leaflet</p> <p>b) Foto dokumentasi</p> <p>c) Form penilaian <i>leaflet</i> yang telah diisi oleh pengelola rumah data</p>	<p>individu</p> <p>c) Etika Publik: Melakukan pola kerja beretika dengan sikap hormat dan sopan dalam mensosialisasikan <i>leaflet</i></p> <p>d) Komitmen Mutu: efektif dan efisien dalam melakukan sosialisasi</p> <p>e) Anti Korupsi: Bertanggung jawab terhadap tugas; penempatan sumber daya yang tepat, dan evaluasi dalam melakukan sosialisasi.</p>		diskusi musyawarah untuk mencapai tujuan bersama

NO	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	KETERKAITAN SUBSTANSI	KONTRIBUSI VISI/MISI	PENGUATAN NILAI ORGANISASI
1	2	3	4	5	6	7
6	Monitoring pemanfaatan <i>leaflet</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkonsultasi dengan atasan</li> <li>2. Membuat surat perizinan ke kampung KB</li> <li>3. Follow Up</li> <li>4. Melakukan kunjungan</li> </ol>	<p><b>Output:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Terlaksananya konsultasi dengan atasan</li> <li>b) terselesaikannya surat perizinan ke kampung KB</li> <li>c) Dilakukannya <i>Follow Up</i></li> <li>d) Delakukan kunjungan</li> </ol> <p><b>Evidence:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Catatan monitoring pemanfaatan <i>leaflet</i></li> <li>b) Foto dokumentasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a) akuntabilitas: keterbukaan atas hasil pemanfaatan di lapangan</li> <li>b) Nasionalisme : Memanfaatkan data/informasi dengan semangat untuk perbaikan kinerja</li> <li>c) Etika Publik : profesional dalam menjalankan pekerjaan</li> <li>d) Komitmen Mutu: efektifitas, efisiensi dengan berorientasi pada hasil berupa kebermanfaatan produk yang dihasilkan dan menjamin komitmen mutu dengan tetap memantau proses di lapangan</li> <li>e) Anti Korupsi:</li> </ol>	Mengarus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan	Kegiatan ini merupakan perwujudan dari nilai integritas, yaitu mempertahankan hasil hingga mencapai tujuan memuaskan publik

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>TAHAPAN KEGIATAN</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>KETERKAITAN SUBSTANSI</b>	<b>KONTRIBUSI VISI/MISI</b>	<b>PENGUATAN NILAI ORGANISASI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
				Bertanggung jawab terhadap tugas hingga selesai dan memperbaiki kinerja dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat		

### E. Jadwal Rencana Aktualisasi

No	Tahapan Kegiatan	Oktober	November			
		IV	I	II	III	IV
1	Pembuatan Leaflet sebagai Media Komunikasi dalam Rangka Meningkatkan Pemahaman Pengelolaan Pelayanan Pendaftaran Form K0 pada Model Strategis Rumah Data Kependudukan BKKBN					
	1) Mempelajari panduan Rumah Data Kependudukan Ditdamduk					
	2) Inventarisasi materi yang akan dimasukkan ke dalam leaflet					
	3) Pemilihan desain					
	4) Penyusunan leaflet rumah dataku					
	5) Konsultasi ketersediaan leaflet dengan Kasubdit					
	6) Melakukan perbaikan leaflet berdasarkan masukan dari Kasubdit					
	7) Melakukan koordinasi dengan Ditvokom					
	8) Melakukan perizinan ke Kasubdit untuk mencetak leaflet					
	9) Mencetak leaflet					
2	Pembuatan Form Penilaian <i>leaflet</i>					
	1) Inventarisasi indikator penilaian yang akan dimasukkan ke dalam form penilaian <i>leaflet</i>					

	2) Mengkonsul-tasikan form indikator dengan Kasubdit					
	3) Membuat <i>leaflet</i>					
	4) Melakukan perizinan ke Kasubdit untuk mencetak form penilaian <i>leaflet</i>					
	5) Mencetak form penilaian <i>leaflet</i>					
3	Ujicoba <i>leaflet</i>					
	1) Mengkonsultasikan lokus ujicoba dengan Kasubdit					
	2) Membuat surat tugas untuk ujicoba <i>leaflet</i>					
	3) Melakukan ujicoba ke Rumah Data Kependudukan di kampung KB					
	4) Mengumpulkan form masukan <i>leaflet</i> dari pengelola rumah data.					
	5) Menginventari-sasi masukan dari pengelola rumah data untuk perbaikan <i>leaflet</i>					
4	Melakukan perbaikan <i>leaflet</i> atas masukan dari ujicoba dengan pengelola rumah data					
	1) Mengkonsultasikan hasil ujicoba dengan Kasubdit					
	2) Melakukan revisi <i>leaflet</i> rumah dataku					
5	Sosialisasi <i>leaflet</i> ke Rumah Data di Kampung KB					

	1) Berkonsultasi dengan atasan					
	2) Membuat surat					
	3) Perizinan ke Kampung KB					
	4) Follow Up					
	5) Melakukan kunjungan					
6	Monitoring pemanfaatan <i>leaflet</i>					
	1) Berkonsultasi dengan atasan					
	2) Membuat surat					
	3) perizinan ke kampung KB					
	4) Follow Up					
	5) Melakukan kunjungan					
7	Penulisan Laporan Aktualisasi					

## F.Rencana Antisipasi Kendala yang Dihadapi

No	Tahapan Kegiatan	Kendala	Antisipasi
1	Pembuatan Leaflet sebagai Media Komunikasi dalam Rangka Meningkatkan Pemahaman Pengelolaan Pelayanan Pendaftaran Form KO pada Model Strategis Rumah Data Kependudukan BKKBN		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mempelajari panduan Rumah Data Kependudukan Ditdamduk</li> <li>2) Inventarisasi materi yang akan dimasukkan ke dalam leaflet</li> <li>3) Pemilihan desain</li> <li>4) Penyusunan leaflet rumah dataku</li> <li>5) Konsultasi ketersesuaian leaflet dengan Kasubdit</li> <li>6) Melakukan perbaikan leaflet berdasarkan masukan dari Kasubdit</li> <li>7) Melakukan koordinasi dengan Ditvokom</li> <li>8) Melakukan perizinan ke Kasubdit untuk mencetak leaflet</li> <li>9) Mencetak leaflet</li> </ol>	Belum punya pengalaman dalam membuat media komunikasi leaflet	Perbanyak diskusi dengan pihak pengawas mutu media komunikasi
2	Pembuatan Form Penilaian <i>leaflet</i>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Inventarisasi indikator penilaian yang akan dimasukkan ke dalam form penilaian leaflet</li> <li>2) Mengkonsultasikan indikator dengan Kasubdit</li> <li>3) Membuat leaflet</li> <li>4) Melakukan perizinan ke Kasubdit untuk mencetak form penilaian leaflet</li> <li>5) Mencetak form penilaian leaflet</li> </ol>		
3	Ujicoba <i>leaflet</i>		



	1) Mengkonsultasikan lokus ujicoba dengan Kasubdit	Kekhawatiran surat tugas untuk ujicoba leaflet tidak disetujui	Meminta masukan dan bantuan kasubdit
	2) Membuat surat tugas untuk ujicoba leaflet		
	3) Melakukan ujicoba ke Rumah Data Kependudukan di kampung KB		
	4) Mengumpulkan form masukan leaflet dari pengelola rumah data.		
	5) Menginventari-sasi masukan dari pengelola rumah data untuk perbaikan leaflet		
4.	Melakukan perbaikan <i>leaflet</i> atas masukan dari ujicoba dengan pengelola rumah data		
	Mengkonsultasikan hasil ujicoba dengan Kasubdit	Kesibukan atasan	Mampu mengatur jadwal dengan baik
	Melakukan revisi <i>leaflet</i> rumah dataku	<i>deadlock</i>	Mempunyai rekan yang dapat memberikan masukan
5	Sosialisasi <i>leaflet</i> ke Rumah Data di Kampung KB		
	Berkonsultasi dengan atasan	Kesibukan atasan	Mampu mengatur jadwal dengan baik
	Membuat surat Perizinan ke Kampung KB	Tidak mendapatkan izin di hari yang disetujui	Mempunyai rencana alternatif
	Follow Up	Ketidacocokan waktu	Mempunyai rencana alternatif
	Melakukan kunjungan	Ada pekerjaan lain di kantor sehingga tidak dapat menepati janji	Mempunyai rencana alternatif
6.	Monitoring pemanfaatan <i>leaflet</i>		
	Berkonsultasi dengan atasan	Kesibukan atasan	Mampu mengatur jadwal dengan baik
	Membuat surat perizinan ke kampung KB	Tidak mendapatkan izin	Mempunyai rencana alternatif
	Follow Up	Ketidacocokan waktu	Mempunyai rencana

			alternatif
	Melakukan kunjungan	Ada pekerjaan lain di kantor sehingga tidak dapat menepati janji	Mempunyai rencana alternatif

### BAB III

#### CAPAIAN PELAKSANAAN AKTUALISASI

##### A. Gambaran Umum Pelaksanaan Aktualisasi

Penulis melaksanakan aktualisasi untuk memenuhi tugas dalam Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tahun 2019 selama tiga puluh hari masa habituasi atau *off campus* mulai tanggal 27 Oktober – 7 Desember 2019. Rangkaian kegiatan aktualisasi tersebut merupakan gagasan untuk pemecahan isu yang diangkat dalam rancangan aktualisasi, yaitu kurangnya pemahaman pengelola rumah data kependudukan terkait alur pendaftaran KO, khususnya pada skema pelaporan. Isu tersebut merupakan masalah yang terjadi di lingkungan kerja Penulis, yaitu di sub-direktorat Analisis Dampak Kependudukan BKKBN Pusat. Realisasi kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya pemecahan isu adalah sebagai berikut.

**Kegiatan 1: Membuat *leaflet* sebagai media komunikasi dalam rangka meningkatkan pemahaman pengelola tentang skema pelaporan rumah data kependudukan.**

Kegiatan	Rincian	Keterangan
Kegiatan 1.	Membuat <i>leaflet</i>	Telah terlaksana
Tanggal pelaksanaan	21-25 Oktober 2019	Terlaksana Tepat Waktu Sesuai Agenda
Dokumentasi	Lampiran Halaman	Terlampir

##### **Tahapan Kegiatan:**

###### **1.1 Mempelajari panduan Rumah Data Kependudukan Ditdamduk**

- a. Deskripsi kegiatan: Berdasarkan hasil diskusi dengan mentor dan atasan langsung, *leaflet* yang disusun harus berdasarkan Pedoman Rumah Data Kependudukan di Kampung KB. Pada tahap ini, penulis melakukan studi literatur dengan mempelajari panduan rumah data kependudukan. Meskipun pelaporan Rumah Data

Kependudukan ini bersifat wajib, belum meratanya pemahaman terkait pelaporan Rumah Data Kependudukan menjadi akar masalah lambatnya pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga masih banyak rumah data yang belum masuk dalam rekapitulasi pelaporan rumah data kependudukan secara keseluruhan. Dengan mempelajari panduan, penulis memahami adanya upaya peningkatan kemampuan intervensi sosial berdasarkan partisipasi masyarakat dan peran strategis data sekaligus dapat merepresentasikan kondisi berjalannya Rumah Data Kependudukan dan bagaimana proses program yang telah dilakukan melalui pelaporan rumah data kependudukan.

- b. Output tahapan kegiatan terhadap pemecahan isu adalah adanya pemahaman tentang pelaksanaan pelaporan Rumah Data Kependudukan melalui form K0.
- c. Keterkaitan tahapan kegiatan dengan substansi mata pelatihan: 1) bekerja dengan jujur, sepenuh hati dan tuntas (akuntabilitas); 2) menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya secara efektif dan efisien (komitmen mutu); 3) menyelesaikan tahapan kegiatan secara tepat waktu (anti korupsi).
- d. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, yaitu mengarus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan melalui penyederhanaan skema dalam Panduan Tata Cara Pelaporan Kelompok Kegiatan Rumah Data Kependudukan agar dapat mudah dipahami dan dilaksanakan oleh Pengurus Rumah Data Kependudukan.
- e. Penguatan nilai organisasi pada tahapan kegiatan ini adalah nilai kerja cerdas, yakni perilaku untuk mampu bertindak optimal secara efektif dan efisien dalam mempelajari panduan rumah data kependudukan.

## **1.2 Inventarisasi materi yang akan dimasukkan ke dalam *leaflet***

- a. Deskripsi kegiatan: mengingat waktu yang terbatas, penulis segera membuat rangkuman materi dari studi literatur yang ada. Penulis melakukan inventarisasi materi selama 3 hari kerja. Hasil dari inventarisasi ini dilakukan dengan dimasukkan dalam *powerpoint* sekaligus sebagai paparan sosialisasi Pelaporan Kelompok Kegiatan Rumah Data Kependudukan di berbagai kesempatan oleh Kasubdit.
- b. Output tahapan kegiatan terhadap pemecahan isu adalah terinventarisasinya materi tentang pelaksanaan pelaporan Rumah Data Kependudukan melalui form KO dalam bentuk *powerpoint*.
- c. Keterkaitan tahapan kegiatan dengan substansi mata pelatihan: 1) bekerja dengan cepat dan lengkap (akuntabilitas); 2) menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar (nasionalisme); 3) transparan (anti korupsi).
- d. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, yaitu mengarusutamakan pembangunan berwawasan Kependudukan melalui inventarisasi materi berupa Skema Tata Cara Pelaporan Kelompok Kegiatan Rumah Data Kependudukan agar dapat mudah dipahami dan dilaksanakan oleh Pengurus Rumah Data Kependudukan.
- e. Penguatan nilai organisasi pada tahapan kegiatan ini adalah nilai kerja cerdas, yakni perilaku untuk mampu bertindak optimal secara efektif dan efisien dalam menginventarisasi materi Skema Tata Cara Pelaporan Kelompok Kegiatan Rumah Data Kependudukan.

## **1.3 Pemilihan desain**

- a. Deskripsi kegiatan: Penulis segera membuat desain dengan merancang layout dari inventarisasi materi yang sudah dilakukan. Pemilihan desain ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi *publisher*.

- b. Output tahapan kegiatan terhadap pemecahan isu adalah terpilihnya desain *leaflet* pelaporan Rumah Data Kependudukan melalui form K0 yang dikerjakan di aplikasi *publisher*.
- c. Keterkaitan tahapan kegiatan dengan substansi mata pelatihan: dalam merancang desain *leaflet*, penulis melakukannya dengan cara-cara yang kreatif dan inovatif (komitmen mutu).
- d. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, yaitu mengarus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan melalui perancangan desain *leaflet* yang mudah dipahami oleh Pengurus Rumah Data Kependudukan.
- e. Penguatan nilai organisasi pada tahapan kegiatan ini adalah nilai kerja cerdas, yaitu perilaku untuk mampu bertindak optimal secara efektif dan efisien dalam proses pemilihan desain *leaflet*.

#### **1.4 Penyusunan *leaflet* rumah dataku**

- a. Deskripsi kegiatan: Sebelumnya, tidak ada media komunikasi yang menyederhanakan panduan Rumah Data Kependudukan. Oleh karena itu, penulis memilih *leaflet* sebagai media yang dipilih karena Penulis menganggap media tersebut cukup efektif dan efisien. Efektif karena jika *leaflet* tersebut disediakan akan mudah dibawa kemanapun oleh pengelola dan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan Rumah Data Kependudukan, terlebih jika disediakan dalam bentuk *softcopy* untuk disimpan dalam ponsel. Informasi yang jelas dan lengkap pada *leaflet* diharapkan dapat mempermudah dalam pelaporan rumah data kependudukan. Efisien karena pembuatannya relatif mudah dan murah. Waktu yang dibutuhkan untuk mendapat informasi di dalamnya juga cepat.
- b. Output tahapan kegiatan terhadap pemecahan isu adalah tersedianya *leaflet* untuk selanjutnya direvisi secara berjenjang oleh Kasi (atasan langsung) dan Kasubdit Analisis Dampak Sosial

Ekonomi di Lingkungan Direktorat Analisis Dampak Kependudukan.

- c. Keterkaitan tahapan kegiatan dengan substansi mata pelatihan: dalam menyusun leaflet, penulis melakukannya dengan cara-cara yang kreatif dan inovatif (komitmen mutu), menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar (nasionalisme) sehingga mudah dipahami pengguna layanan (akuntabilitas).
- d. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, yaitu mengarusutamakan pembangunan berwawasan Kependudukan melalui penyusunan *leaflet* yang mudah dipahami oleh Pengurus Rumah Data Kependudukan.
- e. Penguatan nilai organisasi pada tahapan kegiatan ini adalah nilai kerja ikhlas adalah perilaku dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan tulus dan sungguh-sungguh.

#### **1.5 Konsultasi dengan Meminta Kritik dan Saran dari Kasi dan Kasubdit terkait Rancangan *Leaflet* yang telah dibuat**

- a. Deskripsi kegiatan : Penulis meminta kritik dan saran terkait *leaflet* dan mendapatkan masukan yang diutarakan beliau terkait rencana aktualisasi. Kasubdit sangat mendukung pembuatan output rencana aktualisasi penulis, sebab menurut Beliau *leaflet* ini akan sangat bermanfaat untuk membantu proses pelaporan K0 yang telah disosialisasikan melalui *video conference* pada tanggal 15 Oktober 2019 dan dapat digunakan sebagai informasi pendukung Panduan Pelaporan Kelompok Kegiatan Rumah Dataku bagi seluruh jajaran pengelola Program Pengendalian Penduduk di tingkat provinsi.
- b. Output tahapan kegiatan terhadap pemecahan isu adalah adanya kritik dan saran dari Kasi dan Kasubdit dalam bentuk notulensi.
- c. Keterkaitan tahapan kegiatan dengan substansi mata pelatihan: dalam meminta kritik dan saran dari pimpinan penulis selalu

menghargai setiap kritik dan saran (etika publik). Masukan yang saya terima antara lain mencakup: revisi logo Rumah Data Kependudukan dan revisi kalimat Rumah Dataku untuk digunakan secara konsisten karena merupakan nama *brand* dari Rumah Data Kependudukan.

- d. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, yaitu mengarus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan melalui pengumpulan kritik dan saran dari pihak yang kompeten untuk menyadari kekurangan *leaflet* dari awal sehingga penulis bisa menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan dan langsung memperbaiki *leaflet* sesuai masukan yang diberikan.
- e. Penguatan nilai organisasi pada tahapan kegiatan ini adalah nilai kerjasama, yakni perilaku untuk membangun jejaring dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan, percaya, sinergis, serta menghargai melalui komunikasi yang kondusif untuk mencapai tujuan bersama Kasi dan Kasubdit terkait Rancangan *Leaflet* yang telah dibuat.

#### **1.6 Melakukan perbaikan *leaflet* berdasarkan masukan dari Kasubdit**

- a. Deskripsi kegiatan : Penulis melakukan perbaikan berdasarkan masukan yang diutarakan Kasi dan Kasubdit.
- b. Output tahapan kegiatan terhadap pemecahan isu adalah tersedianya *leaflet* sesudah direvisi Kasubdit.
- c. Keterkaitan tahapan kegiatan dengan substansi mata pelatihan: Dalam melakukan perbaikan penyusunan rancangan *leaflet*, penulis menerapkan prinsip bekerja dengan sepenuh hati, bekerja tuntas (Akuntabilitas), serta senantiasa memenuhi poin-poin perbaikan sesuai standar yang telah ditetapkan Kasi dan Kasubdit (Komitmen Mutu).



- d. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, yaitu mengarus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan melalui perbaikan *leaflet* berdasarkan saran dari pimpinan.
- e. Penguatan nilai organisasi pada tahapan kegiatan ini adalah nilai tangguh, yakni perilaku memiliki semangat pantang menyerah dalam menyelesaikan *leaflet* untuk mencapai hasil maksimal.

### **1.7 Konsultasi dengan Meminta Kritik dan Saran dari Ditvokom**

- a. Deskripsi kegiatan : Penulis meminta kritik dan saran terkait *leaflet* dan mendapatkan masukan dari pegawai di Direktorat Advokasi dan Komunikasi.
- b. Output tahapan kegiatan terhadap pemecahan isu adalah adanya kritik dan saran dari pegawai di Direktorat Advokasi dan Komunikasi dalam bentuk notulensi.
- c. Keterkaitan tahapan kegiatan dengan substansi mata pelatihan: dalam meminta kritik dan saran dari pegawai di Direktorat Advokasi dan Komunikasi, penulis berupaya menghargai setiap saran dan kritik (Etika Publik) dalam meningkatkan kualitas rancangan *leaflet*. Pegawai di Direktorat Advokasi dan Komunikasi tidak memberikan saran substantif dan mengapresiasi hasil dari *leaflet* yang sudah dibuat.
- d. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, yaitu mengarus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan melalui pengumpulan kritik dan saran dari pihak yang kompeten untuk bisa menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan dan langsung memperbaiki *leaflet* sesuai masukan yang diberikan.
- e. Penguatan nilai organisasi pada tahapan kegiatan ini adalah nilai kerjasama, yakni perilaku untuk membangun jejaring dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan, percaya, sinergis, serta menghargai melalui komunikasi yang kondusif dengan

Direktorat Advokasi dan Komunikasi terkait Rancangan *Leaflet* yang telah dibuat mencapai hasil maksimal.

### **1.8 Melakukan perizinan ke Kasubdit untuk mencetak *leaflet***

- a. Deskripsi kegiatan: Penulis melakukan perizinan sebelum mencetak *leaflet* yang akan dicetak sebagai bahan ujicoba.
- b. Output tahapan kegiatan terhadap pemecahan isu adalah tersedianya izin dari Kasi dan Kasubdit dalam bentuk surat.
- c. Keterkaitan tahapan kegiatan dengan substansi mata pelatihan: Penulis mengajukan permohonan perizinan dengan melengkapi berkas-berkas administratif yang sudah diatur dalam SOP dan peraturan yang ada (etika publik) dan transparansi terkait jumlah *leaflet* yang akan dicetak (anti korupsi).
- d. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, yaitu menerapkan budaya kerja organisasi secara terstruktur dan berjenjang dalam melakukan perizinan.
- e. Penguatan nilai organisasi pada tahapan kegiatan ini adalah nilai kerjasama, yakni dengan menghargai struktural melalui komunikasi kepada pimpinan secara kondusif untuk mencapai tujuan bersama.

### **1.9 Mencetak *leaflet* untuk Uji Coba**

- a. Deskripsi kegiatan: Penulis melakukan survei sebelum mencetak *leaflet* yang akan dicetak sebagai bahan ujicoba.
- b. Output tahapan kegiatan terhadap pemecahan isu adalah tersedianya *leaflet* untuk ujicoba.
- c. Keterkaitan tahapan kegiatan dengan substansi mata pelatihan: Penulis melaporkan penggunaan dana disertai dengan bukti pembayaran yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas dan anti korupsi). Dalam melakukan pemilihan vendor percetakan, penulis memilih vendor lokal yang menggunakan bahan cetak produk dalam negeri (nasionalisme).

Penulis memilih penyedia jasa pencetakan dengan biaya yang tetap terjangkau namun tetap profesional dan berkualitas dalam melakukan pencetakan (komitmen mutu).

- d. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, yaitu menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten melalui penyusunan *leaflet* yang tetap memperhatikan akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, dan anti korupsi.
- e. Penguatan nilai organisasi pada tahapan kegiatan ini adalah nilai kerja cerdas, yakni perilaku untuk mampu bertindak optimal secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi.

**Hambatan Kegiatan:**

Tidak ada hambatan yang ditemukan dalam kegiatan ini.

**Solusi yang dilakukan:**

Tidak ada solusi yang harus dilakukan dalam kegiatan ini.

**Kegiatan 2: Membuat Form Penilaian *Leaflet***

<b>Kegiatan</b>	<b>Rincian</b>	<b>Keterangan</b>
Kegiatan 2.	Membuat form penilaian <i>leaflet</i>	Telah terlaksana
Tanggal pelaksanaan	4-8 November 2019	Terlaksana Tepat Waktu Sesuai Agenda
Dokumentasi	Lampiran Halaman	Terlampir

**Tahapan Kegiatan :**

**2.1 Inventarisasi indikator penilaian yang akan dimasukkan ke dalam form penilaian *leaflet***

- a. Deskripsi kegiatan: Penulis melakukan inventarisasi indikator berdasarkan pengalaman melakukan inventarisasi indikator pada penilaian kartu pendaftaran (K/0), yang menitikberatkan pentingnya variabel substansi dan estetika. Selanjutnya, penulis

- mengembangkan sendiri komponen penilaian *leaflet* yang akan diajukan untuk *leaflet* ini.
- b. Output tahapan kegiatan terhadap pemecahan isu adalah terinventarisasinya indikator penilaian yang akan dimasukkan ke dalam form penilaian *leaflet*.
  - c. Keterkaitan tahapan kegiatan dengan substansi mata pelatihan: terdapat upaya menampung opini, harapan dan ekspektasi pengelola rumah data kependudukan terhadap *leaflet* (Komitmen Mutu).
  - d. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, yaitu yaitu menerapkan budaya kerja organisasi melalui inventarisasi indikator form penilaian *leaflet* sebagai upaya perbaikan mutu secara berkelanjutan agar *leaflet* dapat mudah dipahami dan dilaksanakan oleh Pengurus Rumah Data Kependudukan.
  - e. Penguatan nilai organisasi pada tahapan kegiatan ini adalah nilai tangguh adalah perilaku memiliki semangat pantang menyerah untuk mencapai tujuan, yaitu demi tersedianya *leaflet* yang mudah dipahami oleh pengelola rumah data kependudukan.

## **2.2 Mengkonsultasikan form indikator dengan Kasubdit**

- a. Deskripsi kegiatan : Penulis meminta kritik dan saran terkait form indikator penilaian *leaflet*. Penulis tidak mendapatkan masukan yang bersifat substantif.
- b. Output tahapan kegiatan terhadap pemecahan isu adalah masukan dalam bentuk notulensi.
- c. Keterkaitan tahapan kegiatan dengan substansi mata pelatihan: dalam meminta kritik dan saran dari pimpinan, penulis selalu menghargai setiap kritik dan saran (etika publik). Masukan yang saya terima antara lain mencakup: layout kuesioner atau form penilaian agar lebih sederhana.

- d. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, yaitu mengarus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan melalui pengumpulan kritik dan saran dari pihak yang langsung mengurus atau mengelola rumah data kependudukan sehingga dapat langsung memperbaikinya dan menunjukkan bahwa masih ada beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan.
- e. Penguatan nilai organisasi pada tahapan kegiatan ini adalah nilai kerjasama, yakni perilaku untuk membangun jejaring dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan, percaya, sinergis, serta menghargai melalui komunikasi yang kondusif untuk mencapai tujuan bersama dengan pihak yang berpengalaman dalam membuat survei.

### **2.3 Membuat form**

- a. Deskripsi kegiatan : Penulis melakukan perbaikan form penilaian *leaflet* berdasarkan masukan yang diutarakan Kasi dan Kasubdit.
- b. Output tahapan kegiatan terhadap pemecahan isu adalah tersedianya form penilaian *leaflet* sesudah direvisi Kasubdit.
- c. Keterkaitan tahapan kegiatan dengan substansi mata pelatihan: Dalam melakukan perbaikan form penilaian *leaflet*, penulis menerapkan prinsip bekerja dengan sepenuh hati, bekerja tuntas (Akuntabilitas), serta senantiasa memenuhi poin-poin perbaikan sesuai standar yang telah ditetapkan Kasubdit (Komitmen Mutu).
- d. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, yaitu mengarus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan melalui perbaikan form penilaian *leaflet* berdasarkan saran dari pimpinan.
- e. Penguatan nilai organisasi pada tahapan kegiatan ini adalah nilai tangguh, yakni perilaku memiliki semangat pantang menyerah untuk mencapai tujuan.

#### **2.4 Melakukan perizinan ke Kasubdit untuk mencetak form penilaian leaflet**

- a. Deskripsi kegiatan: Penulis melakukan perizinan sebelum mencetak form penilaian *leaflet* yang akan dicetak sebagai bahan ujicoba.
- b. Output tahapan kegiatan terhadap pemecahan isu adalah tersedianya izin dari Kasi dan Kasubdit dalam bentuk surat.
- c. Keterkaitan tahapan kegiatan dengan substansi mata pelatihan: Penulis mengajukan permohonan perizinan dengan melengkapi berkas-berkas administratif yang sudah diatur dalam SOP dan peraturan yang ada (etika publik) dan transparansi terkait jumlah form penilaian *leaflet* yang akan dicetak (anti korupsi).
- d. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, yaitu menerapkan budaya kerja organisasi secara terstruktur dan berjenjang dalam melakukan perizinan.
- e. Penguatan nilai organisasi pada tahapan kegiatan ini adalah nilai kerjasama, yakni dengan menghargai struktural melalui komunikasi kepada pimpinan secara kondusif.

#### **2.5 Mencetak form penilaian leaflet**

- a. Deskripsi kegiatan: Penulis melakukan survei sebelum mencetak form penilaian *leaflet* yang akan dicetak sebagai bahan ujicoba.
- b. Output tahapan kegiatan terhadap pemecahan isu adalah tercetaknya form penilaian *leaflet* untuk ujicoba.
- c. Keterkaitan tahapan kegiatan dengan substansi mata pelatihan: Penulis melaporkan penggunaan dana disertai dengan bukti pembayaran yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas dan anti korupsi). Dalam melakukan pemilihan vendor percetakan, penulis memilih vendor lokal yang menggunakan bahan cetak produk dalam negeri (nasionalisme). Penulis memilih penyedia jasa percetakan dengan biaya yang tetap terjangkau namun tetap profesional dan berkualitas dalam melakukan percetakan (komitmen mutu).

- d. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, yaitu menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten melalui penyusunan *leaflet* yang tetap memperhatikan akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, dan anti korupsi.
- e. Penguatan nilai organisasi pada tahapan kegiatan ini adalah nilai kerja cerdas, yakni perilaku untuk mampu bertindak optimal secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi.

**Hambatan Kegiatan:**

Tidak ada hambatan yang ditemukan dalam kegiatan ini.

**Solusi yang dilakukan:**

Tidak ada solusi yang harus dilakukan dalam kegiatan ini.

**Kegiatan 3: Melakukan Uji Coba *Leaflet***

<b>Kegiatan</b>	<b>Rincian</b>	<b>Keterangan</b>
Kegiatan 3.	Melakukan ujicoba <i>leaflet</i>	Telah terlaksana
Tanggal pelaksanaan	4-15 November 2019	Terlaksana Tepat Waktu Sesuai Agenda
Dokumentasi	Lampiran Halaman	Terlampir

**Tahapan Kegiatan :**

**3.1 Mengkonsultasikan lokus ujicoba dengan Kasubdit**

- a. Deskripsi kegiatan : Penulis meminta masukan terkait lokus Kampung KB yang pengelola rumah datanya akan menjadi penilai *leaflet*. Penulis mendapatkan masukan untuk melakukan ujicoba bersama 1) OPD Provinsi agar dalam kaitannya dengan skema pelaporan dapat ter-*sounding* dan dikoreksi langsung oleh pihak yang mempunyai wewenang dalam jalur koordinasi pada skema pelaporan rumah data kependudukan; 2) pengelola rumah data kependudukan di lapangan karena dianggap paling mengetahui kondisi *real* di rumah data kependudukan. Untuk ujicoba bersama

OPD, penulis melakukan disarankan untuk mengikuti penugasan bersama Direktur Analisis Dampak Kependudukan di Makasar dalam acara Uji Publik NSPK terkait Sinkronisasi dan Pemaduan Kebijakan Pengendalian Kebijakan Kuantitas Kependudukan karena di dalam acara tersebut juga akan di *sounding* tentang Urgensi Pendataan Kelompok Kegiatan Rumah Data Kependudukan. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Analisis Dampak Kependudukan membuka diskusi terkait materi mekanisme operasional pelaporan rumah data kependudukan yang telah penulis inventarisir dan akan menjadi bahan diskusi beliau sehingga penulis dapat melakukan notulensi dari bahan diskusi tersebut. Untuk ujicoba bersama pengelola rumah data kependudukan, Penulis mendapatkan masukan untuk melakukan ujicoba di Kampung KB Teratai di Kelurahan Curug, Kota Depok sebagai Kampung KB yang masih dalam klasifikasi belum memenuhi standard.

- b. Output tahapan kegiatan terhadap pemecahan isu adalah terpilihnya lokus ujicoba leaflet.
- c. Keterkaitan tahapan kegiatan dengan substansi mata pelatihan: dalam meminta masukan dari kasubdit penulis selalu menghargai masukan (etika publik).
- d. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, yaitu menerapkan budaya kerja organisasi secara komunikatif dan kondusif dalam mengkonsultasikan lokus ujicoba kepada atasan.
- e. Penguatan nilai organisasi pada tahapan kegiatan ini adalah nilai kerjasama, yakni perilaku untuk membangun jejaring dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan, percaya, sinergis, serta menghargai melalui komunikasi yang kondusif untuk mencapai tujuan bersama dengan pihak yang dapat merekomendasikan dan membuka akses untuk dilaksanakannya uji coba leaflet pelaporan rumah data kependudukan.



### **3.2 Membuat surat tugas untuk ujicoba leaflet**

- a. Deskripsi kegiatan : Penulis membuat surat tugas untuk melakukan ujicoba bersama 1) OPD Provinsi Makasar dengan cara insert dalam kegiatan Provinsi; 2) pengelola rumah data kependudukan di Kampung KB Teratai di Kelurahan Curug, Kota Depok.
- b. Output tahapan kegiatan terhadap pemecahan isu adalah tersedianya surat tugas untuk melakukan ujicoba *leaflet*.
- c. Keterkaitan tahapan kegiatan dengan substansi mata pelatihan: Penulis mengajukan permohonan perizinan dengan melengkapi berkas-berkas administratif yang sudah diatur dalam SOP dan peraturan yang ada (etika publik).
- d. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, yaitu menerapkan budaya kerja organisasi dengan tertib administrasi sebelum turun lapangan dalam rangka melakukan ujicoba berdasarkan saran dari pimpinan.
- e. Penguatan nilai organisasi pada tahapan kegiatan ini adalah nilai tangguh, yakni perilaku memiliki semangat pantang menyerah untuk mencapai tujuan dan integritas dengan berbuat jujur dan terbuka dalam hal melengkapi administrasi.

### **3.3 Melakukan Diskusi Skema Pelaporan bersama OPD Provinsi dan Ujicoba ke Rumah Data Kependudukan di kampung KB**

- a. Deskripsi kegiatan : Penulis melakukan ujicoba bersama 1) OPD Provinsi Makasar dengan cara insert dalam kegiatan Provinsi; 2) pengelola rumah data kependudukan di Kampung KB Teratai di Kelurahan Curug, Kota Depok sesuai usulan dari Kasubdit.
- b. Output tahapan kegiatan terhadap pemecahan isu adalah dilaksanakannya ujicoba *leaflet*.
- c. Keterkaitan tahapan kegiatan dengan substansi mata pelatihan: Penulis tidak membeda-bedakan pengelola rumah data kependudukan yang disasar (Nasionalisme) untuk menerima

ujicoba karena responden terpilih berdasarkan arahan dari salah satu PKB yang bertugas di kampung KB Teratai Kelurahan Curug, Kota Depok. Dalam prosesnya, Penulis menjelaskan maksud dan tujuan dari ujicoba *leaflet* kepada pengguna layanan dengan baik, sabar, ramah, sopan santun dan jelas (Etika Publik).

- d. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, yaitu mengarusutamakan pembangunan berwawasan Kependudukan melalui ujicoba *leaflet*.
- e. Penguatan nilai organisasi pada tahapan kegiatan ini adalah cerdas, yaitu mampu bertindak optimal secara efektif dan efisien dalam melakukan ujicoba *leaflet*; tangguh, yaitu memiliki semangat pantang menyerah untuk mencapai tujuan mendapatkan hasil *leaflet* yang dapat dipahami oleh pengelola rumah data kependudukan melalui kegiatan ujicoba; kerjasama, yaitu membangun jejaring dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan, percaya, sinergis, serta menghargai melalui komunikasi yang kondusif bersama pengelola rumah data kependudukan di kampung KB yang dijadikan responden ujicoba; integritas, yaitu berbuat jujur, terbuka, dan konsisten dalam melakukan ujicoba; ikhlas, yaitu melaksanakan ujicoba dengan tulus dan sungguh-sungguh.

### **3.4 Mengumpulkan form masukan *leaflet* dari pengelola rumah data.**

- a. Deskripsi kegiatan: Form masukan *leaflet* ini hanya dimintakan kepada pengelola rumah data kependudukan di lapangan sebagai pengguna layanan *leaflet* ini dan tidak dilakukan saat ujicoba bersama OPD Provinsi. Setelah pengelola rumah data selesai mendapatkan pengarahan tentang skema pelaporan rumah data kependudukan, penulis meminta kritik dan saran dari responden ujicoba.

- b. Output tahapan kegiatan terhadap pemecahan isu adalah terkumpulnya form masukan/penilaian *leaflet*.
- c. Keterkaitan tahapan kegiatan dengan substansi mata pelatihan: Setelah pengelola rumah data selesai mendapatkan pengarahan tentang skema pelaporan rumah data kependudukan, penulis meminta kritik dan saran terkait kejelasan dan kemudahan dalam memahami isi *leaflet* dengan ramah dan menerima dan menghargai segala kritik dan saran dari responden (Etika Publik) dan tidak mengarahkan atau menggiring opini yang tidak objektif (Anti-Korupsi), serta mengeksplorasi semua harapan dan ekspektasi responden (Komitmen Mutu) sebagai upaya perbaikan mutu. Selanjutnya, penilaian/ masukan dari responden penulis tampung dan laporkan kepada Pimpinan.
- d. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, yaitu mengarusutamakan pembangunan berwawasan Kependudukan melalui upaya menyempurnakan *leaflet* berdasarkan saran dari responden.
- e. Penguatan nilai organisasi pada tahapan kegiatan ini adalah cerdas, yaitu mampu bertindak optimal secara efektif dan efisien dalam melakukan pengumpulan masukan dari responden terkait *leaflet*; tangguh, yaitu memiliki semangat pantang menyerah untuk mencapai tujuan mendapatkan hasil *leaflet* yang dapat dipahami oleh pengelola rumah data kependudukan melalui kegiatan pengumpulan masukan dalam rangka penyempurnaan *leaflet* melalui ujicoba; kerjasama, yaitu membangun jejaring dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan, percaya, sinergis, serta menghargai melalui komunikasi yang kondusif bersama pengelola rumah data kependudukan di kampung KB yang dijadikan responden ujicoba; integritas, yaitu berbuat jujur, terbuka, dan konsisten dalam mengumpulkan masukan dari responden; ikhlas, yaitu melaksanakan pengumpulan masukan dan penilaian *leaflet* dengan tulus dan sungguh-sungguh.

### **3.5 Menginventarisasi masukan dari OPD Provinsi dan pengelola rumah data untuk perbaikan leaflet**

a. Deskripsi kegiatan: Setelah pelaksanaan kegiatan uji coba di atas, Penulis membuat rangkuman masukan dari OPD Provinsi dan pengelola rumah data, apakah ada perbaikan dalam leaflet yang telah dibuat, baik dalam hal substansi maupun estetikanya. Pelaksanaan evaluasi juga dilakukan dengan memeriksa form penilaian. Hasil dari inventarisasi masukan OPD Provinsi dan Pengelola Rumah Data Kependudukan penulis bagi menjadi dua karena masukan dari pihak OPD Provinsi lebih bersifat substantif terkait mekanisme operasional pelaporan rumah data kependudukan, sedangkan masukan dari pihak pengelola rumah data cenderung bersifat substantif..

Berikut merupakan masukan dari OPD Provinsi:

- Skema dari pusat langsung ke BKKBN perwakilan, OPD provinsi dilewatkan padahal seharusnya tidak boleh demikian. OPD Provinsi lah yang menginformasikannya ke BKKBN perwakilan. Hal ini melanggar UU 23 tahun 2014 karena yang wajib melaporkan ke BKKBN Pusat adalah OPD Provinsi bukan kab/kota.

Berikut merupakan masukan dari Pengelola Rumah Data:

- Secara estetika leaflet sudah dapat dipahami, namun secara garis/jalur otoritas yang berwenang dalam melakukan koordinasi perlu masukan dari pihak yang ahli karena pengelola di lapangan akan menginduk skema yang telah dibuat.
- Kepengurusan rumah data tidak menjadi satu dengan kepengurusan kampung KB agar tidak ada dua kepemimpinan di dalam satu lokasi.
- Jika nantinya pendataan ini akan berujung pada dilakukannya klasifikasi, maka perlu dilakukan sosialisasi

yang mendalam kepada masyarakat dan petugas, khususnya PKB.

- b. Output tahapan kegiatan terhadap pemecahan isu adalah terinventarisasinya masukan tentang pelaksanaan pelaporan Rumah Data Kependudukan untuk perbaikan *leaflet*.
- c. Keterkaitan tahapan kegiatan dengan substansi mata pelatihan: 1) bekerja dengan cepat dan lengkap (akuntabilitas); 2) menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar (nasionalisme); 3) transparan (anti korupsi).
- d. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, yaitu mengarusutamakan pembangunan berwawasan Kependudukan melalui inventarisasi masukan tentang Skema Tata Cara Pelaporan Kelompok Kegiatan Rumah Data Kependudukan.
- e. Penguatan nilai organisasi pada tahapan kegiatan ini adalah nilai kerja cerdas, yakni perilaku untuk mampu bertindak optimal secara efektif dan efisien dalam menginventarisasi masukan tentang Skema Tata Cara Pelaporan Kelompok Kegiatan Rumah Data Kependudukan.

**Hambatan Kegiatan:**

Penulis cukup kesulitan dengan persiapan administrasi dan permohonan fasilitasi kepada pihak provinsi.

**Solusi yang dilakukan:**

Tertib administrasi dan persiapan administrasi yang baik.

#### **Kegiatan 4: Melakukan Perbaikan Leaflet atas Masukan dari Ujicoba dengan Pengelola Rumah Data**

<b>Kegiatan</b>	<b>Rincian</b>	<b>Keterangan</b>
Kegiatan 4.	Melakukan perbaikan <i>leaflet</i>	Telah terlaksana
Tanggal pelaksanaan	11-15 November 2019	Terlaksana Tepat Waktu Sesuai Agenda
Dokumentasi	Lampiran Halaman	Terlampir

#### **Tahapan Kegiatan:**

##### **4.1 Mengkonsultasikan hasil ujicoba dengan Kasubdit**

- a. Deskripsi kegiatan : Penulis melakukan konsultasi terkait hasil ujicoba dan penilaian *leaflet*. Penulis mendapatkan masukan yang bersifat substantif terkait anggapan bahwa skema dari pusat langsung ke BKKBN perwakilan, terkesan melewatkan kewenangan OPD provinsi maka di dalam leaflet ditambahkan keterangan tambahan bahwa pada kondisi dimana Provinsi tidak memiliki OPD Provinsi, kewenangan dilaksanakan sementara oleh Perwakilan BKKBN Provinsi sampai dibentuknya OPD tingkat provinsi
- b) Output tahapan kegiatan terhadap pemecahan isu adalah hasil konsultasi dalam bentuk notulensi.
- c) Keterkaitan tahapan kegiatan dengan substansi mata pelatihan: Penulis telah bersikap responsif (akuntabilitas) atas segala masukan yang ada dengan memasukkan komponen penilaian yang diinginkan oleh pengelola rumah data (Komitmen Mutu). Tidak ada penambahan komponen yang diminta oleh pengelola rumah data kependudukan. Tidak ada penambahan yang perlu ditambahkan dalam bagian esai singkat terkait saran-saran.
- d) Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, yaitu mengarus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan melalui hasil konsultasi dengan pimpinan sehingga penulis dapat langsung memperbaiki leaflet.

- e) Penguatan nilai organisasi pada tahapan kegiatan ini adalah nilai kerjasama, yakni perilaku untuk membangun jejaring dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan, percaya, sinergis, serta menghargai melalui komunikasi yang kondusif untuk mencapai tujuan bersama dengan pihak yang berpengalaman dalam membuat survei.

#### 4.2 Melakukan revisi *leaflet* rumah dataku

- a. Deskripsi kegiatan : Penulis melakukan revisi berdasarkan masukan saat ujicoba.
- b. Output tahapan kegiatan terhadap pemecahan isu adalah tersedianya *leaflet* sesudah direvisi berdasarkan masukan pengelola rumah data kependudukan saat ujicoba.
- c. Keterkaitan tahapan kegiatan dengan substansi mata pelatihan: Dalam melakukan perbaikan *leaflet* berdasarkan masukan pengelola rumah data kependudukan saat ujicoba, penulis menerapkan prinsip bekerja dengan sepenuh hati, bekerja tuntas (Akuntabilitas), serta senantiasa memenuhi poin-poin perbaikan sesuai masukan pengelola rumah data kependudukan saat ujicoba (Komitmen Mutu). Penulis juga memperhatikan timeline waktu finalisasi dengan bekerja keras agar tepat waktu dalam pengerjaan (Anti Korupsi). *Leaflet* final akhirnya dapat selesai tepat waktu sebelum dipresentasikan kepada Kasubdit.
- d. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, yaitu mengarus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan melalui perbaikan *leaflet* sesuai masukan pengelola rumah data kependudukan saat ujicoba.
- e. Penguatan nilai organisasi pada tahapan kegiatan ini adalah nilai tangguh, yakni perilaku memiliki semangat pantang menyerah dalam menyelesaikan *leaflet* untuk mencapai hasil maksimal.

**Hambatan Kegiatan:**

Kesibukan internal direktorat di akhir tahun.

**Solusi yang dilakukan:**

Disiplin dalam timeline kegiatan per hari yang sudah dibuat.

**Kegiatan 5: Melakukan Sosialisasi Leaflet Rumah Data Kependudukan**

Kegiatan	Rincian	Keterangan
Kegiatan 5.	Melakukan sosialisasi	Telah terlaksana
Tanggal pelaksanaan	17-22 November 2019	Terlaksana Tepat Waktu Sesuai Agenda
Dokumentasi	Lampiran Halaman	Terlampir

**Tahapan Kegiatan :**

**5.1 Mengkonsultasikan lokus ujicoba dengan Kasubdit**

- a. Deskripsi kegiatan : Penulis mendapatkan masukan untuk melakukan ujicoba di Kelurahan Curug, Kota Depok. Penulis melakukan sosialisasi dengan *insert* ke kegiatan pelatihan pemantauan demografi dan kesehatan yang diadakan di balai penyuluhan di balai penyuluhan kantor Kelurahan Curug juga mengundang PKB dan pengelola rumah data kependudukan di Kampung KB sekitar Kelurahan Curug.
- b. Output tahapan kegiatan terhadap pemecahan isu adalah dilakukannya konsultasi dengan atasan terkait apa saja materi yang disampaikan dan apa saja yang harus dipersiapkan sebelum sosialisasi *leaflet*.
- c. Keterkaitan tahapan kegiatan dengan substansi mata pelatihan: dalam meminta masukan dari kasubdit penulis selalu menghargai masukan (etika publik).
- d. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, yaitu menerapkan budaya kerja organisasi secara komunikatif dan kondusif dalam mengkonsultasikan lokus ujicoba kepada atasan.



- e. Penguatan nilai organisasi pada tahapan kegiatan ini adalah nilai kerjasama, yakni perilaku untuk membangun jejaring dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan, percaya, sinergis, serta menghargai melalui komunikasi yang kondusif untuk mencapai tujuan bersama dengan pihak yang dapat merekomendasikan dan membuka akses untuk dilaksanakannya uji coba leaflet pelaporan rumah data kependudukan.

## **5.2 Membuat surat tugas untuk ujicoba leaflet**

- a. Deskripsi kegiatan : Penulis membuat surat tugas untuk melakukan sosialisasi di rumah data kependudukan di balai penyuluhan kantor Kelurahan Curug yang diusulkan oleh Kasubdit.
- b. Output tahapan kegiatan terhadap pemecahan isu adalah tersedianya surat tugas untuk melakukan sosialisasi *leaflet*.
- c. Keterkaitan tahapan kegiatan dengan substansi mata pelatihan: Penulis mengajukan permohonan perizinan dengan melengkapi berkas-berkas administratif yang sudah diatur dalam SOP dan peraturan yang ada (etika publik).
- d. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, yaitu menerapkan budaya kerja organisasi dengan tertib administrasi sebelum turun lapangan dalam rangka melakukan sosialisasi.
- e. Penguatan nilai organisasi pada tahapan kegiatan ini adalah nilai tangguh, yakni perilaku memiliki semangat pantang menyerah untuk mencapai tujuan dan integritas dengan berbuat jujur dan terbuka dalam hal melengkapi administrasi.

## **5.3 Membuat Surat Perizinan ke Kampung KB**

- a. Deskripsi kegiatan : Penulis membuat surat perizinan untuk melakukan sosialisasi di rumah data kependudukan di balai penyuluhan kantor Kelurahan Curug yang diusulkan oleh Kasubdit.

- b. Output tahapan kegiatan terhadap pemecahan isu adalah tersedianya surat perizinan untuk melakukan sosialisasi *leaflet*.
- c. Keterkaitan tahapan kegiatan dengan substansi mata pelatihan: Penulis mengajukan permohonan perizinan dengan melengkapi berkas-berkas administratif yang sudah diatur dalam SOP dan peraturan yang ada (etika publik).
- d. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, yaitu menerapkan budaya kerja organisasi dengan tertib administrasi sebelum turun lapangan dalam rangka melakukan sosialisasi.
- e. Penguatan nilai organisasi pada tahapan kegiatan ini adalah nilai tangguh, yakni perilaku memiliki semangat pantang menyerah untuk mencapai tujuan dan integritas dengan berbuat jujur dan terbuka dalam hal melengkapi administrasi.

#### **5.4 Follow Up**

- a. Deskripsi kegiatan: Penulis melakukan *follow up* sebelum turun lapangan melakukan sosialisasi *leaflet* .
- b. Output tahapan kegiatan terhadap pemecahan isu adalah dilakukannya *follow up* dan tersedianya izin dari Kabid KB di Depok.
- c. Keterkaitan tahapan kegiatan dengan substansi mata pelatihan: Penulis *follow up* dan tersedianya izin dari Kabid KB di Depok dengan baik, sabar, ramah, sopan santun dan jelas (etika publik).
- d. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, yaitu menerapkan budaya kerja organisasi secara terstruktur dan berjenjang dalam melakukan perizinan.
- e. Penguatan nilai organisasi pada tahapan kegiatan ini adalah nilai kerjasama, yakni dengan menghargai struktural melalui komunikasi kepada pihak yang berwenang secara kondusif.

## 5.5 Melakukan Sosialisasi

- a. Deskripsi kegiatan : Penulis melakukan sosialisasi di Balai Penyuluhan di kantor Kelurahan Curug, Kota Depok sesuai usulan dari Kasubdit. Penulis melakukan ujicoba dengan *insert* ke kegiatan pelatihan pemantauan demografi dan kesehatan yang diadakan di balai penyuluhan di kantor Kelurahan Curug juga mengundang PKB dan pengelola rumah data kependudukan di Kampung KB sekitar Kelurahan Curug.
- b. Output tahapan kegiatan terhadap pemecahan isu adalah dilaksanakannya sosialisasi *leaflet*.
- c. Keterkaitan tahapan kegiatan dengan substansi mata pelatihan: Penulis tidak membeda-bedakan pengelola rumah data kependudukan yang disasar (Nasionalisme) untuk menerima sosialisasi. Dalam prosesnya, Penulis menjelaskan maksud dan tujuan dari sosialisasi *leaflet* kepada pengelola dengan baik, sabar, ramah, sopan santun dan jelas dan melaporkan hasil ujicoba dan respons pengelola rumah data kependudukan di Kampung KB Teratai kepada audiens yang datang saat sosialisasi dengan jujur (Akuntabilitas) serta menerima dengan baik masukan akhir audiens (Etika Publik) jika masih dibutuhkan perbaikan dan penyempurnaan.
- d. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, yaitu mengarus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan melalui sosialisasi *leaflet*.
- e. Penguatan nilai organisasi pada tahapan kegiatan ini adalah cerdas, yaitu mampu bertindak optimal secara efektif dan efisien dalam melakukan sosialisasi *leaflet*; tangguh, yaitu memiliki semangat pantang menyerah untuk mencapai tujuan mendapatkan hasil *leaflet* yang dapat dipahami oleh pengelola rumah data kependudukan melalui kegiatan sosialisasi; kerjasama, yaitu membangun jejaring dengan prinsip kesetaraan

dan saling menguntungkan, percaya, sinergis, serta menghargai melalui komunikasi yang kondusif bersama pengelola rumah data kependudukan di Kelurahan Curug Kota Depok; integritas, yaitu berbuat jujur, terbuka, dan konsisten dalam melakukan ujicoba; ikhlas, yaitu melaksanakan ujicoba dengan tulus dan sungguh-sungguh.

**Hambatan Kegiatan:**

Kesibukan internal direktorat di akhir tahun.

**Solusi yang dilakukan:**

Disiplin dalam timeline kegiatan per hari yang sudah dibuat dan mengerjakan kegiatan di sela-sela waktu.

**Kegiatan 6: Melakukan monitoring pemanfaatan leaflet**

<b>Kegiatan</b>	<b>Rincian</b>	<b>Keterangan</b>
Kegiatan 6.	Melakukan monitoring	Telah terlaksana
Tanggal pelaksanaan	23-29 November 2019	Terlaksana Tepat Waktu Sesuai Agenda
Dokumentasi	Lampiran Halaman	Terlampir

**Tahapan Kegiatan :**

**6.1 Berkonsultasi dengan atasan**

- a. Deskripsi kegiatan : Penulis mendapatkan izin untuk melakukan monitoring di Kelurahan Curug, Kota Depok di sela-sela kesibukan internal di akhir tahun.
- b. Output tahapan kegiatan terhadap pemecahan isu adalah dilakukannya konsultasi dengan atasan terkait proses yang harus dilakukan untuk mengetahui hasil pemanfaatan di lapangan.
- c. Keterkaitan tahapan kegiatan dengan substansi mata pelatihan: dalam meminta masukan dari kasubdit penulis selalu menghargai masukan (etika publik).

- d. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, yaitu menerapkan budaya kerja organisasi secara komunikatif dan kondusif dalam kepada atasan.
- e. Penguatan nilai organisasi pada tahapan kegiatan ini adalah nilai kerjasama, yakni perilaku untuk membangun jejaring dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan, percaya, sinergis, serta menghargai melalui komunikasi yang kondusif untuk mencapai tujuan bersama pimpinan.

### **6.2 Membuat surat tugas untuk monitoring *leaflet***

- a. Deskripsi kegiatan : Penulis membuat surat tugas untuk melakukan monitoring di rumah data kependudukan.
- b. Output tahapan kegiatan terhadap pemecahan isu adalah tersedianya surat tugas untuk melakukan monitoring *leaflet*.
- c. Keterkaitan tahapan kegiatan dengan substansi mata pelatihan: Penulis mengajukan permohonan perizinan dengan melengkapi berkas-berkas administratif yang sudah diatur dalam SOP dan peraturan yang ada (etika publik).
- d. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, yaitu menerapkan budaya kerja organisasi dengan tertib administrasi sebelum turun lapangan dalam rangka melakukan monitoring.
- e. Penguatan nilai organisasi pada tahapan kegiatan ini adalah nilai tangguh, yakni perilaku memiliki semangat pantang menyerah untuk mencapai tujuan dan integritas dengan berbuat jujur dan terbuka dalam hal melengkapi administrasi.

### **6.3 Membuat Surat Perizinan ke Kampung KB**

- a. Deskripsi kegiatan : Penulis membuat surat perizinan untuk melakukan monitoring.
- b. Output tahapan kegiatan terhadap pemecahan isu adalah tersedianya surat perizinan untuk melakukan monitoring *leaflet*.

- c. Keterkaitan tahapan kegiatan dengan substansi mata pelatihan: Penulis mengajukan permohonan perizinan dengan melengkapi berkas-berkas administratif yang sudah diatur dalam SOP dan peraturan yang ada (etika publik).
- d. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, yaitu menerapkan budaya kerja organisasi dengan tertib administrasi sebelum turun lapangan dalam rangka melakukan monitoring.
- e. Penguatan nilai organisasi pada tahapan kegiatan ini adalah nilai tangguh, yakni perilaku memiliki semangat pantang menyerah untuk mencapai tujuan dan integritas dengan berbuat jujur dan terbuka dalam hal melengkapi administrasi.

#### **6.4 Follow Up**

- a. Deskripsi kegiatan: Penulis melakukan *follow up* sebelum turun lapangan melakukan monitoring *leaflet*.
- b. Output tahapan kegiatan terhadap pemecahan isu adalah dilakukannya *follow up* dan tersedianya izin dari Kabid KB di Depok.
- c. Keterkaitan tahapan kegiatan dengan substansi mata pelatihan: Penulis *follow up* dan tersedianya izin dari Kabid KB di Depok dengan baik, sabar, ramah, sopan santun dan jelas (etika publik).
- d. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, yaitu menerapkan budaya kerja organisasi secara terstruktur dan berjenjang dalam melakukan perizinan.
- e. Penguatan nilai organisasi pada tahapan kegiatan ini adalah nilai kerjasama, yakni dengan menghargai struktural melalui komunikasi kepada pihak yang berwenang secara kondusif.

#### **6.5 Melakukan Monitoring**

- a. Deskripsi kegiatan : Penulis melakukan monitoring di kampung KB di kantor Kelurahan Curug, Kota Depok sesuai usulan dari Kasubdit. Dalam kegiatan ini, penulis melakukan kunjungan ke

Balai Penyuluhan di Kelurahan Curug untuk memasang leaflet di Balai Penyuluhan, Kampung KB Melati dan Kampung KB Teratai.

- b. Output tahapan kegiatan terhadap pemecahan isu adalah dilaksanakannya monitoring *leaflet*.
- c. Keterkaitan tahapan kegiatan dengan substansi mata pelatihan: Dalam prosesnya, Penulis memberikan kuesioner pemanfaatan leaflet kepada PKB dengan baik, sabar, ramah, sopan santun dan jelas dan melaporkan hasil monitoring dan respons PKB dengan jujur (Akuntabilitas).
- d. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, yaitu mengarus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan melalui monitoring *leaflet*.
- e. Penguatan nilai organisasi pada tahapan kegiatan ini adalah cerdas, yaitu mampu bertindak optimal secara efektif dan efisien dalam melakukan monitoring *leaflet*; tangguh, yaitu memiliki semangat pantang menyerah untuk mencapai tujuan mendapatkan hasil pemanfaatan *leaflet* kegiatan monitoring; kerjasama, yaitu membangun jejaring dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan, percaya, sinergis, serta menghargai melalui komunikasi yang kondusif bersama PKB di Kelurahan Curug Kota Depok; integritas, yaitu berbuat jujur, terbuka, dan konsisten dalam melakukan monitoring; ikhlas, yaitu melaksanakan monitoring dengan tulus dan sungguh-sungguh.

#### **6.6 Diseminasi leaflet melalui CIS BKKBN**

- a. Deskripsi kegiatan : Penulis melakukan diseminasi leaflet dengan mengupload materi *leaflet* ke website CIS BKKBN.
- b. Output tahapan kegiatan terhadap pemecahan isu adalah dilaksanakannya diseminasi *leaflet* dalam forum yang nasional.
- c. Keterkaitan tahapan kegiatan dengan substansi mata pelatihan: Dalam prosesnya, Penulis mengupload materi *leaflet* ke website

CIS BKKBN dan melaporkan hasil monitoring dan respons audiense dengan jujur (Akuntabilitas).

- d. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, yaitu mengarus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan melalui diseminasi *leaflet*.
- e. Penguatan nilai organisasi pada tahapan kegiatan ini adalah cerdas, yaitu mampu bertindak optimal secara efektif dan efisien dalam melakukan diseminasi *leaflet*; tangguh, yaitu memiliki semangat pantang menyerah untuk mencapai tujuan mendapatkan hasil pemanfaatan *leaflet* kegiatan diseminasi; kerjasama, yaitu membangun jejaring dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan, percaya, sinergis, serta menghargai melalui komunikasi yang kondusif bersama pengelola website CIS BKKBN dilingkungan Direktorat Analisis Dampak Kependudukan; integritas, yaitu berbuat jujur, terbuka, dan konsisten dalam melakukan diseminasi; ikhlas, yaitu melaksanakan diseminasi dengan tulus dan sungguh-sungguh.

**Hambatan Kegiatan:**

Tidak ada hambatan yang ditemukan dalam kegiatan ini.

**Solusi yang dilakukan:**

Tidak ada solusi yang harus dilakukan dalam kegiatan ini.

**B. Analisa Dampak Jika Isu Tidak Dilaksanakan**

Berdasarkan analisa dampak yang dilakukan, kegiatan ini memberikan beberapa dampak positif bagi Direktorat Analisis Dampak Kependudukan Kantor BKKBN Pusat yang mana berkaitan dengan pemecahan isu yang diangkat oleh Penulis. Dampak positif tersebut di antaranya adalah:

1. Akuntabilitas
  - Perbaiki dalam hal penyampaian skema pelaporan kegiatan kepada pengelola rumah data kependudukan karena memilih *leaflet* sebagai



media yang dipilih karena Penulis menganggap media tersebut cukup efektif dan efisien. Efektif karena jika *leaflet* tersebut disediakan akan mudah dibawa kemanapun oleh pengelola dan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan Rumah Data Kependudukan, terlebih jika disediakan dalam bentuk *softcopy* untuk disimpan dalam ponsel. Informasi yang jelas dan lengkap pada *leaflet* diharapkan dapat mempermudah dalam pelaporan rumah data kependudukan. Efisien karena pembuatannya relatif mudah dan murah. Waktu yang dibutuhkan untuk mendapat informasi di dalamnya juga cepat.

- Perbaiki dalam hal kejelasan runutan skema pelaporan dan pembagian wewenang di setiap otoritas karena adanya uji coba mekanisme operasionalisasi di tingkat OPD Dalduk dan KB, PKB, dan pengelola rumah data kependudukan yang dilaksanakan di beberapa lokasi.

## 2. Nasionalisme

Perbaiki dalam hal penyampaian skema pelaporan Rumah Data Kependudukan ditujukan untuk kepentingan bersama, terutama Pengurus, PLKB, OPD, Perwakilan BKKBN Provinsi sebagai stakeholder Rumah Dataku.

## 3. Etika publik

Ketaatan dalam pelaksanaan pelaporan Rumah Data Kependudukan sesuai dengan skema yang sudah diujicobakan dan disosialisasikan.

## 4. Komitmen mutu

- Media komunikasi berupa *leaflet* Rumah Data Kependudukan dapat membantu pelaksanaan kegiatan skema pelaporan Rumah Data Kependudukan menjadi lebih efektif dan efisien.
- *Leaflet* ini dapat membantu stakeholder dalam memahami panjangnya rantai koordinasi yang dapat melemahkan pengawasan langsung dari pemilik kewenangan tertinggi di pusat hingga pelaksanaan program di tingkat desa.
- Dengan adanya *leaflet* ini, model pengelolaan rumah data kependudukan yang melibatkan begitu banyak *stakeholder* berimplikasi

pada proses evaluasi yang semakin kompleks untuk mampu melihat peran berbagai pihak.

#### 5. Anti Korupsi

Keharusan untuk melaporkan rumah data kependudukan dapat mengurangi sulitnya intervensi yang efektif sepanjang rantai koordinasi dari tingkat pusat ke pelaksana program.

Jika isu yang terjadi di lingkungan kerja penulis, yaitu kurangnya pemahaman pengelola rumah data kependudukan mengenai skema pelaporan rumah data kependudukan tidak segera diatasi, terdapat beberapa persoalan yang akan terjadi yang bertentangan dengan nilai dasar ANEKA:

##### 1. Akuntabilitas

Pelaporan Rumah Data Kependudukan menjadi tidak akuntabel karena setiap kegiatan yang dilaksanakan tidak disertai dengan bukti yang lengkap dan disampaikan tepat waktu.

##### 2. Nasionalisme

Penyampaian skema pelaporan rumah data kependudukan yang tidak lengkap dan tidak tepat waktu dapat mengganggu kepentingan bersama.

##### 3. Etika publik

Tanpa penyusunan leaflet dan sosialisasinya, dikhawatirkan otoritas cenderung untuk tidak taat dalam melakukan pelaporan rumah data kependudukan.

##### 4. Komitmen mutu

Jika ada penilaian lembaga maturitas (SPIP), hal tersebut juga dapat menjadi penilaian kinerja menjadi kurang baik.

##### 5. Anti korupsi

Tanpa pelaporan yang lengkap yang lengkap, ada risiko terjadinya kegiatan fiktif yang dapat mengarah ke perilaku korupsi.

### C. Matriks Pelaksanaan Aktualisasi

NO	KEGIATAN	TAHAPAN PELAKSANAAN	TANGGAL PELAKSANAAN	OUTPUT DAN BUKTI	HAMBATAN	SOLUSI	KETERKAITAN DENGAN AGENDA ANEKA	KONTRIBUSI TERHADAP TUGAS FUNGSI ORGANISASI	PENGUATAN NILAI ORGANISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Membuat <i>leaflet</i> sebagai Media Komunikasi dalam Rangka Meningkatkan Pemahaman Pengelolaan Pelayanan Pendaftaran Form K0 pada Model Strategis Rumah Data Kependudukan BKKBN	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mempelajari panduan Rumah Data Kependudukan Ditdamduk</li> <li>Inventarisasi materi yang akan dimasukkan ke dalam <i>leaflet</i></li> <li>Pemilihan desain</li> <li>Penyusunan <i>leaflet</i> rumah dataku</li> <li>Konsultasi ketersesuaian <i>leaflet</i> dengan Kasubdit</li> <li>Melakukan perbaikan <i>leaflet</i> berdasarkan masukan dari Kasubdit</li> <li>Melakukan koordinasi dengan Ditvokom</li> <li>Melakukan perizinan ke Kasubdit untuk mencetak <i>leaflet</i></li> <li>Mencetak <i>leaflet</i></li> </ol>	21-25 Oktober 2019	<p><b>Output:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemahaman tentang pelaksanaan Rumah Data Kependudukan</li> <li>Terinventarisasinya materi</li> <li>Terpilihnya desain</li> <li>Tersedianya <i>leaflet</i> untuk direvisi Kasubdit</li> <li>Tercetaknya <i>leaflet</i> yang telah direvisi</li> </ol> <p><b>Evidence:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Leaflet</i> (sebelum direvisi)</li> <li><i>Leaflet</i> (sesudah direvisi Kasubdit)</li> </ol>	-	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>Akuntabilitas: berupaya menyediakan informasi yang akurat pada <i>leaflet</i> yang dibuat</li> <li>Nasionalisme : musyawarah untuk menentukan konten dan semata berorientasi pada kepentingan publik dalam memberikan kemudahan pada pengelola rumah data dalam mengerjakan <i>leaflet</i> skema pelaporan</li> </ol>	Mengarus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan	Kegiatan ini merupakan perwujudan dari nilai kerja cerdas, yakni bekerja dengan teliti dan akurat.

							<p>kartu pendaftaran rumah data kependudukan</p> <p>c) Komitmen Mutu: berorientasi pada mutu dan kreatif dalam pembuatan <i>leaflet</i></p> <p>d) Antikorupsi: menerapkan nilai peduli semata untuk memudahkan pekerjaan pengelola dalam melakukan pelaporan dengan tidak mendesai <i>leaflet</i> dengan semenarik mungkin dan semudah mungkin untuk dipahami.</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2	Membuat Form Penilaian <i>leaflet</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Inventarisasi indikator penilaian yang akan dimasukkan ke dalam form penilaian <i>leaflet</i></li> <li>2) Mengkonsul-tasikan form indikator dengan Kasubdit</li> <li>3) Membuat <i>form</i></li> <li>4) Melakukan perizinan ke Kasubdit untuk mencetak form penilaian <i>leaflet</i></li> <li>5) Mencetak form penilaian <i>leaflet</i></li> </ol>	4-8 November 2019	<p><b>Output:</b></p> <p>a) Terinventarisasinya indikator penilaian yang akan dimasukkan ke dalam form penilaian <i>leaflet</i></p> <p>b) Tercetaknya form penilaian <i>leaflet</i></p> <p><b>Evidence:</b></p> <p>Form penilaian <i>leaflet</i></p>	-	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>a) Akuntabilitas: mewujudkan transparansi dengan mendorong komunikasi yang lebih besar dengan masyarakat tentang ketersediaan <i>leaflet</i></li> <li>b) Nasionalisme: musyawarah untuk menentukan indikator dalam form penilaian <i>leaflet</i></li> <li>c) Etika Publik: cermat dalam membangun dan mengumpulkan masukan dari publik</li> <li>d) Komitmen mutu: konsisten mengikuti indikator yang telah ditetapkan</li> <li>e) Antikorupsi:</li> </ol>	Mengarus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan	Kegiatan ini juga mewujudkan nilai teliti, yaitu teliti dalam membuat program dengan tetap berusaha memenuhi penilaian baik dari masyarakat.
---	---------------------------------------	--	-------------------------	--	---	---	--	---	--

							Bertanggung jawab terhadap tugas merancang indikator		
3.	Melakukan Diskusi Skema Pelaporan bersama OPD Provinsi dan Ujicoba Leaflet ke Rumah Data Kependudukan di kampung KB	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkonsultasikan lokus ujicoba dengan Kasubdit</li> <li>2. Membuat surat tugas untuk ujicoba <i>leaflet</i></li> <li>3. Menginventarisasi masukan dari OPD Provinsi dan pengelola rumah data untuk perbaikan <i>leaflet</i></li> <li>4. Mengumpulkan form masukan <i>leaflet</i> dari pengelola rumah data.</li> <li>5. Menginventari-sasi masukan dari pengelola rumah data untuk perbaikan <i>leaflet</i></li> </ol>	4-15 November 2019	<p><b>Output:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Terpilihnya lokus ujicoba <i>leaflet</i></li> <li>b) Terbuatnya surat tugas untuk melakukan ujicoba</li> <li>c) Dilaksanakannya ujicoba</li> <li>d) Terkumpulnya form masukan <i>leaflet</i> dari pengelola rumah data</li> <li>e) Terinventarisasinya masukan dari pengelola rumah data untuk perbaikan <i>leaflet</i></li> </ol> <p><b>Evidence</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Notulensi hasil uji coba</li> <li>b) Foto dokumentasi</li> <li>c) Form penilaian</li> </ol>	Kesulitan dengan persiapan administrasi dan permohonan fasilitasi kepada pihak provinsi.	Tertib administrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>a) Akuntabilitas: pengecekan ketersesuaian <i>leaflet</i> dengan kebutuhan publik</li> <li>b) Nasionalisme: Memanfaatkan form penilaian dengan semangat untuk memudahkan publik memahami rumah data kependudukan.</li> <li>c) Etika Publik: bermindset sebagai pelayan publik dan mendengarkan aspirasi dan masukan dalam ujicoba <i>leaflet</i></li> <li>d) Komitmen Mutu: efektif dan efisien dalam</li> </ol>	Mengarus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan	Kegiatan ini juga mewujudkan nilai tangguh, yaitu sikap pantang menyerah dalam mencapai hasil yang memuaskan

				<i>leaflet</i> yang telah diisi oleh pengelola rumah data			melaksanakan uji coba <i>leaflet</i> e) Anti Korupsi: Bertanggung jawab terhadap tugas dan tidak melakukan tindakan korupsi dalam pelaksanaan ujicoba <i>leaflet</i>		
4.	Melakukan perbaikan <i>leaflet</i> atas masukan dari ujicoba dengan pengelola rumah data	1) Mengkonsultasikan hasil ujicoba dengan Kasubdit 2) Melakukan revisi <i>leaflet</i> rumah dataku	11-15 November 2019	<b>Output:</b> a) Terkonsultasinya hasil ujicoba <i>leaflet</i> dengan Kasubdit b) Dilakukannya revisi <i>leaflet</i>  <b>Evidence:</b> <i>Leaflet</i> (sesudah memasukan revisi dari pengelola rumah data)	Kesibukan internal direktorat di akhir tahun.	Disiplin dalam timeline kegiatan per hari yang sudah dibuat.	a) Akuntabilitas: Keterbukaan atas semua masukan yang disampaikan dan melakukan evaluasi b) Nasionalisme: Memanfaatkan informasi dengan semangat untuk kepentingan umum bukan kepentingan individu c) Etika Publik: Melakukan pola kerja beretika dengan sikap hormat dan sopan dalam	Mengarus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan	Kegiatan ini juga mewujudkan nilai teliti, yaitu teliti dalam membuat program dengan tetap berusaha memenuhi penilaian baik dari masyarakat.

							pembuatan <i>leaflet</i> d) Komitmen Mutu: efektifitas, efisiensi dengan berorientasi pada hasil yang memuaskan dalam merevisi <i>leaflet</i> e) Anti Korupsi: bekerja keras dalam melakukan tugas		
5.	Sosialisasi <i>leaflet</i> ke Rumah Data di Kampung KB	1. Berkonsultasi dengan atasan 2. Membuat surat tugas untuk sosialisasi 3. Membuat surat perizinan ke kampung KB 4. Follow Up 5. Melakukan kunjungan	17-22 November 2019.	<b>Output:</b> a) Dilakukannya konsultasi dengan atasan b) Terbuatnya surat tugas untuk sosialisasi c) Terbuatnya surat perizinan ke kampung KB d) Dilakukannya <i>Follow Up</i> e) Dilakukan kunjungan	Kesibukan internal direktorat di akhir tahun.	Disiplin dalam timeline kegiatan per hari yang sudah dibuat.	a) Akuntabilitas: Keterbukaan atas semua tindakan yang dilakukan b) Nasionalisme: Memanfaatkan data/informasi dengan semangat untuk kepentingan umum bukan kepentingan individu c) Etika Publik: Melakukan pola kerja beretika dengan	Mengarus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan	Kegiatan ini merupakan perwujudan dari nilai kerjasama, yaitu perilaku membangun hasil yang memuaskan melalui diskusi musyawarah untuk mencapai tujuan bersama



				<b>Evidence:</b> a) Notulensi sosialisasi leaflet b) Foto dokumentasi			sikap hormat dan sopan dalam mensosialisasikan <i>leaflet</i> d) Komitmen Mutu: efektif dan efisien dalam melakukan sosialisasi e) Anti Korupsi: Bertanggung jawab terhadap tugas; penempatan sumber daya yang tepat, dan evaluasi dalam melakukan sosialisasi.		
6	Monitoring pemanfaatan <i>leaflet</i>	1. Berkonsultasi dengan atasan 2. Membuat surat perizinan ke kampung KB 3. Follow Up 4. Melakukan kunjungan  Tahapan Kegiatan Tambahkan: diseminasi leaflet melalui CIS BKKBN	23-29 November 2019	<b>Output:</b> a) Terlaksananya konsultasi dengan atasan b) terselesaikannya surat perizinan ke kampung KB c) Dilakukannya <i>Follow Up</i> d) Delakukan kunjungan	-	-	a) akuntabilitas: keterbukaan atas hasil pemanfaatan di lapangan b) Nasionalisme : Memanfaatkan data/informasi dengan semangat untuk perbaikan kinerja c) Etika Publik :	Mengarus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan	Kegiatan ini merupakan perwujudan dari nilai integritas, yaitu mempertahankan hasil hingga mencapai tujuan

				<p><b>Evidence:</b></p> <p>a) Catatan monitoring pemanfaatan leaflet</p> <p>b) Foto dokumentasi</p>			<p>profesional dalam menjalankan pekerjaan</p> <p>d) Komitmen Mutu: efektifitas, efisiensi dengan berorientasi pada hasil berupa kebermanfaatan produk yang dihasilkan dan menjamin komitmen mutu dengan tetap memantau proses di lapangan</p> <p>e) Anti Korupsi: Bertanggung jawab terhadap tugas hingga selesai dan memperbaiki kinerja dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat</p>		<p>memuaskan publik</p>
--	--	--	--	---	--	--	--	--	-------------------------



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penulis telah melakukan rancangan aktualisasi dengan tepat waktu sesuai agenda yang telah dirancang dan memenuhi nilai dasar ASN, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Demikian Laporan Aktualisasi pada Pelatihan Dasar CPNS Gol. III ini disusun untuk menjadi pertanggungjawaban proses tahap Habitiasi yang diharapkan akan berdaya guna dalam meningkatkan kualitas unit kerja dan peningkatan pelayanan yang ada di BKKBN Pusat, serta tercapainya tujuan penulisan laporan ini antara lain:

- Melaporkan segala proses yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan Aktualisasi dan Habitiasi berikut dengan hambatan dan tantangan pelaksanaannya;
- Merumuskan solusi konkret penyelesaian isu terkait melalui pembuatan Output Proyek Aktualisasi sebagai komitmen diri sendiri dan kontribusi terhadap penyempurnaan unit kerja;
- Mengaktualisasikan Nilai-nilai Dasar ASN yang terangkum dalam ANEKA, serta kedudukan dan peran PNS dalam Pelayanan Publik, Manajemen ASN, dan Whole of Government di setiap kegiatan penyelesaian isu terkait, serta kegiatan lain di unit kerja;
- Memenuhi salah satu syarat kelulusan Pelatihan Dasar CPNS Gol. III di lingkungan BKKBN sesuai dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017.

#### **B. Saran**

Kegiatan Pembuatan *leaflet* dalam rangka meningkatkan pemahaman pengelola tentang skema pelaporan rumah data kependudukan bagi penulis merupakan upaya pembelajaran yang penting karena mencakup bagaimana pelaksanaan monitoring dan evaluasi rumah data kependudukan. Aktualisasi

yang disertai realisasi nilai-nilai dasar ASN, yaitu nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi) dan mengetahui peran dan kedudukan ASN, dimana mendekatkan penulis dengan realita birokrasi di lapangan yang melibatkan beragam otoritas dan problema kelembagaan yang menghasilkan pengalaman yang berharga bagi penulis selama pelaksanaannya. Aktualisasi nilai-nilai dasar ASN membuat kegiatan yang penulis lakukan terorganisir dengan baik. Selain itu, adanya aktualisasi ini membuat pihak-pihak yang terlibat, yaitu penulis, pimpinan, dan pengelola rumah data kependudukan itu sendiri dapat berkolaborasi serta berperan aktif dalam usaha peningkatan pemahaman pengelola data kependudukan melalui *leaflet* rumah data kependudukan yang penulis buat. Harapannya ke depan, *leaflet* ini dapat direplikasi untuk dipublikasi di semua rumah data lainnya dan untuk dipublikasikan pada setiap acara yang diselenggarakan oleh Direktorat Analisis Dampak Kependudukan, seperti Hari Kependudukan Dunia.

### **C. Rencana Tindak Lanjut**

Permasalahan kurangnya pemahaman pengelola rumah data kependudukan dengan skema pelaporan rumah data kependudukan merupakan hal krusial karena dapat berimbas pada lambatnya sistem pelaporan rumah data kependudukan. Upaya membuat menarik suatu informasi dan skema pelaporan yang seringkali rumit untuk dipahami dapat diupayakan dengan penggunaan media KIE. Hal ini hendaknya menjadi rekomendasi dalam program-program kedepan agar media KIE dapat diutamakan sebagai bahan pembelajaran pengelola di lapangan.

Setelah menyelesaikan kegiatan aktualisasi ini, penulis akan terus berupaya mengembangkan dan melanjutkan Pelaksanaan Pelaporan Rumah Data Kependudukan melalui form K/O yang telah dibuat. Pelaporan rumah data kependudukan juga akan dapat menjadi baseline data mengenai kondisi pelayanan saat ini sehingga dapat dibuat suatu rencana intervensi untuk

meningkatkan pelayanan di kampung KB (tempat melekatnya rumah data kependudukan) yang perlu diperbaiki serta ditingkatkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Pengembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pengembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010

Perka No.72 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kelola BKKBN

### HANDOUT

Lembaga Administrasi Negara. 2017. *Akuntabilitas: Modul Pelatihan Dasar CPNS Golongan III*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara. 2017. *Nasionalisme: Modul Pelatihan Dasar CPNS Golongan III*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara. 2017. *Etika Publik: Modul Pelatihan Dasar CPNS Golongan III*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara. 2017. *Komitmen Mutu: Modul Pelatihan Dasar CPNS Golongan III*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara. 2017. *Anti Korupsi: Modul Pelatihan Dasar CPNS Golongan III*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara. 2017. *Manajemen ASN: Modul Pelatihan Dasar CPNS Golongan III*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara. 2017. *Pelayanan Publik: Modul Pelatihan Dasar CPNS Golongan III*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara. 2017. *Whole of Government: Modul Pelatihan Dasar CPNS Golongan III*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 2018. *Panduan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB (Modul Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan)*. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

## **WEBSITE**

<http://bkkbn.go.id>



## LAMPIRAN

### *Lampiran 1*

#### Form Pengendalian Aktualisasi oleh Mentor

Nama : Nurul Safitri  
 NIP : 199503032019022011  
 Unit Kerja : Direktorat Analisis Dampak Kependudukan  
 Jabatan : Penyusun Bahan Data Kependudukan dan KB  
 Isu : Kurangnya pemahaman pengelola rumah data kependudukan terkait alur pendaftaran K0, khususnya pada skema pelaporan

Kegiatan 1 : Membuat *leaflet* sebagai media komunikasi dalam rangka meningkatkan pemahaman pengelolaan pelayanan pendaftaran form K0 pada model strategis Rumah Data Kependudukan BKKBN

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tahapan Kegiatan;</li> <li>1. Mempelajari panduan Rumah Data Kependudukan Ditdamduk</li> <li>2. Inventarisasi materi yang akan dimasukkan ke dalam <i>leaflet</i></li> <li>3. Pemilihan desain</li> <li>4. Penyusunan <i>leaflet</i> rumah dataku</li> <li>5. Konsultasi ketersesuaian <i>leaflet</i> dengan Kasubdit</li> <li>6. Melakukan perbaikan <i>leaflet</i> berdasarkan masukan dari Kasubdit</li> <li>7. Melakukan koordinasi dengan Ditvokom</li> <li>8. Melakukan perizinan ke Kasubdit untuk mencetak <i>leaflet</i></li> <li>9. Mencetak <i>leaflet</i></li>   <li>✓ Output kegiatan terhadap pemecaha isu;</li> <li>1. Pemahaman tentang pelaksanaan Rumah Data Kependudukan</li> <li>2. Terinventarisasinya materi</li> <li>3. Terpilihnya desain</li> <li>4. Tersedianya <i>leaflet</i> untuk direvisi Kasubdit</li> <li>5. Tercetaknya <i>leaflet</i> yang telah direvisi</li>   <li><b>Evidence:</b></li> <li>1. <i>Leaflet</i> (sebelum direvisi)</li> <li>2. <i>Leaflet</i> (sesudah direvisi Kasubdit)</li> </ul>		

<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Keterkaitan Substansi Mata pelatihan; <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Akuntabilitas: berupaya menyediakan informasi yang akurat pada <i>leaflet</i> yang dibuat</li> <li>2. Nasionalisme: musyawarah untuk menentukan konten dan semata berorientasi pada kepentingan publik dalam memberikan kemudahan pada pengelola rumah data dalam mengerjakan <i>leaflet</i> skema pelaporan kartu pendaftaran rumah data kependudukan</li> <li>3. Komitmen Mutu:berorientasi pada mutu dan kreatif dalam pembuatan <i>leaflet</i></li> <li>4. Antikorupsi: menerapkan nilai peduli semata untuk memudahkan pekerjaan pengelola dalam melakukan pelaporan dengan tidak mendesai <i>leaflet</i> dengan semenarik mungkin dan semudah mungkin untuk dipahami.</li> </ul> </li>   <li>✓ Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi; <ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan ini memiliki kontribusi pada misi BKKBN yaitu mengurus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan</li> </ul> </li>   <li>✓ Penguatan Nilai Organisasi; <ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan ini merupakan perwujudan dari nilai kerja cerdas, yakni bekerja dengan teliti dan akurat.</li> </ul> </li> </ul>		
---	--	--

**Kegiatan 2 : Membuat Form Penilaian *leaflet***

<b>Penyelesaian Kegiatan</b>	<b>Catatan Mentor</b>	<b>Paraf Mentor</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tahapan Kegiatan; <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Inventarisasi indikator penilaian yang akan dimasukkan ke dalam form penilaian <i>leaflet</i></li> <li>2. Mengkonsul-tasikan form indikator dengan Kasubdit</li> <li>3. Membuat <i>form</i></li> <li>4. Melakukan perizinan ke Kasubdit untuk mencetak form penilaian <i>leaflet</i></li> <li>5. Mencetak form penilaian <i>leaflet</i></li> </ul> </li>   <li>✓ Output kegiatan terhadap pemecaha isu; <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Terinventarisasinya indikator penilaian yang akan dimasukkan ke dalam form penilaian</li> </ul> </li> </ul>		

<p><i>leaflet</i></p> <p>2. Tercetaknya form penilaian <i>leaflet</i></p> <p><b>Evidence:</b> Form penilaian <i>leaflet</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Keterkaitan Substansi Mata pelatihan;</li> <li>1. Akuntabilitas: mewujudkan transparansi dengan mendorong komunikasi yang lebih besar dengan masyarakat tentang ketersediaan <i>leaflet</i></li> <li>2. Nasionalisme: musyawarah untuk menentukan indikator dalam form penilaian <i>leaflet</i></li> <li>3. Etika Publik: cermat dalam membangun dan mengumpulkan masukan dari publik</li> <li>4. Komitmen mutu: konsisten mengikuti indikator yang telah ditetapkan</li> <li>5. Antikorupsi: Bertanggung jawab terhadap tugas merancang indikator</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi; Kegiatan ini memiliki kontribusi pada misi BKKBN yaitu Mengarus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan</li> <li>✓ Penguatan Nilai Organisasi; Kegiatan ini merupakan perwujudan dari nilai integritas, yaitu dalam membuat program dengan tetap berusaha memenuhi penilaian baik dari masyarakat.</li> </ul>		
--	--	--

Kegiatan 3 : Melakukan ujicoba *leaflet*

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tahapan Kegiatan:</li> <li>1. Mengkonsultasikan lokus ujicoba dengan Kasubdit</li> <li>2. Membuat surat tugas untuk ujicoba <i>leaflet</i></li> <li>3. Melakukan ujicoba ke Rumah Data Kependudukan di kampung KB</li> <li>4. Mengumpulkan form masukan <i>leaflet</i> dari pengelola rumah data.</li> <li>5. Menginventari-sasi masukan dari pengelola rumah data untuk perbaikan <i>leaflet</i></li> </ul>		

<p>✓ Output kegiatan terhadap pemecaha isu;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terpilihnya lokus ujicoba <i>leaflet</i></li> <li>2. Terbuatnya surat tugas untuk melakukan ujicoba</li> <li>3. Dilaksanakannya ujicoba</li> <li>4. Terkumpulnya form masukan <i>leaflet</i> dari pengelola rumah data</li> <li>5. Terinventarisasinya masukan dari pengelola rumah data untuk perbaikan <i>leaflet</i></li> </ol> <p><b>Evidence:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Notulensi hasil uji coba</li> <li>2. Foto dokumentasi</li> <li>3. Form penilaian <i>leaflet</i> yang telah diisi oleh pengelola rumah data</li> </ol> <p>✓ Keterkaitan Substansi Mata pelatihan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akuntabilitas: pengecekan ketersediaan <i>leaflet</i> dengan kebutuhan publik</li> <li>2. Nasionalisme: Memanfaatkan form penilaian dengan semangat untuk memudahkan publik memahami rumah data kependudukan.</li> <li>3. Etika Publik: bermindset sebagai pelayan publik dan mendengarkan aspirasi dan masukan dalam ujicoba <i>leaflet</i></li> <li>4. Komitmen Mutu: efektif dan efisien dalam melaksanakan uji coba <i>leaflet</i></li> <li>5. Anti Korupsi: Bertanggung jawab terhadap tugas dan tidak melakukan tindakan korupsi dalam pelaksanaan ujicoba <i>leaflet</i></li> </ol> <p>Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi;</p> <p>✓ Kegiatan ini memiliki kontribusi pada misi BKKBN yaitu Mengarus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan</p> <p>✓ Penguatan Nilai Organisasi; Kegiatan ini juga mewujudkan nilai tangguh, yaitu sikap pantang menyerah dalam mencapai hasil yang memuaskan</p>		
---	--	--

Kegiatan 4 : Melakukan perbaikan leaflet atas masukan dari ujicoba dengan pengelola rumah data

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
<p>✓ Tahapan Kegiatan Mengkonsultasikan hasil ujicoba dengan Kasubdit Melakukan revisi <i>leaflet</i> rumah dataku</p> <p>✓ Output kegiatan terhadap pemecaha isu; 1. Terkonsultasikannya hasil ujicoba leaflet dengan Kasubdit 2. Dilakukannya revisi <i>leaflet</i></p> <p><b>Evidence:</b> <i>Leaflet</i> (sesudah memasukan revisi dari pengelola rumah data)</p> <p>✓ Keterkaitan Substansi Mata pelatihan : 1. Akuntabilitas: Keterbukaan atas semua masukan yang disampaikan dan melakukan evaluasi 2. Nasionalisme: Memanfaatkan informasi dengan semangat untuk kepentingan umum bukan kepentingan individu 3. Etika Publik: Melakukan pola kerja beretika dengan sikap hormat dan sopan dalam pembuatan <i>leaflet</i> 4. Komitmen Mutu: efektifitas, efisiensi dengan berorientasi pada hasil yang memuaskan dalam merevisi <i>leaflet</i> 5. Anti Korupsi: bekerja keras dalam melakukan tugas</p> <p>✓ Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi; Kegiatan ini memiliki kontribusi pada misi BKKBN yaitu Mengarus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan</p> <p>✓ Penguatan Nilai Organisasi;  Kegiatan ini merupakan perwujudan dari nilai kerjasama, yaitu perilaku membangun hasil yang memuaskan melalui diskusi musyawarah untuk mencapai tujuan bersama</p>		

Kegiatan 5 : Melakukan sosialisasi leaflet Rumah data kependudukan

Penyelesaian Kegiatan	Catatan	Paraf Mentor
-----------------------	---------	--------------

	Mentor	
<p>✓ Tahapan Kegiatan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkonsultasi dengan atasan</li> <li>2. Membuat surat tugas untuk sosialisasi</li> <li>3. Membuat surat perizinan ke kampung KB</li> <li>4. Follow Up</li> <li>5. Melakukan kunjungan</li> </ol> <p>✓ Output kegiatan terhadap pemecaha isu;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukannya konsultasi dengan atasan</li> <li>2. Terbuatnya surat tugas untuk sosialisasi</li> <li>3. Terbuatnya surat perizinan ke kampung KB</li> <li>4. Dilakukannya <i>Follow Up</i></li> <li>5. Dilakukan kunjungan</li> </ol> <p><b>Evidence:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Notulensi sosialisasi leaflet</li> <li>2. Foto dokumentasi</li> </ol> <p>✓ Keterkaitan Substansi Mata pelatihan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akuntabilitas: Keterbukaan atas semua tindakan yang dilakukan</li> <li>2. Nasionalisme: Memanfaatkan data/informasi dengan semangat untuk kepentingan umum bukan kepentingan individu</li> <li>3. Etika Publik: Melakukan pola kerja beretika dengan sikap hormat dan sopan dalam mensosialisasikan <i>leaflet</i></li> <li>4. Komitmen Mutu: efektif dan efisien dalam melakukan sosialisasi</li> <li>5. Anti Korupsi: Bertanggung jawab terhadap tugas; penempatan sumber daya yang tepat, dan evaluasi dalam melakukan sosialisasi.</li> </ol> <p>✓ Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi;</p> <p>Kegiatan ini memiliki kontribusi pada misi BKKBN yaitu mengurus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan</p> <p>✓ Penguatan Nilai Organisasi;</p> <p>Kegiatan ini merupakan perwujudan dari nilai kerjasama, yaitu perilaku membangun hasil yang memuaskan melalui diskusi musyawarah untuk mencapai tujuan bersama</p>		

Kegiatan 6 : Melakukan monitoring pemanfaatan *leaflet*

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
<p>✓ Tahapan Kegiatan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkonsultasi dengan atasan</li> <li>2. Membuat surat perizinan ke kampung KB</li> <li>3. Follow Up</li> <li>4. Melakukan kunjungan</li> </ol> <p>✓ Tahapan Kegiatan Tambahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. diseminasi leaflet melalui CIS BKKBN</li> </ol> <p>✓ Output kegiatan terhadap pemecaha isu;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya konsultasi dengan atasan</li> <li>2. terselesaikannya surat perizinan ke kampung KB</li> <li>3. Dilakukannya <i>Follow Up</i></li> <li>4. Dilakukannya kunjungan</li> <li>5. Terdiseminasinya leaflet dalam website CIS untuk bisa di-<i>download</i> oleh BKKBN Perwakilan Provinsi yang hadir</li> </ol> <p><b>Evidence:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Catatan monitoring pemanfaatan leaflet</li> <li>2. Foto dokumentasi</li> </ol> <p>✓ Keterkaitan Substansi Mata pelatihan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. akuntabilitas: keterbukaan atas hasil pemanfaatan di lapangan</li> <li>2. Nasionalisme :Memanfaatkan data/informasi dengan semangat untuk perbaikan kinerja</li> <li>3. Etika Publik : profesional dalam menjalankan pekerjaan</li> <li>4. Komitmen Mutu: efektifitas, efisiensi dengan berorientasi pada hasil berupa kebermanfaatan produk yang dihasilkan dan menjamin komitmen mutu dengan tetap memantau proses di lapangan</li> <li>5. Anti Korupsi: Bertanggung jawab terhadap tugas hingga selesai dan memperbaiki kinerja dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat</li> </ol> <p>✓ Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi; Kegiatan ini memiliki kontribusi pada misi BKKBN yaitu mengarus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan</p> <p>✓ Penguatan Nilai Organisasi;</p>		

Kegiatan ini merupakan perwujudan dari nilai kerjasama, yaitu perilaku membangun hasil yang memuaskan melalui diskusi musyawarah untuk mencapai tujuan bersama		
--	--	--



Form Pengendalian Aktualisasi oleh *Coach*

Nama : Nurul Safitri  
 NIP : 199503032019022011  
 Unit Kerja : Direktorat Analisis Dampak Kependudukan  
 Jabatan : Penyusun Bahan Data Kependudukan dan KB  
 Isu : Kurangnya pemahaman pengelola rumah data kependudukan terkait alur pendaftaran K0, khususnya pada skema pelaporan

Kegiatan 1 : Membuat *leaflet* sebagai media komunikasi dalam rangka meningkatkan pemahaman pengelolaan pelayanan pendaftaran form K0 pada model strategis Rumah Data Kependudukan BKKBN

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tahapan Kegiatan;</li> <li>1. Mempelajari panduan Rumah Data Kependudukan Ditdamduk</li> <li>2. Inventarisasi materi yang akan dimasukkan ke dalam <i>leaflet</i></li> <li>3. Pemilihan desain</li> <li>4. Penyusunan <i>leaflet</i> rumah dataku</li> <li>5. Konsultasi ketersesuaian <i>leaflet</i> dengan Kasubdit</li> <li>6. Melakukan perbaikan <i>leaflet</i> berdasarkan masukan dari Kasubdit</li> <li>7. Melakukan koordinasi dengan Ditvokom</li> <li>8. Melakukan perizinan ke Kasubdit untuk mencetak <i>leaflet</i></li> <li>9. Mencetak <i>leaflet</i></li>   <li>✓ Output kegiatan terhadap pemecaha isu;</li> <li>1. Pemahaman tentang pelaksanaan Rumah Data Kependudukan</li> <li>2. Terinventarisasinya materi</li> <li>3. Terpilihnya desain</li> <li>4. Tersedianya <i>leaflet</i> untuk direvisi Kasubdit</li> <li>5. Tercetaknya <i>leaflet</i> yang telah direvisi</li> </ul>	<p>Tidak ada kendala</p>	<p>Jumat, 25 Oktober 2019.          Dilakukan melalui chat pada Aplikasi <i>WhatsApp</i></p>

<p><b>Evidence:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Leaflet</i> (sebelum direvisi)</li> <li>2. <i>Leaflet</i> (sesudah direvisi Kasubdit)</li> </ol> <p>✓ Keterkaitan Substansi Mata pelatihan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akuntabilitas: berupaya menyediakan informasi yang akurat pada <i>leaflet</i> yang dibuat</li> <li>2. Nasionalisme: musyawarah untuk menentukan konten dan semata berorientasi pada kepentingan publik dalam memberikan kemudahan pada pengelola rumah data dalam mengerjakan <i>leaflet</i> skema pelaporan kartu pendaftaran rumah data kependudukan</li> <li>3. Komitmen Mutu: berorientasi pada mutu dan kreatif dalam pembuatan <i>leaflet</i></li> <li>4. Antikorupsi: menerapkan nilai peduli semata untuk memudahkan pekerjaan pengelola dalam melakukan pelaporan dengan tidak mendesai <i>leaflet</i> dengan semenarik mungkin dan semudah mungkin untuk dipahami.</li> </ol> <p>✓ Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi; Kegiatan ini memiliki kontribusi pada misi BKKBN yaitu mengurus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan</p> <p>✓ Penguatan Nilai Organisasi; Kegiatan ini merupakan perwujudan dari nilai kerja cerdas, yakni bekerja dengan teliti dan akurat.</p>		
--	--	--

**Kegiatan 2 : Membuat Form Penilaian *leaflet***

<b>Penyelesaian Kegiatan</b>	<b>Catatan Coaching</b>	<b>Waktu dan Media Coaching</b>
<p>✓ Tahapan Kegiatan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inventarisasi indikator penilaian yang akan dimasukkan ke dalam form penilaian <i>leaflet</i></li> <li>2. Mengkonsul-tasikan form indikator dengan Kasubdit</li> <li>3. Membuat <i>form</i></li> <li>4. Melakukan perizinan ke Kasubdit untuk mencetak form penilaian <i>leaflet</i></li> <li>5. Mencetak form penilaian <i>leaflet</i></li> </ol>	<p>Tidak ada kendala</p>	<p>Jumat, 8 November 2019. Dilakukan melalui chat pada Aplikasi <i>WhatsApp</i></p>

<p>✓ Output kegiatan terhadap pemecaha isu;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terinventarisasinya indikator penilaian yang akan dimasukkan ke dalam form penilaian <i>leaflet</i></li> <li>2. Tercetaknya form penilaian <i>leaflet</i></li> </ol> <p><b>Evidence:</b> Form penilaian <i>leaflet</i></p> <p>✓ Keterkaitan Substansi Mata pelatihan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akuntabilitas: mewujudkan transparansi dengan mendorong komunikasi yang lebih besar dengan masyarakat tentang ketersediaan <i>leaflet</i></li> <li>2. Nasionalisme: musyawarah untuk menentukan indikator dalam form penilaian <i>leaflet</i></li> <li>3. Etika Publik: cermat dalam membangun dan mengumpulkan masukan dari publik</li> <li>4. Komitmen mutu: konsisten mengikuti indikator yang telah ditetapkan</li> <li>5. Antikorupsi: Bertanggung jawab terhadap tugas merancang indikator</li> </ol> <p>✓ Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi; Kegiatan ini memiliki kontribusi pada misi BKKBN yaitu Mengarus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan</p> <p>✓ Penguatan Nilai Organisasi; Kegiatan ini merupakan perwujudan dari nilai integritas, yaitu dalam membuat program dengan tetap berusaha memenuhi penilaian baik dari masyarakat.</p>		
--	--	--

Kegiatan 3 : Melakukan ujicoba leaflet

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
<p>✓ Tahapan Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkonsultasikan lokus ujicoba dengan Kasubdit</li> <li>2. Membuat surat tugas untuk ujicoba <i>leaflet</i></li> <li>3. Melakukan ujicoba ke Rumah Data Kependudukan di kampung KB</li> </ol>	Tidak ada kendala	Jumat, 15 November 2019. Dilakukan melalui chat pada Aplikasi <i>WhatsApp</i>

<p>4. Mengumpulkan form masukan <i>leaflet</i> dari pengelola rumah data.</p> <p>5. Menginventari-sasi masukan dari pengelola rumah data untuk perbaikan <i>leaflet</i></p> <p>✓ Output kegiatan terhadap pemecaha isu;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terpilihnya lokus ujicoba <i>leaflet</i></li> <li>2. Terbuatnya surat tugas untuk melakukan ujicoba</li> <li>3. Dilaksanakannya ujicoba</li> <li>4. Terkumpulnya form masukan <i>leaflet</i> dari pengelola rumah data</li> <li>5. Terinventarisasinya masukan dari pengelola rumah data untuk perbaikan <i>leaflet</i></li> </ol> <p><b>Evidence:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Notulensi hasil uji coba</li> <li>2. Foto dokumentasi</li> <li>3. Form penilaian <i>leaflet</i> yang telah diisi oleh pengelola rumah data</li> </ol> <p>✓ Keterkaitan Substansi Mata pelatihan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akuntabilitas: pengecekan ketersediaan <i>leaflet</i> dengan kebutuhan publik</li> <li>2. Nasionalisme: Memanfaatkan form penilaian dengan semangat untuk memudahkan publik memahami rumah data kependudukan.</li> <li>3. Etika Publik: bermindset sebagai pelayan publik dan mendengarkan aspirasi dan masukan dalam ujicoba <i>leaflet</i></li> <li>4. Komitmen Mutu: efektif dan efisien dalam melaksanakan uji coba <i>leaflet</i></li> <li>5. Anti Korupsi: Bertanggung jawab terhadap tugas dan tidak melakukan tindakan korupsi dalam pelaksanaan ujicoba <i>leaflet</i></li> </ol> <p>Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi;</p> <p>✓ Kegiatan ini memiliki kontribusi pada misi BKKBN yaitu Mengarus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan</p> <p>✓ Penguatan Nilai Organisasi; Kegiatan ini juga mewujudkan nilai tangguh, yaitu sikap pantang menyerah dalam mencapai hasil yang memuaskan</p>		
---	--	--

Kegiatan 4 : Melakukan perbaikan leaflet atas masukan dari ujicoba dengan pengelola rumah data

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tahapan Kegiatan Mengkonsultasikan hasil ujicoba dengan Kasubdit Melakukan revisi <i>leaflet</i> rumah dataku</li> <li>✓ Output kegiatan terhadap pemecaha isu;               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terkonsultasikannya hasil ujicoba leaflet dengan Kasubdit</li> <li>2. Dilakukannya revisi <i>leaflet</i></li> </ol> </li> </ul> <p><b>Evidence:</b> <i>Leaflet</i> (sesudah memasukan revisi dari pengelola rumah data)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Keterkaitan Substansi Mata pelatihan :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akuntabilitas: Keterbukaan atas semua masukan yang disampaikan dan melakukan evaluasi</li> <li>2. Nasionalisme: Memanfaatkan informasi dengan semangat untuk kepentingan umum bukan kepentingan individu</li> <li>3. Etika Publik: Melakukan pola kerja beretika dengan sikap hormat dan sopan dalam pembuatan <i>leaflet</i></li> <li>4. Komitmen Mutu: efektifitas, efisiensi dengan berorientasi pada hasil yang memuaskan dalam merevisi <i>leaflet</i></li> <li>5. Anti Korupsi: bekerja keras dalam melakukan tugas</li> </ol> </li> <li>✓ Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi; Kegiatan ini memiliki kontribusi pada misi BKKBN yaitu Mengarus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan</li> <li>✓ Penguatan Nilai Organisasi; Kegiatan ini merupakan perwujudan dari nilai kerjasama, yaitu perilaku membangun hasil yang memuaskan melalui diskusi musyawarah untuk mencapai tujuan bersama</li> </ul>	<p>Tidak ada kendala</p>	<p>Jumat, 15 November 2019. Dilakukan melalui chat pada Aplikasi</p>

Kegiatan 5 : Melakukan sosialisasi leaflet Rumah data kependudukan

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
<p>✓ Tahapan Kegiatan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkonsultasi dengan atasan</li> <li>2. Membuat surat tugas untuk sosialisasi</li> <li>3. Membuat surat perizinan ke kampung KB</li> <li>4. Follow Up</li> <li>5. Melakukan kunjungan</li> </ol> <p>✓ Output kegiatan terhadap pemecaha isu;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukannya konsultasi dengan atasan</li> <li>2. Terbuatnya surat tugas untuk sosialisasi</li> <li>3. Terbuatnya surat perizinan ke kampung KB</li> <li>4. Dilakukannya <i>Follow Up</i></li> <li>5. Dilakukan kunjungan</li> </ol> <p><b>Evidence:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Notulensi sosialisasi leaflet</li> <li>2. Foto dokumentasi</li> <li>3. Form penilaian <i>leaflet</i> yang telah diisi oleh pengelola rumah data</li> </ol> <p>✓ Keterkaitan Substansi Mata pelatihan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akuntabilitas: Keterbukaan atas semua tindakan yang dilakukan</li> <li>2. Nasionalisme: Memanfaatkan data/informasi dengan semangat untuk kepentingan umum bukan kepentingan individu</li> <li>3. Etika Publik: Melakukan pola kerja beretika dengan sikap hormat dan sopan dalam mensosialisasikan <i>leaflet</i></li> <li>4. Komitmen Mutu: efektif dan efisien dalam melakukan sosialisasi</li> <li>5. Anti Korupsi: Bertanggung jawab terhadap tugas; penempatan sumber daya yang tepat, dan evaluasi dalam melakukan sosialisasi.</li> </ol> <p>✓ Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi;</p> <p>Kegiatan ini memiliki kontribusi pada misi BKKBN yaitu mengurus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan</p> <p>✓ Penguatan Nilai Organisasi;</p> <p>Kegiatan ini merupakan perwujudan dari nilai kerjasama, yaitu perilaku membangun hasil yang</p>	<p>Tidak ada kendala</p>	<p>Jumat, 22 November 2019. Dilakukan melalui chat pada Aplikasi <i>WhatsApp</i></p>

memuaskan melalui diskusi musyawarah untuk mencapai tujuan bersama		
--	--	--

Kegiatan 6 : Melakukan monitoring pemanfaatan *leaflet*

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tahapan Kegiatan;               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkonsultasi dengan atasan</li> <li>2. Membuat surat perizinan ke kampung KB</li> <li>3. Follow Up</li> <li>4. Melakukan kunjungan</li> </ol> </li> <li>✓ Tahapan Kegiatan Tambahan: diseminasi leaflet melalui CIS BKKBN</li> <li>✓ Output kegiatan terhadap pemecaha isu;               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya konsultasi dengan atasan</li> <li>2. terselesaikannya surat perizinan ke kampung KB</li> <li>3. Dilakukannya <i>Follow Up</i></li> <li>4. Dilakukannya kunjungan</li> <li>5. Terdiseminasinya leaflet dalam website CIS untuk bisa di-<i>download</i> oleh BKKBN Perwakilan Provinsi yang hadir</li> </ol> </li> </ul> <p><b>Evidence:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Catatan monitoring pemanfaatan leaflet</li> <li>2. Foto dokumentasi</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Keterkaitan Substansi Mata pelatihan;               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. akuntabilitas: keterbukaan atas hasil pemanfaatan di lapangan</li> <li>2. Nasionalisme :Memanfaatkan data/informasi dengan semangat untuk perbaikan kinerja</li> <li>3. Etika Publik : profesional dalam menjalankan pekerjaan</li> <li>4. Komitmen Mutu: efektifitas, efisiensi dengan berorientasi pada hasil berupa kebermanfaatan produk yang dihasilkan dan menjamin komitmen mutu dengan tetap memantau proses di lapangan</li> <li>5. Anti Korupsi: Bertanggung jawab terhadap tugas hingga selesai dan memperbaiki kinerja dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat</li> </ol> </li> </ul>	Tidak ada kendala	Jumat, 29 November 2019. Dilakukan melalui chat pada Aplikasi <i>WhatsApp</i>

<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi;</b> Kegiatan ini memiliki kontribusi pada misi BKKBN yaitu mengurus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan</li>   <li>✓ <b>Penguatan Nilai Organisasi;</b> Kegiatan ini merupakan perwujudan dari nilai kerjasama, yaitu perilaku membangun hasil yang memuaskan melalui diskusi musyawarah untuk mencapai tujuan bersama</li> </ul>		
--	--	--



Formulir 11 : Rekapitulasi Nilai Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas Pelatihan Dasar CPNS

REKAPITULASI NILAI PENGUATAN KOMPETENSI TEKNIS BIDANG TUGAS

Program : Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III

Nama Peserta : Nurul Safitri

NIP : 199503032019022011

Jabatan/Unit Kerja : Penyusun Bahan Data Kependudukan / Direktorat Analisis Dampak Kependudukan

No	Standar Kompetensi	Jenis Penguatan Kompetensi	Tujuan Penguatan	Strategi/ Metoda Penguatan	Mata Pelatihan	Jumlah JP/ Hari	Tempat Pelaksanaan	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Mampu melakukan koordinasi permohonan fasilitasi Sosialisasi Pendataan Kelompok Kegiatan Rumah Dataku, dan Pemanfaatan Bonus Demografi kepada Pengelola	1. Penugasan membuat Surat Fasilitasi Kegiatan dan Kerangka Acuan Kegiatan ke BKKBN Provinsi	1. Mempelajari dan memahami pembuatan Surat Fasilitasi Kegiatan dan KAK 2. Menghubungi humas dan staf Dalduk / KB untuk koordinasi kegiatan	Melalui bimbingan atasan langsung	Tata cara permohonan fasilitasi kegiatan	3 hari	BKKBN Pusat	

	Program KKBPK ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.							
2.	Mampu menjalankan tugas sebagai panitia Diseminasi Hasil Kajian Analisis Dampak Kependudukan sebagai notulensi dan asisten sorot	Penugasan menjadi panitia Diseminasi Hasil Kajian Analisis Dampak Kependudukan sebagai notulensi dan asisten sorot	Terlaksananya kegiatan dan tersedianya notulensi Diseminasi Hasil Kajian Analisis Dampak Kependudukan	Penugasan pembuatan surat dan pencatatan dan asisten sorot bahan paparan pembicara Diseminasi Hasil Kajian Analisis Dampak Kependudukan	Melalui bimbingan atasan langsung	1 hari	BKKBN Pusat	
3.	Mampu melaksanakan penjajakan kebutuhan jabatan fungsional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penugasan untuk mempelajari Permenpan 41</li> <li>2. Penugasan untuk membuat matriks jabatan fungsional</li> <li>3. Penugasan untuk mengikuti rapat</li> <li>4. Penugasan untuk</li> </ol>	Untuk mengetahui jabatan fungsional yang dibutuhkan dan mekanisme pengusulan jabatan fungsional yang baru	Penugasan membuat matriks jabatan fungsional yang dibutuhkan dan penugasan pencatatan diskusi rapat	Tata cara membuat matriks dan notulensi	5 hari	BKKBN Pusat	

		membuat notulen hasil rapat						
4.	Mampu melakukan analisis uraian pekerjaan untuk jabatan pelaksana sesuai jabatan yang ada dalam Permenpan 41	Penugasan mengikuti rapat fullday meeting pembahasan menyiapkan bahan analisis jabatan pelaksana	Tersedianya formulir informasi jabatan pelaksana Direktorat analisis dampak kependudukan	Penugasan pembuatan uraian pekerjaan	Melalui bimbingan atasan langsung	3 hari	BKKBN Pusat	
5.	Mampu melaksanakan klasifikasi kampung KB	1. Penugasan untuk mengikuti rapat klasifikasi kampung KB 2. Penugasan untuk membuat notulensi hasil rapat	Untuk mengetahui dan membuat usulan klasifikasi kampung KB	1. Penugasan mempelajari klasifikasi kampung KB 2. Penugasan membuat notulen hasil rapat	Tata cara membuat matriks dan notulen	3 hari	BKKBN Pusat	
6.	Mampu mengumpulkan bahan materi dan notulensi Pertemuan Uji Publik NSPK terkait Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan	1. Penugasan untuk membuat notulensi hasil Pertemuan Uji Publik NSPK	Untuk mengetahui Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk NSPK Dalduk	Penugasan membuat notulen hasil rapat		3 hari	Makasar, Sulawesi Selatan	

	Pengendalian Kuantitas Penduduk							
7.	Mampu membantu terlaksananya rapat exit meeting	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penugasan untuk menyiapkan keperluan rapat exit meeting</li> <li>2. Penugasan untuk membuat notulensi hasil rapat</li> </ol>	Mampu memahami ketidaksesuaian SPM dan SPJ dan potensi yang dapat menjadi temuan BPK.	Penugasan membuat notulen hasil rapat	Melalui bimbingan atasan langsung	1 hari	BKKBN Pusat	
8	Mampu mengerjakan administrasi Rapat Di Luar Jam Kantor (RDK)	Penugasan untuk membuat daftar peserta RDK	Mampu memahami dan mengeksekusi kebutuhan administrasi RDK	Pembimbingan langsung dalam membuat daftar peserta RDK	Tata cara administrasi RDK	3 hari	BKKBN Pusat	.....
9.	Mampu mengerjakan administrasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penugasan untuk mempelajari SPJ Kegiatan</li> <li>2. Penugasan untuk mengumpulkan kelengkapan administrasi perjalanan dinas yang telah dilakukan, seperti <i>boardingpass</i>, <i>invoice</i> tiket pesawat maupun hotel.</li> <li>3. Penugasan untuk membuat Surat Perintah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami persyaratan pembuktian perjalanan dinas</li> <li>2. Mampu membuat SPJ</li> <li>3. Melaksanakan tertib administrasi keuangan</li> </ol>	Pembimbingan langsung dalam membuat SPJ	Tata cara membuat SPJ	3 hari	BKKBN Pusat	

		Perjalanan Dinas (SPPD), rincian biaya perjalanan dinas, dan daftar pengeluaran riil.						
NILAI TOTAL (RATA-RATA)								
NILAI AKHIR (20%)								

Yogyakarta, 9 Desember 2019  
Kasi Analisis Daya Tampung Lingkungan

Reni Ardianti, S.Kom., M.Si

NIP. 198407022006042012

## **Deskripsi Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas Pelatihan Dasar CPNS:**

### **1. Mampu mengerjakan administrasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)**

Surat pertanggung jawaban atau SPJ merupakan salah satu bentuk laporan penggunaan anggaran atau keuangan yang telah dikeluarkan. Seluruh pegawai yang melaksanakan kegiatan dengan memakai anggaran komponen atau unit kerja harus membuat surat pertanggung jawaban. Salah satu yang harus dilakukan dalam mengerjakan administrasi surat pertanggung jawaban adalah membuat surat perintah perjalanan dinas (SPPD), rincian biaya perjalanan dinas dan daftar pengeluaran riil. Selain itu, diperlukan juga mengumpulkan kelengkapan administrasi yang telah dilakukan seperti boarding pass, invoice tiket pesawat maupun hotel. Hal ini dilakukan agar seluruh pegawai melaksanakan tertib administrasi keuangan.

### **2. Mampu menjalankan tugas sebagai panitia Diseminasi Hasil Kajian Analisis**

Dampak Kependudukan sebagai notulensi dan asisten sorot

Direktorat Analisis Dampak Kependudukan melakukan kegiatan diseminasi hasil kajian analisis dampak kependudukan. Diseminasi dilakukan untuk menyebarluaskan atau menginformasikan hasil kajian kepada publik atau mitra terkait. Diseminasi dilaksanakan dalam 1 hari. Pada saat pelaksanaan dipaparkan 4 materi tentang bonus demografi, sistem peringatan dini, klasifikasi kampung KB dan sistem pelaporan rumah data kependudukan. Setelah pemaparan materi yang dibagi menjadi dua panel dilakukan diskusi dengan peserta yang hadir. Semua hal yang dipaparkan maupun yang didiskusikan tercatat dalam notulen.

### **3. Mampu melaksanakan penjajakan kebutuhan jabatan fungsional**

Sesuai perintah presiden untuk penyederhanaan eselon menjadi dua level dan diganti dengan jabatan fungsional, maka dilaksanakanlah penjajakan kebutuhan jabatan fungsional. Jabatan fungsional yang akan diusulkan harus berdasarkan Pemenpan No 41 tahun 2019. Setelah mempelajari dan memilih jabatan fungsional yang di butuhkan, dibuatlah matriks jabatan fungsional yang berisi

nama jabatan, jenjang pendidikan dan tugasnya. Penjajakan kebutuhan fungsional ini disiapkan dalam jangka waktu 4 hari lalu dirapatkan bersama BKN, Kemenpan dan IPADI dalam waktu 1 hari. Dari rapat tersebut didapatkan informasi tentang langkah apa saja yang harus dilakukan dalam pengusulan jabatan fungsional, usulan-usulan jabatan yang sesuai dengan kependudukan dan rencana tindak lanjut.

4. Mampu melakukan analisis uraian pekerjaan untuk jabatan pelaksana sesuai jabatan yang ada dalam Permenpan 41

Analisis Jabatan untuk Jabatan Pelaksana merupakan hal yang vital dalam institusi BKKBN terutama setelah terjadinya perampingan eselon dan restrukturisasi. Analisis Jabatan Pelaksana ini perlu dibahas detail agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kerugian dalam hal renumerasi. Analisis jabatan pelaksana dilakukan dengan menentukan secara rinci tugas dan persyaratan pekerjaan tertentu serta kepentingan yang berkaitan dengan tugas-tugas jabatan pelaksana. Salah satu hal yang harus dilakukan dalam mengerjakan analisis jabatan pelaksana adalah membuat mengumpulkan uraian pekerjaan untuk mengisi formulir informasi jabatan pelaksana Direktorat analisis dampak kependudukan.

5. Mampu melaksanakan klasifikasi kampung KB

Klasifikasi kampung KB dilakukan untuk memetakan permasalahan, kebutuhan dan solusi permasalahan dalam pengelolaan Kampung KB dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Kampung KB yang berkualitas dan komprehensif. Di dalam rapat tersebut dilakukan penyepakatan indikator yang digunakan sebagai dasar penyusunan klasifikasi kampung KB. Klasifikasi kampung KB dilakukan oleh Direktorat Analisis Dampak Kependudukan dengan dibantu oleh Yayasan Cipta. Hasil dalam rapat ini disepakati klasifikasi kampung KB dibagi menjadi 4 klasifikasi yaitu dasar, berkembang, mandiri dan berkelanjutan dan pembobotan yang dilakukan bernilai 1-4 dari yang tidak penting hingga sangat penting yang terangkum semua di dalam notulensi hasil rapat.

6. Mampu mengumpulkan bahan materi dan notulensi Pertemuan Uji Publik NSPK terkait Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk

Pertemuan Uji Publik NSPK terkait Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk dilakukan dalam rangka Percepatan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Sub Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sesuai dengan Surat Edaran Plt. Kepala BKKBN. Pertemuan ini berupaya menyiapkan dan melakukan pembahasan penyusunan NSPK sesuai dengan kewenangan yang tertuang dalam lampiran I huruf N Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Penyusunan NSPK tersebut disesuaikan dengan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Konkuren (RPP-PUPK). Berdasarkan draft RPP PUPK Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, pembagian sub bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mencakup urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota meliputi:

- a) Pengendalian Penduduk.
- b) Keluarga Berencana (KB).
- c) Keluarga Sejahtera (KS).

Sub Bidang Pengendalian Penduduk Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota meliputi dua urusan pemerintahan yaitu:

- a) Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- b) Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/ kota.

7. Mampu membantu terlaksananya rapat exit meeting

Rapat ini membahas tidak hanya perihal absen yang tidak memenuhi syarat RDK tetapi juga ada masalah yang kaitannya dengan RL dan DL. Selain itu, tiap komponen diberikan jabaran tentang jumlah bukti SPM yang tidak sesuai SPJ.



8. Mampu mengerjakan administrasi Rapat Di Luar Jam Kantor (RDK)

Penugasan Penyiapan Rapat Di Luar Jam Kantor ini bertujuan agar penulis memahami kebutuhan administrasi RDK, seperti penyiapan bahan materi rapat, daftar peserta RDK dan konsumsi.

9. Mampu mengerjakan administrasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)

Penugasan untuk mempelajari SPJ Kegiatan, untuk mengumpulkan kelengkapan administrasi perjalanan dinas yang telah dilakukan, seperti *boardingpass*, *invoice* tiket pesawat maupun hotel, dan membuat Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), rincian biaya perjalanan dinas, dan daftar pengeluaran riil.

**Lampiran permohonan fasilitasi Sosialisasi Pendataan Kelompok Kegiatan Rumah Dataku, dan Pemanfaatan Bonus Demografi kepada Pengelola Program KKBPK ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.**

Nomor : /PD.05.01/D4/2019 13 November 2019  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : **Permohonan Fasilitasi  
Sosialisasi Pendataan Rumah Dataku**

Kepada Yth :

**Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat**

Di Pontianak

Dengan hormat,

Dalam rangka pengembangan sistem monitoring dan evaluasi program Rumah Data Kependudukan, Direktorat Analisis Dampak Kependudukan bermaksud mengadakan kegiatan **Sosialisasi Pendataan Kelompok Kegiatan Rumah Dataku, dan Pemanfaatan Bonus Demografi** kepada Pengelola Program KKBPK ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Saudara untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan tersebut dengan menghadirkan peserta kegiatan, yang akan kami selenggarakan pada:

Tempat : Provinsi Kalimantan Barat  
Tanggal : 24 s/d 26 November 2019

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Plh. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk  
Direktur Analisis Dampak Kependudukan,

**Dra. Hitima Wardhani, MPH**  
NIP 19610829 198603 2 002

Tembusan Yth. :

1. Plt. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk (sebagai laporan)
2. Kabid Dalduk Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat ;

Nomor : /PD.05.01/D4/2019 13 November 2019  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : **Permohonan Fasilitas**  
**Sosialisasi Pendataan Rumah Dataku**

Kepada Yth :

**Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau**

Di Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka pengembangan sistem monitoring dan evaluasi program Rumah Data Kependudukan, Direktorat Analisis Dampak Kependudukan bermaksud mengadakan kegiatan **Sosialisasi Pendataan Kelompok Kegiatan Rumah Dataku, dan Pemanfaatan Bonus Demografi** kepada Pengelola Program KKBPK ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Saudara untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan tersebut dengan menghadirkan peserta kegiatan, yang akan kami selenggarakan pada:

Tempat : Provinsi Riau  
Tanggal : 2 s/d 4 Desember 2019

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Plh. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk  
Direktur Analisis Dampak Kependudukan,

**Dra. Hitima Wardhani, MPH**  
NIP 19610829 198603 2 002

Tembusan Yth. :

1. Plt. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk (sebagai laporan)
2. Kabid Dalduk Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat ;
3. Kabid Dalduk Perwakilan BKKBN Provinsi Riau.
4. Kabid Dalduk Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat.

Nomor : /PD.05.01/D4/2019 13 November 2019  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : **Permohonan Fasilitasi  
Sosialisasi Pendataan Rumah Dataku**

Kepada Yth :

**Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat**

Di Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka pengembangan sistem monitoring dan evaluasi program Rumah Data Kependudukan, Direktorat Analisis Dampak Kependudukan bermaksud mengadakan kegiatan **Sosialisasi Pendataan Kelompok Kegiatan Rumah Dataku, dan Pemanfaatan Bonus Demografi** kepada Pengelola Program KKBPK ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Saudara untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan tersebut dengan menghadirkan peserta kegiatan, yang akan kami selenggarakan pada:

Tempat : Provinsi Sumatera Barat

Tanggal : 4 s/d 6 Desember 2019

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Plh. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk  
Direktur Analisis Dampak Kependudukan,

**Dra. Hitima Wardhani, MPH**  
NIP 19610829 198603 2 002

Tembusan Yth. :

1. Plt. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk (sebagai laporan)
2. Kabid Dalduk Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat ;
3. Kabid Dalduk Perwakilan BKKBN Provinsi Riau.
4. Kabid Dalduk Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat.

KERANGKA ACUAN KEGIATAN  
**SOSIALISASI**  
**PENDATAAN KELOMPOK KEGIATAN RUMAH DATAKU**  
**DAN PEMANFAATAN BONUS DEMOGRAFI**

---

**I. Latar Belakang**

Rumah Dataku yang saat ini melekat pelaksanaannya dengan Kampung KB secara konseptual merupakan program yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan intervensi sosial berdasarkan partisipasi masyarakat dan peran strategis data. Proses ini dilalukukan dengan menyederhanakan kondisi masyarakat yang kompleks kedalam data, dan kemudian melalui pemeranan kader masyarakat menyediakan skema intervensi dalam proses percepatan pembangunan di tingkat lokal. Secara teknis tujuan besar ini ditempatkan dalam skema interaksi yang kompleks antara berbagai tingkat BKKBN dan perwakilan daerah yang dimilikinya, relasi lintas institusi pemerintah yang berurusan dengan pembangunan, dan terakhir konteks masyarakat dimana program ini dijalankan. Sementara secara normatif ia harus berhadapan dengan dampak yang dirasakan masyarakat dari berjalannya program.

Rumah Dataku saat ini tercatat keberadaannya pada 4.102 titik diseluruh Indonesia. Angka yang cukup besar ini nyatanya tidak dibarengi dengan mekanisme pencatatan, pengendalian, dan evaluasi yang baik. Sejak dicanangkan dan kemudian Rumah Dataku berjalan pengawasannya seakan dilepaskan pada otoritas yang mendirikan di level provinsi. Dimana hingga saat ini belum ada sistem evaluasi program berjalan yang menaungi bukan hanya tata cara evaluasinya, namun juga pembagian kewenangan antar stakeholder dalam Rumah Dataku. Semua data yang masuk ke dalam sistem berasal dari proses pendirian yang kemudian dilaporkan oleh provinsi. Artinya dia hanya menggambarkan secara kuantitatif jumlah Rumah Dataku yang telah berdiri dan diresmikan, namun sama sekali tidak dapat merepresentasikan kondisi berjalan Rumah Dataku dan bagaimana proses program yang telah dilakukan.

Ketiadaan sistem evaluasi ini secara prosedural mendorong persoalan serius bagi pelaksanaan program. Pada sisi BKKBN selaku institusi pembentuk program,

kehilangan kemampuan pengendalian yang mampu memastikan program Rumah Dataku mengarah pada tujuan pembangunan masyarakat. Sementara pada sisi lapangan kader pelaksana program ketidak-adaan sistem evaluasi menyisakan kekosongan pemandu target capaian dalam tahapan pelaksanaan program, yang mampu membuat lemahnya keinginan pelaksana lapangan dalam memaksimalkan nilai program. Kekosongan data pelaksanaan dan capaian lapangan secara sistemik menyebabkan sulitnya intervensi yang efektif sepanjang rantai kordinasi dari tingkat pusat ke pelaksana program; dan terutama sulitnya memastikan tujuan pencapaian program itu sendiri.

Berdasarkan permasalahan tersebut Direktorat Analisis Dampak Kependudukan telah menyusun Panduan Pendataan Kelompok Kegiatan Rumah Dataku, dan telah mensosialisasikan ditingkat nasional kepada seluruh jajaran pengelola Program Pengendalian Penduduk di tingkat provinsi melalui video conference pada tanggal 15 Oktober 2019.

Dalam rangka mempercepat pelaksanaan kegiatan Pendataan Kelompok Kegiatan Rumah Dataku di tingkat Provinsi, diperlukan kegiatan sosialisasi kepada seluruh jajaran pengelola Program Pengendalian Penduduk di tingkat Kabupaten/Kota.

## II. Tujuan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk:

1. Mensosialisasikan Panduan Tata Cara Pendataan Kelompok Kegiatan **Rumah Dataku** agar bisa dilaksanakan oleh Pengurus Rumah Dataku ;
2. Mensosialisasikan Pemanfaatan Bonus Demografi, agar bisa menjadi pedoman dalam pelaksanaan program Pengendalian Penduduk kedepan ;
3. Mendapatkan Basis Data Potensi Kelompok Kegiatan Rumah Dataku untuk pengembangan kebijakan dan evaluasi Program Rumah Dataku kedepan.

## III. Peserta Kegiatan

Peserta Kegiatan sosialisasi adalah sebagai berikut:

No	Peserta Kegiatan	Jumlah
1	Kabid Pengendalian Dampak Kependudukan, Perwakilan BKKBN Provinsi	1 orang/Provinsi
2	Pengelola Program Rumah Dataku (Kependudukan), OPD Dalduk-KB Kabupaten/Kota	1 Orang/Kab

3	Kasubbid Analisis Dampak Kependudukan, Perwakilan BKKBN Provinsi	1 Orang/Provinsi
4	Kasubbid Pendidikan Kependudukan, Perwakilan BKKBN Provinsi	1 Orang/Provinsi
5	Kasubbid Parameter Kependudukan, Perwakilan BKKBN Provinsi	1 Orang/Provinsi
6	Staf ADK, Pengelola Laporan Rumah Dataku	1 orang/Provinsi

#### IV. Tempat dan Waktu

Kegiatan Sosialisasi akan dilaksanakan pada:

Provinsi	Waktu	Nama Tim
Kalimantan Barat	24 s/d 26 November 2019	Dra. Hitima Wardhani, MPH Muktiani A. Suryaningrum, SSos, MPH Pawa Palembang, SSos, MM Nurul Safitri, S.Kesos
Riau	2 s.d 4 Desember 2019	Dra. Hitima Wardhani, MPH Ir. Yosrizal RR. Endang Wulandari, SE Suhartati
Sumatera Barat	4 s.d 6 Desember 2019	Dra. Hitima Wardhani, MPH Ir. Yosrizal Endah Larasati, S.Sos Devi Novitasari, S.E

#### V. Metode kegiatan

Metode kegiatan yang dilakukan adalah :

- Paparan Panduan Tata Cara Pendataan Kelompok Kegiatan Rumah Dataku
- Praktek Pengisian Kartu Pendaftaran Kelompok Kegiatan Rumah Dataku (K/O/RDK/19), dan Praktek Pengiriman Laporan melalui aplikasi Google Form.
- Paparan Program Pengendalian Penduduk dan Pemanfaatan Bonus Demografi
- Diskusi dan Tanya Jawab

## VI. Perlengkapan Kegiatan

Kelengkapan yang diperlukan untuk berjalannya kegiatan ini adalah:

1. Ruangan pertemuan yang bisa memuat seluruh peserta dengan format U atau melingkar
2. Satu buah LCD proyektor
3. Satu buah *laptop*
4. Peserta dari OPD Dalduk dan KB Kabupaten/Kota membawa *smartphone*

## VII. Jadwal Kegiatan Tim

No	Waktu	Kegiatan	Keterangan
<b>1</b>	<b>Hari Pertama</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keberangkatan Tim ke Provinsi</li> <li>• Menyampaikan Maksud dan Tujuan Kegiatan kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi</li> </ul>	Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi
<b>2</b>	<b>Hari Kedua</b>		
	08.45 – 09.00	Laporan Penyelenggara	Kasi ADK
	09.00 – 09.15	Sambutan Kepala BKKBN Perwakilan	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi
	09.15 – 10.00	Arahan Direktur Analisis Dampak Kependudukan	Direktur Analisis Dampak Kependudukan
	10.00 – 12.00	Paparan Pemanfaatan Bonus Demografi	Nara Sumber Ditdamduk
	12.00 – 13.00	----- ISHOMA -----	
	13.00 – 14.00	----	Nara Sumber Ditdamduk
	14.00 – 14.30	Paparan Panduan Tata Cara Pendataan Kelompok Kegiatan Rumah Dataku	Nara Sumber Ditdamduk
	14.30 – 15.00	Praktek Pengisian Kartu Pendaftaran Kelompok Kegiatan Rumah Dataku (K/O/RDK/19)	Nara Sumber Ditdamduk
	15.00 – 15.30	Praktek Pengiriman Laporan melalui Aplikasi Google Form	Direktur Analisis Dampak Kependudukan
	15.30 – 16.00	Evaluasi Hasil Pendataan Kelompok Kegiatan Rumah Dataku	Kabid Dalduk



		Penutupan	
<b>3</b>	<b>Hari Ketiga</b> 08.00 – 12.00  12.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kunjungan ke Kampung KB Percontohan tingkat Provinsi</li> <li>• Kembali ke Jakarta</li> </ul>	

#### VIII. Pembiayaan

Ditanggung oleh DIPA Deputi Bidang Pengendalian Penduduk, BKKBN Pusat.



Nomor: 117/I/PD.404/D4/2019

Sehubungan dengan akan diladakannya Diseminasi Hasil Kajian Analisis Dampak Penduduk Bagi Mitra yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2019, maka dengan ini ditugaskan nama-nama di bawah ini untuk menjadi Panitia Pelaksana kegiatan tersebut.

**A. Panitia Pengarah**

Penanggungjawab : Direktur Analisis Dampak Kependudukan

**B. Panitia Pelaksana**

Ketua Pelaksana : Slamet Sutiyono, S.Sos  
Wakil Ketua : Ir. Yos Rizal  
Sekretaris : Muktiani A Suryanigrum, S.Sos., MPH

**C. Bidang-bidang**

**1. Sekretariat**

a. Koordinator : Slamet Sutiyono, S.Sos  
b. Anggota : Reni Ardianti, S.Kom., M.Si  
Novie Panda Citra, S.Sos  
Devi Novitasari, SE

**2. Materi**

a. Koordinator : Muktiani A Suryanigrum, S.Sos., MPH  
b. Anggota : Ria Rahayu, S.Si., MSr  
Niken Arumsari  
Endah Larasati, S.Sos  
Kukuh Dwi Setiawan, S.Sos, M.Si

**3. Akomodasi dan Konsumsi**

a. Koordinator : Pawa Palembang, S.Sos., MM  
b. Anggota : Suhartati

**4. Humas dan Publikasi**

a. Koordinator : Muktiani A Suryanigrum, S.Sos., MPH  
b. Anggota : Endah Larasati

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional  
Jl. Permata No. 1, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur 13650 PO.BOX : 296 JKT 13013  
Telp. : (021) 8098018, 8009029-45-53-69-77-85 Fax. : (021) 8008554 Website : <http://www.bkkbn.go.id>

## NOTULEN DISEMINASI HASIL KAJIAN

### ANALISIS DAMPAK KEPENDUDUKAN BAGI MITRA TAHUN 2019

Hari/Tanggal : Rabu, 27 November 2019

Tempat : Ruang Auditorium

Pimpinan : Dra. Hitima Wardhani, MPH

NO	PEMBAHAS	KETERANGAN
1	Direktur Ditdamduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan diseminasi ini merupakan upaya untuk meningkatkan penyebarluasan hasil kajian analisis dampak kependudukan yang bekerja sama dengan pakar, mitra kerja, dan akademisi.</li> <li>• Kegiatan ini di latar belakang berdasarkan peraturan kepala BKKBN yang didalamnya terdapat salah satu tugas ditdamduk yaitu menyiapkan kajian model solusi strategis dengan memperhatikan isu-isu kependudukan yang berkembang saat ini, meningkatkan komitmen pemerintah dalam menangani isu-isu kependudukan dan meningkatkan jejaring kemitraan</li> <li>• Materi yang akan disampaikan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bu Kasmiyati : Bonus Demografi</li> <li>b. Pak Dimas : Sistem Informasi Peringatan Dini</li> <li>c. Bu Ine : Klasifikasi Kampung KB</li> <li>d. Pak Imam : Sistem Pelaporan Rumah Data</li> </ol> </li> </ul>
2	Deputi Dalduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mulai tahun depan kita sangat dituntut segala sesuatu yang di lakukan di pusat bisa langsung diterapkan di lapangan.</li> <li>• Kajian yang sudah dikaji akan dituangkan ke rencana induk rencana kerja masing-masing</li> <li>• Beberapa provinsi belum memiliki <i>grand design</i>.</li> <li>• Upaya kita menangani bonus demografi dalam memfasilitasi K/L terkait disambut dengan baik namun di kab/kota belum menangani bonus demografi karena belum memiliki data yang lengkap.</li> <li>• Pengendalian penduduk di kabupaten/kota masih sangat baru.</li> <li>• Pertumbuhan penduduk di kabupaten Lamongan hasilnya minus tetapi pembangunan daerahnya bagus dan masyarakatnya semakin terpacu dengan</li> </ul>

		<p>adanya migrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Papua &amp; Papua Barat sudah mengalami bonus demografi walaupun anomali, karena bonus demografinya berasal dari penduduk pendatang. Bagi masyarakat Papua, hal ini merupakan ancaman karena apa yang sudah pendatang dapatkan di Papua akan dibawa kembali ke daerahnya masing-masing, bukan untuk membantu mengangkat daerah Papua. Masyarakat Papua tidak bisa menikmati hasil pembangunannya secara langsung.</li> <li>• Salah satu kabupaten di Kalimantan bahkan tidak menerima migran sama sekali.</li> <li>• Sistem Informasi Peringatan Dini harus bisa dibuat sesederhana mungkin agar pemerintah daerah dapat menggunakannya dengan mudah</li> <li>• Tantangan kita adalah sistem informasi terpadu berdasarkan NIK yang masih belum berjalan dengan baik</li> <li>• Kampung KB merupakan <i>quick wins</i> BKKBN.</li> <li>• Kampung KB sudah ada sejak tahun 2015 dan sudah saatnya kita membuat klasifikasi. Kita harus memahami entitas kampung KB satu persatu</li> <li>• Biaya operasional kampung KB tidak sedikit maka sangat disayangkan jika tidak kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas kampung KB.</li> <li>• Yang bertanggung jawab sertifikasi pra nikah menurut menteri menko adalah BKKBN.</li> <li>• Kampung KB bisa menjadi wadah pengenalan sertifikasi bagi calon-calon pengantin. Calon pengantin ini harus mempunyai bekal yang cukup sebelum menikah.</li> <li>• Sertifikasi pra nikah tidak memungut biaya, hanya memberikan bekal dan sosialisasi dalam aspek kehidupan berkeluarga</li> <li>• Rumah data awalnya berada di kampung KB, namun kita berharap bisa di inisiasikan ke seluruh desa.</li> <li>• Data yang berada di Rumah Data Kependudukan harus selalu tersedia/<i>real time</i>.</li> <li>• Para pengelola rumah data sangat terbantu dengan rumah data ini untuk menganalisis permasalahan penduduk mereka dan mendapatkan solusi berdasarkan data tersebut.</li> </ul>
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harapan kami BKKBN bisa bekerja semakin profesional karena apa yang kita hadapi tidak hanya dapat diatasi dengan aspek manajerial.</li> <li>• Kami juga sedang mempersiapkan jabatan fungsional sehingga nanti tidak hanya ada Penyuluh Keluarga Berencana namun akan ada tenaga profesional lainnya. Semoga BKKBN dapat menata organisasi kembali dengan dibantu oleh mitra terkait.</li> </ul>
3	Pak Taufik (Moderator)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kami berharap hasil kajian ini dapat disimak dengan cermat dan hasil yang didapat dapat dipublikasikan ke daerah masing-masing</li> </ul>
4	Bu Kasmiyati	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kami dilator belakang dengan adanya penurunan TFR (survei SDKI). Hal ini merupakan salah satu keberhasilan program KB</li> <li>• CPR meningkat dari 50% menjadi 64%. Jika dilihat dari sasaran renstranya belum tercapai tetapi sudah menghasilkan angka TFR yang semakin menurun</li> <li>• Umur harapan hidup kita semakin lama semakin meningkat. Di tahun 2010 umur harapan hidup Indonesia adalah 69,81 dan tahun 2018 meningkat menjadi 71,2 tahun.</li> <li>• Kelahiran menurun, kematian menurun, sehingga Indonesia sudah mengalami transisi demografi. Namun Pembangunan Kapasitas Manusia masih tertinggal.</li> <li>• Bonus Demografi (Bodem) adalah suatu keadaan jumlah penduduk usia produktif lebih banyak daripada usia non produktif. Usia produktif adalah umur 15-64 tahun.</li> <li>• Bodem dapat dinikmati jika tersedia lapangan kerja dan penduduk usia kerja memperoleh lapangan kerja.</li> <li>• Bodem akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat asal penduduk usia kerja memperoleh lapangan kerja dan terserap dalam pasar tenaga kerja.</li> <li>• Mencuri adalah salah satu dampak adanya penduduk usia kerja namun tidak memperoleh lapangan pekerjaan</li> <li>• Bodem antar provinsi dibagi 4 tahapan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tahap transisi demografi lanjut: beban ketergantungan 40-45%</li> <li>b. Tahap transisi demografi sedang berjalan: kalau beban ketergantungannya 46-49%</li> </ul> </li> </ul>

		<p>c. Tahap Pra Transisi: Beban ketergantungan 50-54%</p> <p>d. Belum ada tanda menuju transisi demografi: beban ketergantungan &gt;55%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusdu melakukan penelitian di Jawa Timur, Bali dan Sulawesi Utara, hasilnya di tingkat provinsi sebagian perangkat daerah telah memahami bodem sedangkan di Kab/Kota, Bappeda, OPD KB, dinas terkait dan DPRD belum memahami bonus demografi. Sebagian remaja juga masih pilih-pilih kerjaan.</li> <li>• Di Kepulauan Riau, Informan mengetahui tentang situasi dan permasalahan kependudukan di wilayahnya. Persebaran penduduk tidak merata yang hanya terpusat di Kota Batam. Jumlah migrasi yang masuk cukup tinggi dan besarnya jumlah angkatan kerja.</li> <li>• Terkadang pemerintah daerah merencanakan sesuatu tidak berdasarkan dengan data yang akurat</li> <li>• Program antar wilayah belum bersinergi dengan antar sektor karena masing-masing sektor memiliki ego sektor.</li> <li>• Contoh: Di kampung KB masih banyak sektor lain yang tidak ingin ikut terlibat karena merasa program tersebut punya BKKBN.</li> <li>• Di Palu pemerintahannya berhasil melaksanakan program karena masing-masing sektor saling bekerja sama.</li> <li>• NTT, Maluku dan Papua belum ada tanda-tanda tahap bonus demografi. Masih banyak pandangan bahwa banyak anak banyak rezeki, perkawinan di usia muda, kurangnya pemahaman pemangku kebijakan tentang bonus demografi</li> <li>• Permasalahan yang ada adalah tantangan pencapaian penduduk tumbuh seimbang yang dikaitkan dengan terjadinya bonus demografi, kab/kota terjadi kesenjangan TFR, Pemahaman tentang bonus demografi belum optimal dan belum semua stakeholder memahami tentang kondisi kedaerahannya.</li> <li>• Kami mendatangi dua provinsi, yaitu Jawa Tengah (Tahap transisi demografi sedang berjalan) dan Sumatera Barat (Pra Transisi). Masing provinsi diambil 4 kab/kota sesuai tahapan</li> <li>• Informasi yang dikumpulkan meliputi identitas informan, kondisi wilayah, apa yang</li> </ul>
--	--	---

		<p>sudah dilakukan &amp; yang akan dilakukan kab/kota, kebijakan &amp; kegiatan pokok yang akan dilakukan dan usul &amp; saran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisisnya menggunakan deskriptif kualitatif dan dilaksanakan mulai bulan Mei hingga November 2019 dengan menggunakan anggaran Ditdamduk TA 2019</li> <li>• Hasil wawancara yang didapat adalah hampir semua informan pernah mendengar bodem kecuali tiga informan legislatif dan dua informan eksekutif. Sosialisasi bodem pernah dilakukan walaupun belum pernah terima buku Analisa Dampak Pengendalian Penduduk. Sebagian informan mengatakan memperoleh istilah bodem dari membaca maupun mengikuti seminar BKKBN Provinsi</li> <li>• Kondisi data kependudukan berbeda, berdasarkan data di SUPAS, data CPR rendah namun berdasarkan wawancara data CPR sangat tinggi.</li> <li>• IPM meningkat dan di Kebumen ada data TPT yang meningkat.</li> <li>• Manfaat bodem di Kota Padang, penduduk usia produktif yang bekerja semakin banyak, banyak tenaga kerja yang dikirim sebagai pekerja formal di Malaysia dan Jepang</li> <li>• Manfaat bodem di Kota Semarang, dilakukannya pelatihan untuk wirausaha baru setiap bulan sekali selama 10 hari,. Dengan adanya pelatihan diharapkan mereka bisa berwirausaha.</li> <li>• Kebijakan dan kegiatan di Padang lebih ke arah bidang pendidikan dan kewirausahaan. Sedangkan di Sragen fokus mengentaskan 25 ribu pengangguran. Di Tanah Datar ada pembinaan kepada remaja yang merupakan usulan dari anggota DPRDnya sendiri dan di kabupaten Kebumen ada kegiatan SAKINAH PELING yaitu Stop Angka Kematian Ibu dan Bayi Melalui Pedagang Sayur Keliling.</li> <li>• Kebijakan masing-masing wilayah sampel dalam rangka menuju bonus demografi berbeda-beda</li> <li>• Bagi wilayah dengan kondisi bonus demografi tahap lanjut perlu komitmen stakeholder untuk fokus ke penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan kualitas SDM.</li> <li>• Bagi wilayah dengan kondisi sedang berjalan,</li> </ul>
--	--	--

		<p>perlu pengendalian kelahiran melalui program KB, menyiapkan remaja untuk berfikir merencanakan keluarga dengan dua anak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagi wilayah dengan kondisi pra transisi, masyarakat dan keluarga perlu memahami pentingnya pengendalian penduduk dan juga pendewasaan usia kawin</li> <li>• Bagi wilayah yang belum ada tanda-tanda ke arah bonus demografi perlu melaksanakan program KB mulai dari awal, melibatkan TOMA TOGA untuk program KB, perlu memahami tentang keluarga kecil, perencanaan keluarga, pemakaian dan penyediaan kontrasepsi dan juga penundaan usia kawin.</li> </ul>
5	Pak Taufik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bodem bukan hanya untuk BKKBN namun juga untuk rekomendasi sektor lain</li> <li>• Bodem bukan hanya jumlah penduduk usia produktifnya namun penduduk produktif dapat menanggung penduduk non produktifnya.</li> <li>• Ada yang sudah masuk tahap bodem dan harus dipertahankan. Transisi demografi harus dipikirkan untuk mengupayakannya.</li> </ul>
6	Pak Dimas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Peringatan Dini fokus mengembangkan model dan untuk keperluan di masa yang akan datang</li> <li>• Yang kami kembangkan masih <i>prototype</i> dan memerlukan kajian-kajian dampak kependudukan lebih dalam</li> <li>• Kajian yang kita kembangkan baru 3 komponen yaitu ekonomi, pendidikan dan lapangan kerja</li> <li>• Ketika lapangan kerja tidak terpenuhi maka kondisi ekonominya pun menjadi kurang baik</li> <li>• Tujuan kami dalam mengembangkan ini adalah menyediakan alat bantu sistem peringatan dini</li> <li>• Langkah teknis yang dilakukan adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengembangkan modelling.</li> <li>b. Menentukan parameter sistem peringatan dini</li> <li>c. Mengembangkan visualisasi sederhana</li> <li>d. Melibatkan pemda dalam memantau dan mengembangkan program</li> </ol> </li> <li>• Pengembangan proyeksi ini bekerja sama dengan direktorat lain yang sama-sama mengembangkan sistem dengan</li> </ul>



		<p>menggunakan spectrum &amp; FPET.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masalah yang dihadapi adalah sulitnya ketersediaan data di level bawah</li> <li>• Kami sudah melakukan uji coba di Jawa Barat dan Jogja dengan melibatkan sektor terkait.</li> <li>• Di Jogja ada masalah penyerapan tenaga kerja. Banyak yang tidak mau bekerja di Jogja karena UMRnya sangat rendah sehingga mereka lebih memilih mencari pekerjaan di luar Jogja.</li> <li>• Kami punya alat instrumen kependudukan tapi ternyata di level bawah sulit untuk memakainya sehingga kita butuh ada yang menjembatani.</li> <li>• Program pengembangan di kabupaten menjadi tantangan karena hanya ada di beberapa kab.</li> <li>• Data dasar mengambil data yang sudah ada di Nasional yaitu data provinsi.</li> <li>• Aplikasi yang kami buat bernama SIPINTAR</li> <li>• Untuk mengakses aplikasi ini butuh registrasi.</li> <li>• Di dalam aplikasi cukup melihat piramida penduduk untuk melihat potensi masalah</li> <li>• Kami juga memberikan wawasan program KB kedepannya.</li> <li>• Di dalam <i>dashboard</i> akan ada parameter yang berwarna merah, kuning, hijau. Merah berarti memiliki dampak sedangkan hijau berarti aman</li> <li>• Proses pengembangan ke depannya hasil proyeksi penduduk harus divalidasi kembali dengan melibatkan ditrenduk, mengintegrasikan alat bantu ini dengan alat bantu lain yang ada di BKKBN, penetapan batasan dampak, mengakomodir kebutuhan daerah untuk mengembangkan kajian spesifik sesuai situasi tiap daerah, membuat tampilan yang user friendly dan memvisualisasikan data.</li> </ul>
7	Pak Sudibyo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bodem bukan hanya mencapai tetapi juga mempertahankan untuk periode yang lama. Mencapai bodem dengan cara pengendalian penduduk dan mempertahankan bodem juga dengan pengendalian penduduk namun dengan cara yang bijak.</li> <li>• Ada 4 hal yang penting : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bagaimana lapangan kerja tersedia untuk penduduk usia produktif</li> <li>b. Proporsi perempuan yang bekerja</li> </ol> </li> </ul>

		<p>c. Cara meningkatkan kualitas SDM</p> <p>d. Upaya pemda untuk menggiatkan tabungan dalam rumah tangga</p> <p>Tolong analisa bodem tadi digiring ke empat hal ini.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel yang ada di data provinsi belum tentu sama dengan variabel di daerah, hal tersebut bisa menjadi tidak penting bagi pihak lainnya. Oleh sebab itu variabel perlu di uji coba di masing-masing wilayah tapi tetap harus ada variabel pokok yang tidak boleh dihilangkan.</li> </ul>
8	Bu Oce	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana jika suatu daerah tidak mendapat bonus demografi, hanya mendapatkan “posisi” bodem?</li> <li>• Apa kebijakan yang bisa kita ambil untuk memanfaatkan bodem?</li> <li>• Data tidak sampai ke level bawah, jika bisa akan sangat bagus sekali untuk pemerintahan daerah dalam grand design pembangunan kependudukan.</li> </ul> <p>Pembelajaran ini perlu diberi pelajaran sebaik-baiknya agar tidak asal-asalan dalam input data</p>
9	Yayasan Cipta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana follow up dari itu semua?</li> <li>• Bagaimana kalau kita mendorong provinsi, kabupaten dan kota untuk menginput tapi dengan standarisasi input tertentu karena kalau semua dibebankan ke pusat akan sangat berat</li> </ul>
10	Pak Farid (Kemendagri)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Tools</i> nanti di connect ke pemerintah daerah. Kalau bisa ada notifikasi dalam android yang menyatakan kondisi suatu daerah jika kita berada di daerah tersebut</li> </ul>
11	Pak Ewang (BKKBN DIY)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apa memungkinkan dapat bodem jika sekarang belum dapat bodem? Jika memungkinkan, butuh waktu berapa lama?</li> <li>• Yang sudah dapat bodem, bagaimana mempertahankannya? Apa yang perlu dipersiapkan?</li> <li>• Apa memungkinkan <i>tools</i> dimanfaatkan di seluruh kampung KB ?</li> </ul>
12	Pak Badrun (Koalisi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah variabel kependudukan sudah ditempatkan di perencanaan?</li> <li>• Dalam variabel yang ada di IPM, sejauh mana pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, angka angkatan kerja, tingkat pengangguran?</li> <li>• Angka mortalitas &amp; fertilitas?</li> <li>• Berapa besar penduduk yang berpendidikan</li> </ul>

		tinggi? <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apa saja yang dibutuhkan angkatan kerja terkait dengan potensi wilayah?</li> </ul>
13	Bu Kasmiyati	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Di dalam analisis yang belum masuk dari 4 hal penting menurut pak Dibyso adalah tabungan dalam masyarakat.</li> <li>• Di laporan lengkap, ada di dalam bab 5 hasil dan pembahasan. Jika ada yang kurang akan saya konsultasikan dengan bu oce</li> <li>• Perlu advokasi dan KIE untuk <i>follow up</i> pemerintahan daerah. Saya sangat setuju tentang <i>follow up</i> yang harus dilakukan setelah terjadi bodem</li> <li>• Kulon progo bisa mendapatkan bodem karena adanya bandara baru namun perlu dilihat tentang usia penduduk, TFR dihitung berdasarkan kab/kota Untuk mempertahankan bodem, harus mempertahankan TFR dengan bijak.</li> <li>• Kami juga prihatin ada 3 dari 10 anggota legislatif yang belum pernah mendengar bodem. Data IPM dan tingkat pendidikan ada lengkap, tapi data yang tidak ada adalah data mortalitas dan fertilitas.</li> </ul>
14	Pak Dimas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saya sangat setuju variabel perlu adanya justifikasi dan kajian khusus terkait situasi lokal.</li> <li>• Tools ini mirip dengan rapid namun rapid tidak kompatibel dengan isu kependudukan yang ada di Indonesia. Tools ini dikembangkan dengan user friendly.</li> <li>• GDPK memang berbasis masyarakat, selain pengembangan juga perlu penguatan modelling</li> <li>• Perhitungan tools ini dimiliki oleh teman provinsi, kab/kota namun <i>research spectrum</i> belum memadai sehingga kami memutuskan pusat untuk mengumpulkan data dasar. Saya setuju mereka dilibatkan namun porsinya mungkin yang harus di rencanakan.</li> <li>• Data yang terkoneksi adalah yang kita cita-citakan. Data yang kita lihat hanya dari google, padahal mungkin K/L punya data sampai kab/kota. Masukan tersebut sangat baik. Kita butuh kerjasama terkait data tersebut</li> <li>• Data sangat bisa dimanfaatkan di level kampung KB.</li> <li>• Angkatan kerja yang bisa dikaitkan dengan</li> </ul>

		<p>potensi wilayah itu terjawab saat kami di DIY. DIY potensi wilayahnya adalah pariwisata sehingga yang perlu disiapkan adalah pariwisatanya. Masyarakat jogja lebih tertarik menjadi <i>guide</i> atau pembuat <i>souvenir</i> sehingga perlu disesuaikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikator harus berbeda di setiap wilayahnya agar lebih sensitif di setiap daerahnya tanpa menghilangkan indikator utamanya.</li> </ul>
15	Bu Ine	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kampung KB idenya merupakan multi sektor</li> <li>• Masalah strategis yang ada di kampung KB adalah komitmen pemda terhadap kampung KB, belum maksimalnya pemanfaatan data dalam perencanaan program, integrasi program dan kegiatan lintas sector tidak sama, masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan di kampung KB.</li> <li>• Klasifikasi ini dibuat sebagai upaya meningkatkan penyelenggaraan kampung KB yang berkualitas dan komprehensif</li> <li>• Referensi Klasifikasi menggunakan <i>Institutional Development Framework (IDF)</i>. IDF dibuat untuk organisasi yang memberikan pelayanan langsung.</li> <li>• Menitikberatkan pada proses partisipatif dan mandiri karena akan dikerjakan oleh Pokja dengan menggunakan mekanisme kampung KB online.</li> <li>• Variabel : <i>Input, Process, Output</i></li> <li>• Kami mengusulkan tambahan variabel jumlah kematian ibu, bayi, angka stunting, KDRT dan usia perkawinan pertama.</li> <li>• Kami menggunakan klasifikasi menggunakan indeks, menghitung indeks dengan bobot dan bobotnya merupakan usulan dari kami.</li> <li>• Terdapat 4 tingkat penilaian dari masing-masing indicator: Kurang, Cukup, Bagus, Sangat Bagus</li> <li>• Rumus perhitungan indeks klasifikasi kampung KB akan disinergiskan di laporan kampung kb online.</li> <li>• Jenis Klasifikasi kampung KB: Dasar, Berkembang, Mandiri, Berkelanjutan</li> <li>• Tingkat penilaian dinilai oleh diri sendiri (<i>self assessment</i>)</li> <li>• Masing-masing variabel akan di totalkan lalu dibagi dengan jumlah bobot</li> <li>• Uji coba kampung KB dilakukan di 2 desa di kab. Badung, Provinsi Bali &amp; 3 desa di Kab.</li> </ul>

		<p>Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil uji coba menyatakan: Desa Penarungan &amp; Desa dalung masuk klasifikasi Berkelanjutan, sedangkan desa Jambewangi, Sumbergondo dan Wringinagung masuk kllasifikasi Dasar</li> <li>• Klasifikasi dilakukan secara mandiri dan partisipatif oleh pokja kampung KB dibantu PKB/PLKB</li> <li>• Hasil klasifikasi di laporkan ke kampung kb online dan hasilnya di verifikasi saat monev yang dilakukan oleh OPD KB, BKKBN Perwakilan Provinsi, dan BKKBN Pusat di lokus Kampung KB yang telah terklasifikasi</li> <li>• Dari 5 kampung kb yang di uji coba belum semua melaporkan online secara rutin dan lengkap.</li> <li>• Model klasifikasi kampung KB bisa diimplementasi jika: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Kampung KB online direvisi sesuai dengan matriks klasifikasi Kampung KB</li> <li>- Disepakatinya indikator, bobot, tingkat penilaian serta perhitungan indeks klasifikasi Kampung KB ditingkat BKKBN Pusat</li> <li>- Menyusun strategi penguatan Kampung KB, di berbagai tingkatan mulai dari tingkat nasional sampai desa, termasuk perangkat monitoring dan evaluasinya.</li> </ul> </li> </ul>
16	Pak Yos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rumah Data dicanangkan setahun setelah kampung KB dicanangkan</li> <li>• Permasalahannya adalah birokrasi terlalu panjang (pemilik kewenangan di pusat, pelaksana di tingkat desa), model pengelolaan melibatkan begitu banyak stakeholder.</li> <li>• Tujuan utama pengembangan system pelaporan dan evaluasi program Rumah Dataku adalah terwujudnya sistem pelaporan rumah dataku</li> <li>• Yang menjadi keterbatasan adalah keterikatannya dengan model program rumah dataku, hal ini menyebabkan metode yang dibangun tidak dapat dilepaskan dan akan sangat menyesuaikan dengan model final dari program rumah dataku</li> <li>• Kondisi saat ini terdapat 4.504 rumah data yang terbentuk. Tidak tersedianya mekanisme pencatatan, pengendalian dan evaluasi yang baik. Belum ada sistem evaluasi program</li> </ul>

		<p>berjalan dan hanya ada data kuantitatif jumlah rumah dataku, belum ada kualitas rumah dataku.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Kebutuhan evaluasi bukan hanya pada evaluasi akhir namun juga saat “proses belajar”</li> <li>•Jenis evaluasi yang berefek pada pemberdayaan pada masyarakat seperti aspek <i>capacity building</i>, kemampuan mengelola organisasi, peduli lingkungan dan pemanfaatan data.</li> <li>•Jika rumah dataku berjalan maka masyarakat bisa menjalankan program ini secara mandiri</li> <li>•Teknik pengumpulan data dengan observasi dan diskusi dengan Pengurus, OPD KB, PLKB, Perwakilan BKKBN Provinsi</li> <li>•Uji coba dilakukan di DIY, Jawa Barat dan Jambi</li> <li>•Terdapat 3 indikator uji coba: Indikator substansi, estetika, petunjuk pengisian.</li> <li>•Di lapangan kami menemukan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktur organisasi yang bervariasi. Ada yang menyatu dengan pokja, secretariat, pojok kependudukan, dan mandiri</li> <li>- Sarana atau Aset Rumah Data digunakan secara bersama</li> <li>- Status hukum Rumah Data : Ada yang diresmikan oleh provinsi, kabupaten, pejabat desa</li> <li>- Stakeholder yang sangat beragam</li> </ul> </li> <li>•Kami mengembangkan alat ukur pada identitas, informasi, pengurus, ketersediaan sarana &amp; data rumah dataku</li> <li>•Hasil uji coba di Jabar &amp; Jambi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peserta FGD kesulitan memahami pertanyaan, maka kami berikan penjelasan di petunjuk pengisian.</li> <li>- Kami juga menawarkan apakah ada yang belum dan perlu dimasukkan ternyata sudah cukup.</li> <li>- Estetikanya sudah cukup baik, rapih, dan nyaman dilihat</li> <li>- Kurang penjelasan jenis data dan pelatihan di dalam petunjuk pengisian. Petunjuk dicetak di belakang formulirnya.</li> <li>- Provinsi diharapkan bisa mensosialisasikan ke kabupaten/kotanya.</li> <li>- Kabupaten/Kota harus mensosialisasikan ke level di bawahnya, kecamatan atau PLKBnya</li> </ul> </li> </ul>
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Setelah seluruh kader rumah dataku tersosialisasi, <i>form</i> diisi lalu ditanda tangani, diverifikasi oleh PKB/PLKB, akan di verifikasi ulang oleh kecamatan, <i>diregister</i> ke kab/kota, pengawasan oleh provinsi &amp; pusat</li> <li>• Klasifikasi Rumah Data: Sederhana, Lengkap, Sempurna, Paripurna</li> <li>• Rumah data minimal memiliki papan nama, ada SK dan ada ruangnya.</li> <li>• Program Rumah Dta dilaksanakan secara nasional secara masif.</li> <li>• Sistem pelaporan yang dibuat dengan mengindahkan kenyataan lapangan</li> <li>• Keterlibatan semua <i>stakeholders</i> untuk menjaga keterikatan koordinasi</li> </ul>
17	Dinas PAPP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kampung KB &amp; Rumah Dataku sama-sama mempunyai 4 klasifikasi tetapi berbeda namanya. Saran kami, semua klasifikasi poktan KKBPK sama semua agar yang di lapangan tidak bingung.</li> <li>• Laporan GALAP kependudukannya tidak ada</li> <li>• Sistem pelaporan pembinaannya dilupakan. Dari pusat langsung ke BKKBN perwakilan, OPD provinsi dilewatkan padahal seharusnya tidak boleh. Provinsilah yang menginformasikannya ke perwakilan. Ini melanggar UU 23 tahun 2014 Yang wajib melaporkan ke BKKBN Pusat adalah OPD Provinsi bukan kab/kota.</li> <li>• Kalau semua harus ada papan nama akan penuh dengan papan nama. Saran saya, cukup 1 papan nama saja mencakup semua.</li> </ul>
18	BKKBN DIY	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klasifikasi rumah data apakah dari pusat atau dari kami?</li> <li>• Banyak sekali poktan KKBPK. Saran saya, klasifikasinya disamakan agar lebih bagus dan sederhana</li> </ul>
19	PKB DIY/Ketum Penyuluh KB Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada kontribusi kampung KB?</li> <li>• Harus ada evaluasi yang jelas sebelum dan sesudah dilaksanakan</li> <li>• Pola pembinaan kampung KB melibatkan semua instansi kab/kota, kenyataan di lapangan hanya PKB dan OPD KB. Harus dievaluasi sehingga semua dinas terkait bisa membina kampung KB</li> <li>• Anggaran Kampung KB bisa diperluas. Selama ini hanya untuk pertemuan padahal banyak kegiatan atau ide kreatif dari pengurus.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada beberapa masyarakat yang tidak menyukai kampung KB sehingga menjadi tantangan bagi kami</li> <li>• Indikator kampung KB sudah saatnya diganti. Selama ini wilayah kumuh, pengangguran, peserta KB sedikit. Kalau semakin lama semakin banyak kampung KB berarti program pemerintah tidak berhasil. Harus dipikirkan ke depannya.</li> <li>• Ada kampung KB yang tidak di anggarkan pemerintah tapi berhasil karena adanya dukungan dari masyarakat. Mereka memakai anggaran swadaya masyarakat.</li> <li>• Dengan adanya kampung kb, telah menjadi pusat perkenomian baru di suatu daerah. Ini yang diharapkan sehingga harus ada parameter yang berubah.</li> <li>• Terlalu banyak kampung-kampung (kampung kb, kampung wisata, kampung ramah anak), kenapa tidak dijadikan satu pembinaan?</li> <li>• Klasifikasi perlu sosialisasi yang mendalam kepada masyarakat khususnya PKB.</li> <li>• Harapan saya pertemuan seperti ini yang diundang PKBnya</li> <li>• Kenapa kepengurusan rumah data tidak menjadi satu dengan kepengurusan kampung KB agar tidak ada dua kepemimpinan di dalam satu lokasi</li> </ul>
20	Dinas Dukcapil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kampung KB terdapat variabel angka kelahiran dan kematian ibu dan bayi, ini sangat membantu dinas dukcapil.</li> <li>• Rumah data mempunyai data jumlah penduduk tapi ada NIK. NIK tidak boleh disebarluaskan dan ada sanksinya di UU. Boleh memakai nama, alamat dan lainnya tapi isi NIK tidak boleh karena merupakan data pribadi seseorang.</li> </ul>
21	Pak Badrun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apa dampak rumah data sebagai gambaran kampung KB?</li> <li>• Apakah ada data sosial dan ekonomi yang akan dijadikan klasifikasi kampung KB?</li> <li>• Setiap keluarga harus mempunyai dokumen data yang baik dalam 1 tempat.</li> </ul>
22	Bu Ine	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kita akan diskusikan untuk penamaan klasifikasi agar di samakan</li> <li>• Kampung KB pernah dilakukan evaluasi. Masalahnya komitmen pemerintah daerah yang belum sama, pemanfaatan belum optimal, koordinasi lintas sektor belum</li> </ul>



		<p>optimal, rendahnya partisipasi masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih ada temuan kampung KB terbentuk tapi tidak ada kegiatan, Pokja terbentuk tapi tidak ada kegiatan.</li> <li>• Klasifikasi kampung KB ini belum final. Kalau sudah final, baru di sosialisasikan.</li> <li>• Beberapa kampung KB menjadi desa yang bagus dan pertumbuhan ekonominya menjadi baik sehingga bisa dikategorikannya berhasil.</li> <li>• Masih menunggu usulan yang mengacu RPJMN</li> <li>• Usulan indikator sosial ekonomi akan di diskusikan</li> </ul>
23	Pak Yos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paripurna muncul di renstra, akan kami sampaikan usulan kesamaan nama</li> <li>• Persyaratan untuk masuk komponen sistem dengan standar SIGA</li> <li>• Tahapan sosialisasi dan pelaporan OPD Provinsi menjadi terlupakan, kami sampaikan permohonan maaf. Tindak lanjutnya akan kami sesuaikan.</li> <li>• Kebijakan daerah tentang pemaduan papan nama di kampung KB dan Rumah Data disesuaikan dengan kondisi yang ada di DKI.</li> <li>• Untuk saran-saran dengan PKB Jogja, banyak keterbatasan dari kebijakan .</li> <li>• Kami ada keterikatan dengan kebijakan yang sudah ada sebelumnya, selanjutnya harus lebih banyak forum yang melibatkan PLKB/PKB dan pengguna langsung untuk diajak diskusi.</li> <li>• NIK dibutuhkan untuk kepastian kader berasal dari wilayah tersebut bukan untuk dipublikasikan.</li> <li>• Kader punya kapasitas sangat terbatas, maka data yang mereka hasilkan pun sangat terbatas. Kami berharap masyarakat dapat mendukung program</li> <li>• <i>Family folder</i> memang harus disikapi dan kami berharap dapat di realisasikan di setiap keluarga.</li> </ul>
24	Bu Oce	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyajian hari ini, dua duanya adalah pengembangan yang belum final.</li> <li>• Dua narasumber disini harus diskusi bersama atas masukan-masukan yang disampaikan peserta.</li> <li>• Pelatihan tentu akan dilakukan oleh BKKBN bagi petugas lapangan terkait</li> <li>• Berdasarkan yang disampaikan PKB tadi,</li> </ul>

		<p>sektor yang masuk tidak melakukan implementasi hanya menjadi narasumber akan kami cari solusinya. Semua sektor yang ada harus masuk sama sama untuk melaksanakan program.</p>
25	Pak Taufik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kita mendapatkan informasi tentang penyediaan sistem informasi peringatan dini agar <i>concern</i> aspek kependudukan dalam membuat kebijakan di sektor masing-masing</li> <li>• Dalduk dipercaya menjadi koordinator penyelenggaraan untuk mengharmonisasi kebijakan, pelaksanaan, pengawasan, dan monitoring.</li> <li>• Semoga Bapak/Ibu bisa memahami dan dapat menindak lanjuti baik dari sisi masukan hasil kajian dan secara teknis. Kami masih membuka masukan hingga akhir tahun ini, setelah itu akan kami publikasikan. Dengan publikasi kami berharap Bapak/Ibu dapat mensosialisasikan ke mitra kerja terkait.</li> </ul>

## DOKUMENTASI





**NOTULEN RAPAT KEDEPUTIAN  
PENJAJAKAN JABATAN FUNGSIONAL**

Hari/Tanggal : Kamis, 14 November 2019

Tempat : Ruang Operasional

Pimpinan : Dra. Hitima Wardhani, MPH

NO	PEMBAHAS	KETERANGAN
1	Ibu Hitima	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertemuan hari ini bertujuan untuk menindak lanjuti pertemuan lalu dengan mengundang pakar dari Kemenpan RB dan BKN untuk bisa secara bersama-sama mendiskusikan langkah-langkah yang perlu kita lakukan selanjutnya.</li> <li>• Latar belakang pertemuan ini adalah tindak lanjut dari pertemuan diskusi tentang jabatan fungsional di lingkungan dalduk.</li> <li>• Dari pertemuan yang lalu telah disepakati bahwa BKKBN akan melakukan pemetaan dan mengidentifikasi jabatan fungsional apa yang bisa diduduki dan perlukah membuat jabatan fungsional yang baru.</li> <li>• Tujuan pertemuan hari ini adalah membuat <i>time table</i> yang jelas untuk mempermudah kita dalam melaksanakan kegiatan, membuat tim kecil, pemetaan kebutuhan dan identifikasi jenis jabatan fungsional.</li> <li>• Catatan pertemuan yang lalu adalah sebagai berikut:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Arahan dari Kemenpan dari yang sebelumnya 4 <i>layer</i> menjadi 2 <i>layer</i></li> <li>2. Kemenpan sedang mempersiapkan surat untuk K/L agar segera melakukan pemetaan.</li> <li>3. Jika BKKBN mempunyai usulan jabatan yang dibutuhkan, silahkan infokan ke Kemenpan dengan alasan yang jelas dan tepat.</li> <li>4. Ada beberapa kriteria untuk jabatan yang bisa dialihkan, maka perlu dipetakan dengan baik</li> <li>5. Jangan sampai ada yang tidak bekerja karena tidak sesuai dengan uraian</li> </ol> </li> </ul>

		<p>kerjanya</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Jabatan fungsional membutuhkan kompetensi tertentu dalam pelaksanaan</li> <li>7. Jabatan fungsional harus bisa dijenjangkan</li> <li>8. Standar kompetensi untuk masing-masing jabatan akan berbeda</li> <li>9. Konsep harus dipertegas (nama, <i>urgency</i>, tugas)</li> <li>10. Jabatan fungsional harus disepakati dahulu di lingkungan BKKBN baru diusulkan ke Kemenpan (harus satu suara)</li> <li>11. Diberikan waktu sampai bulan Juni 2020</li> <li>12. Telah diusulkan dua jabatan : Analisis kependudukan dan pengelola kependudukan</li> <li>13. Pemetaan Jabatan fungsional dilakukan menggunakan lembar pemetaan</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teman teman semua juga sudah membuat usulan ke bipeg tentang jabatan fungsional yang dibutuhkan masing-masing komponen. Semoga usulan tersebut bisa kita diskusikan bersama nantinya dan akan mendapatkan arahan dari Bapak Sudibyو sebagai pakar.</li> </ul>
2	Pak Sudibyو	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dari Kemenpan harus sudah menyampaikan pemetaan pada akhir Desember tetapi pengalihannya baru dimulai bulan Juni 2020. Tolong diantisipasi oleh teman-teman semua.</li> <li>• Saya sudah melihat ada banyak usulan dari teman-teman semua, mungkin nanti bisa digunakan.</li> <li>• Yang perlu dipikirkan nanti adalah apakah kita membuat jabatan fungsional khusus dalduk atau dengan KB juga. Saya berharap kependudukan bisa berdiri sendiri supaya ada ciri khusus di BKKBN dan menjadi salah satu <i>vocal point</i> BKKBN</li> <li>• Untuk <i>refresh</i> kembali, jabatan fungsional akan didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rumpun jabatannya berhubungan dengan pelaksanaan penelitian, pengembangan konsep, dan metode operasional serta penerapan ilmu pengetahuan.</li> <li>• Menristekdikti sudah menempatkan kependudukan dibawah ilmu sosial dan sudah dikelompokan kependudukan dengan catatan sipil dan Mendagri sebagai pembinanya. Padahal saya berharap kependudukan bisa berdiri sendiri dan dikelola sendiri oleh BKKBN.</li> <li>• Saya berharap deputi bisa dibagi menjadi dua, keluarga berencana dengan kesehatan reproduksi dan kependudukan.</li> <li>• Jabatan fungsional terampil terdiri dari pelaksana pemula, pelaksana, pelaksana lanjutan dan penyelia</li> <li>• Jabatan fungsional ahli terdiri dari ahli pertama, ahli muda, ahli madya dan ahli utama.</li> <li>• Keterampilan lebih kearah pelaksana sedangkan administrasi dan sebagainya bisa masuk ke arsiparis, pustakawan, pranata computer, dll. Tinggal dilihat uraian jabatannya.</li> <li>• Cara berfikirnya harus komprehensif untuk seluruh BKKBN supaya kita semua tahu bisa pindah jabatan fungsional yang mana</li> <li>• Berdasarkan lingkungan kerja dan kompleksitas, kependudukan ini sangat kompleks karena banyak elemen berbeda yang sering berubah dan tidak terduga. Ada ketidakpastian yang cukup tinggi yang menjadikan tidak stabil. Tidak hanya disebabkan oleh satu faktor tetapi juga disebabkan oleh banyak faktor.</li> <li>• Contoh dari lingkungannya berubah seperti di Bali, Gubernur Bali menolak program 2 anak cukup, beliau menginginkan 4 anak. Dengan bergantinya gubernur berganti pula kebijakannya. Hal ini yang menyebabkan menjadi tidak terduga dan perubahannya tidak dapat diprediksi.</li> <li>• Jabatan fungsional melibatkan beberapa elemen dengan pola keterkaitan yang</li> </ul>
--	---

		<p>bersifat sistemik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pekerjaan jabatan fungsional bersifat dinamis dan berubah.</li> <li>• Perlu penyiapan alternatif untuk mengantisipasi dinamika yang terjadi.</li> <li>• Kepentingan yang berkaitan dengan pengendalian penduduk merupakan kepentingan jangka menengah dan jangka panjang. Kependudukan tidak mungkin di proyeksikan dalam 1 atau 2 tahun.</li> <li>• Oleh karena itu saya usulkan kependudukan harus dipisahkan dengan urusan KB, karena KB bisa diprediksi dalam jangka waktu bulanan atau 1 tahun sedangkan kependudukan tidak bisa.</li> <li>• Yang membuat saya ragu-ragu dan bingung adalah nomer 1 dan 2 pada tabel stabilitas pekerjaan tidak bisa dikombinasikan padahal pengendalian penduduk berubah dengan cepat. Yang kedua, pelaksanaan pekerjaan menggunakan mesin dan peralatan yang sama, dan tidak terlalu sensitif terhadap adaptasi kemajuan teknologi. Pengendalian penduduk berubah secara dinamis tetapi alatnya masih bisa dipakai.</li> <li>• Usulan jabatan fungsional nantinya akan dituangkan dalam tulisan. Oleh karena itu, harus diuraikan agar orang-orang mengerti dan di dalam naskah akademik orang bisa membaca dan bisa memilih jabatan fungsional mana yang cocok dengan orang tersebut.</li> <li>• Jabatan fungsional membutuhkan analisis dan pengetahuan dengan tingkat pemikiran yang spesifik. Walaupun dengan analisis tinggi tetapi tetap membutuhkan pedoman/panduan.</li> <li>• Permasalahan PNS adalah kurang memperhitungkan manajemen resiko. Jika struktural merasa nyaman dengan kerjanya, saat diganggu/dirubah sedikit maka akan kacau</li> <li>• Pada <i>talent mapping</i> jabatan fungsional akan terlihat hubungan antara <i>performance</i> dan kompetensinya.</li> </ul>
--	--	---



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian penduduk pendekatannya selalu berbeda karena provinsi/kabupaten selalu berbeda <i>treatmentnya</i>.</li> <li>• Pada jabatan fungsional keahlian bidang pengendalian penduduk terdapat analisis, perancangan, assesmen/penilaian dan pembimbingan</li> <li>• Pada jabatan fungsional keterampilan terdapat teknis manajerial, administrasi, interaksi/komunikasi, dan analitis</li> <li>• Keputusan apakah jabatan fungsional yang diambil adalah keahlian saja atau diambil keterampilan juga adalah keputusan pimpinan.</li> <li>• Rancangan teknokratik kependudukan kita dibawah Kemendagri.</li> <li>• Saya menginginkan BKKBN mempunyai ahli supaya BKKBN ada ciri khasnya sebagai pembina kependudukan. Jangan hanya di Kemendagri saja. BKKBN harus tetap <i>exist</i>.</li> <li>• Usulan saya adalah jabatan fungsional <b>Analisis Pengelolaan Pengendalian Penduduk</b>. Bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan pengendalian penduduk pada satuan kerja K/L sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rumpun ilmu sosial : studi kependudukan dan pencatatan sipil</li> <li>- Standar kompetensi : pengetahuan, keahlian, dan perilaku kerja tertentu</li> <li>- Meliputi pengembangan model kependudukan, perancangan kependudukan, pembimbingan kependudukan dan analisis dampak dalduk.</li> <li>- Berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengelolaan pengendalian penduduk pada instansi pusat dan vertikal (perwakilan)</li> <li>- Membutuhkan sertifikat kompetensi dan karya tulis jabatan fungsional yang diberikan oleh K/L yang berwenang.</li> <li>- Jenjang jabatan : analisis pengelolaan</li> </ul> </li> </ul>
--	---

		<p>pengendalian penduduk ahli pertama, ahli muda dan ahli madya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika pada suatu unit kerja tidak terdapat analisis pengelolaan pengendalian penduduk untuk melaksanakan kegiatan yang semestinya, maka analisis pengelolaan pengendalian penduduk yang berada satu tingkat diatas atau dibawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan dan akan mendapatkan angka kredit.</li> <li>• Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap analisis pengelolaan pengendalian penduduk wajib mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan daftar usulan penilaian angka kredit (DUPAK)</li> </ul>
	Ibu Hitima	<p>Arahan dari bapak Sudibyو sudah sangat detail.</p> <p>Dalam melakukan pemetaan harus secara komprehensif (seluruh BKKBN) sehingga BKKBN mempunyai ciri khusus. Untuk sesi selanjutnya adalah diskusi. Berdasarkan arahan tadi, jika ada pemikiran lain bisa disampaikan dalam rapat ini. Untuk kesempatan pertama, kepada biro kepegawaian dipersilahkan.</p>
	Pak Ngadimo	<p>Jabatan fungsional harus dilihat secara <i>holistic</i>. Banyak usulan jabatan fungsional yang sama dengan kementerian atau lembaga lain, jangan sampai BKKBN kalah duluan dengan K/L lain dalam mengusulkan jabatan fungsionalnya.</p>
	Pak Mustakim	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saya <i>sharing</i> pengalaman saja, dulu saya pernah menjadi PKB karena kata orang-orang mudah untuk naik golongan karena memakai angka kredit. Saat menjadi PKB saya mengusulkan angka kredit sampai 20 tetapi tidak dipercaya oleh tim penilai dan hanya dianggap 5. Teman-teman lain juga mengusulkan banyak angka kredit tetapi yang dipercaya hanya sedikit.</li> <li>• Permasalahan disini adalah BKKBN membutuhkan banyak fungsional tapi</li> </ul>

		<p>apakah pegawai BKKBN mau atau tidak melaksanakannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usul saya analisis dibuat sedikit saja untuk di kantor misal analisis kependudukan 5 orang, analisis KB 5 orang, sisanya dijadikan penyuluh karena PKB sangat dibutuhkan tetapi tunjangannya dinaikkan.</li> <li>• Kalau memang harus dijadikan jabatan fungsional semoga bisa tercapai tujuannya dengan baik. Jangan sampai berhenti di tengah jalan karena kebingungan sehingga tidak tercapai tujuannya.</li> <li>• Jika semua dijadikan jabatan fungsional, disiapkan dahulu penilainya. Jangan sampai sudah ada jabatan fungsional tetapi tidak ada penilainya atau penilainya tidak mengerti.</li> </ul>
	Pak Adit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kenapa angka kredit susah diterima? Karena pekerjaan PKB tidak bisa dilaksanakan di desa. Jangan sampai mau naik golongan tetapi pekerjaannya sulit</li> <li>• Kalau kependudukan bekerja seperti yang dijelaskan tadi, apakah akan bentrok dengan yang sudah ada seperti analisis kebijakan.</li> <li>• Kita harus lihat lagi uraian jabatan ahli pertama dan ahli utamanya.</li> <li>• Untuk terampil mungkin tidak dipakai di kependudukan, mungkin bisa dialihkan ke bagian sestama.</li> <li>• Eselon 3,4,5 tetap ada untuk menilai DUPAK di kedepuitian dalduk</li> </ul>
	Pak Kukuh	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menurut saya yang harus menjadi perhatian utama disini adalah bagaimana kita mencoba menyusun pemetaan jabatan fungsional di kependudukan.</li> <li>• Teman-teman telah menyusun tuis di masing-masing direktorat. Uraian kegiatan harus disusun secara lebih rinci. Dari situ akan muncul apakah kita membutuhkan analisis kependudukan atau perencanaan kependudukan atau lainnya.</li> <li>• Bagaimana cara kita menguraikan kegiatan jabatan fungsional, dari apa yang kita uraikan akan diklasifikasikan. Dari situ</li> </ul>

		<p>baru munculah kebutuhan jabatan fungsionalnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masalah stabil dan tidak stabil yang tadi disampaikan mungkin bisa dikerjakan setelah kita menguraikan jabatan fungsional agar memudahkan pak Sudibyo juga.</li> </ul>
	Ibu Hitima	<p>Untuk masalah kenapa harus ada analisis kependudukan karena pak Aidu kemarin bilang bahwa PKB tidak terbiasa menulis sehingga itu bisa menjadi tugas kita.</p>
	Pak Dibyo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pak Ngadimo mengingatkan kita bahwa membuat jabatan fungsional harus melihat secara <i>holistic</i>.</li> <li>• Secara umum, kita harus mempunyai jabatan fungsional yang ada di bawah kendali kita agar kantor kita tetap <i>exist</i> dan kantor kita menjadi penting.</li> <li>• Kalau bisa ada juga analisis keluarga karena sudah disebutkan bahwa kita mengurus pembangunan keluarga.</li> <li>• Kita menghindari jabatan yang sama dengan K/L lain tapi pasti tetap ada yang bersinggungan.</li> <li>• Harus ada struktural yang membantu di setiap bawah eselon 2. Seperti di kanwil paling tidak ada 2 struktural dibawahnya yaitu sekretaris dan bagian program, kalau tidak ada akan sangat repot sekali.</li> <li>• Kalau sama sekali tidak ada jabatan fungsional di kantor, kita akan ketergantungan dengan K/L lain.</li> <li>• Masalah penilaian angka kredit jabatan fungsional tidak dipercaya karena yang menilai adalah struktural. Struktural saja naik 4 tahun sekali sedangkan fungsional bisa dalam waktu 2 tahun. Seharusnya yang menilai juga dinilai atau yang menilai mempunyai jabatan yang paling tinggi/jabatan yang sudah tidak bisa naik lagi.</li> <li>• Tanggapan untuk pernyataan pak Adit, memang kalau baru pasti ragu-ragu tapi harus tetap kita lalui dengan harapan tujuan kita tercapai dan sukses.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanggapan untuk pak Kukuh, kita pasti sudah tahu pekerjaan dan tusi kita, jadi kita pasti sudah tahu kekompleksitasan pekerjaan kita. Jadi nanti uraian jabatannya bisa mengikuti setelahnya.</li> <li>• Yang telah saya presentasikan tadi hanya rancangan saja. Nanti teman-teman yang memperdalamnya.</li> <li>• Silahkan diputuskan oleh teman-teman semua apakah teman-teman mau menguraikannya secara rinci atau besarnya saja (secara global) tapi dikasih lampiran apa yang harus dikerjakan.</li> <li>• Struktural tetap ada untuk membantu eselon 2. Jangan sampai kosong semua.</li> </ul>
	Bu Ani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yang perlu dipikirkan adalah pembobotan untuk dupaknya.</li> <li>• Perlu dipikirkan pola karirnya seperti apa? Misal PKB harus menulis tetapi keberadaannya masih di desa.</li> <li>• Peningkatan pola karir juga harus dipikirkan, pelatihan-pelatihan apa saja yang harus dilakukan</li> <li>• Rumusan di uraian kerjaan tidak rinci, teman-teman bisa memberi masukan apa yang sudah dilakukan di masing-masing direktoratnya.</li> </ul>
	Pak dibyo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemetaan harus segera dilaksanakan karena bulan Desember harus sudah diusulkan ke Menpan</li> <li>• Rinci dan global yang disampaikan tadi untuk penyiapan surat keputusannya supaya dapat angka kreditnya lebih mudah.</li> <li>• Pembimbingan bisa terkait dengan pendidikan, penyuluh, dan lain-lain.</li> <li>• Jangan membayangkan akan menetap di satu tempat. Bayangkan saja kita akan berpindah-pindah sehingga kita siap dengan segala kemungkinan yang ada.</li> <li>• Saya minta tolong dipisahkan antara keluarga, KB dan kependudukan.</li> <li>• Pimpinan tolong loby dengan Kemenpan RB agar mereka lebih cenderung ke kita untuk masalah administrasinya, jangan</li> </ul>

		kependudukan secara umum.
	Ibu Hitima	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kita masih perlu melakukan pertemuan-pertemuan selanjutnya dan kami berharap bapak sudibyو tetap memberi bimbingan kepada kami</li> <li>• Target penyelesaian pemetaan adalah bulan Desember 2019 dengan diperkuat oleh naskah akademis yang akan kita susun bersama-sama</li> <li>• Besok atau sebelum ibu deputi kembali, kita harus sudah menyusun tim kecil dan merancang kegiatan. Awal desember bisa melakukan langkah konkritnya.</li> <li>• Besok kita akan membuat tim kecil dan perencanaan secara detail tentang apa yang harus dilakukan.</li> <li>• Masing-masing komponen harus menyusun strategi terkait program dan anggarannya.</li> </ul>

**Kesimpulan :**

1. Pemetaan jabatan fungsional harus sudah diselesaikan dan diserahkan ke Kemenpan RB pada bulan Desember 2019
2. Pengalihan jabatan fungsional baru akan dimulai pada bulan Juni 2020.
3. Jabatan fungsional terampil terdiri dari pelaksana pemula, pelaksana, pelaksana lanjutan dan penyelia. Jabatan fungsional ahli terdiri dari ahli pertama, ahli muda, ahli madya dan ahli utama
4. Usulan jabatan fungsional nantinya akan dituangkan dalam tulisan. Oleh karena itu, harus diuraikan agar orang-orang mengerti, bisa membaca dan bisa memilih jabatan fungsional mana yang cocok dengan orang tersebut pada naskah akademik
5. Jabatan fungsional membutuhkan analisis dan pengetahuan dengan tingkat pemikiran yang spesifik. Walaupun dengan analisis tinggi tetapi tetap membutuhkan pedoman/panduan.
6. Usulan dari Bapak Sudibyو tolong dipisahkan antara keluarga, KB dan kependudukan.
7. Usulan dari Bapak Sudibyو adalah jabatan fungsional Analisis Pengelolaan Pengendalian Penduduk. Bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan pengendalian penduduk pada satuan kerja K/L sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.
8. Jika pada suatu unit kerja tidak terdapat analisis pengelolaan pengendalian penduduk untuk melaksanakan kegiatan yang semestinya, maka analisis

pengelolaan pengendalian penduduk yang berada satu tingkat diatas atau dibawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan dan akan mendapatkan angka kredit.

9. Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap analis pengelolaan pengendalian penduduk wajib mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan daftar usulan penilaian angka kredit (DUPAK)
10. Kalau bisa adakan analisis keluarga karena sudah disebutkan bahwa kita mengurus pembangunan keluarga.
11. Struktural tetap ada untuk membantu eselon 2. Jangan sampai kosong semua.

**Rencana Tindak Lanjut:**

1. Akan diadakan pertemuan pada hari Jum'at, 15 November 2019 untuk membuat tim kecil dan merancang kegiatan. Awal Desember bisa melakukan langkah konkritnya.
2. Masing-masing komponen harus menyusun strategi terkait program dan anggarannya.

## DOKUMENTASI





### HASIL KERJA RAPAT ANALISIS JABATAN PELAKSANA

Hari/Tanggal : 25-27 November 2019

Tempat : Ruang Serbaguna

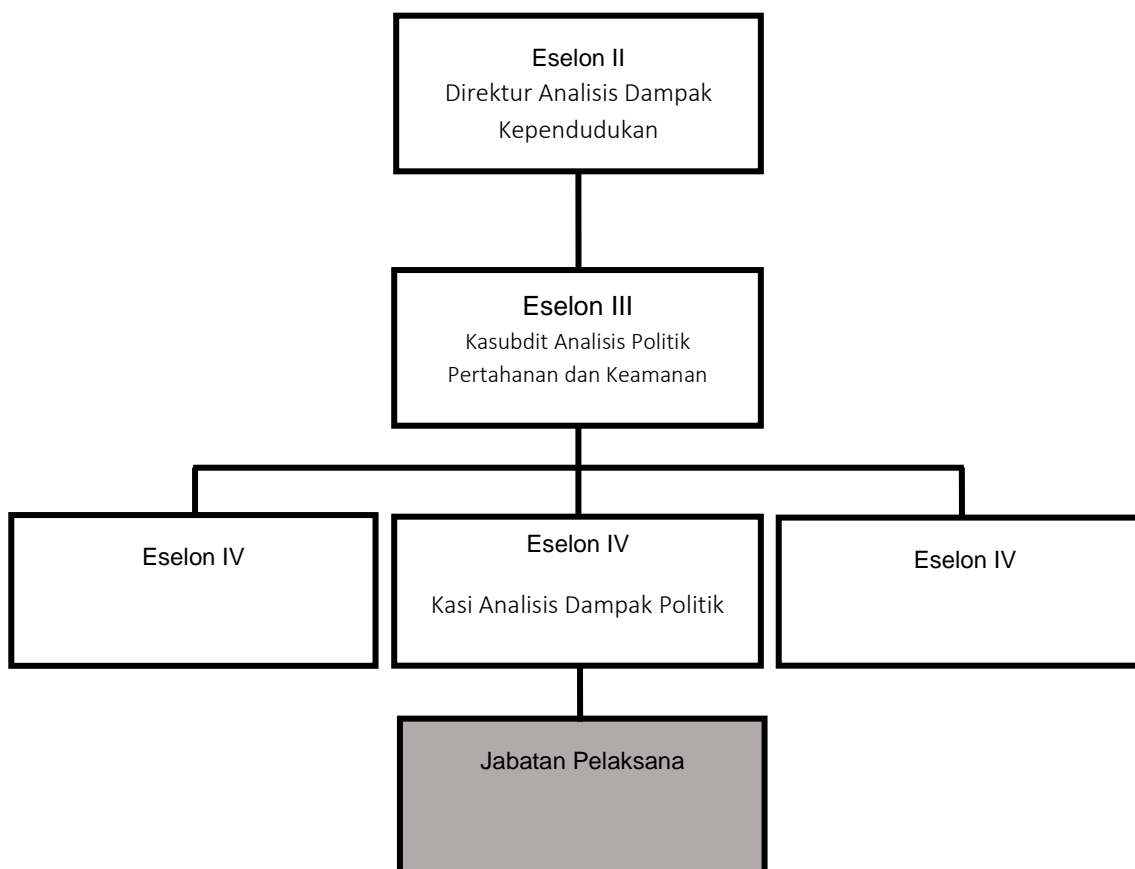
---

NO	Nama	Jabatan Saat Ini	Eselon IV	Jabatan di Permenpan 41
1	NIKEN ARUMSARI, S.Sos.	Analisis Politik	Seksi Analisis Politik	Analisis Politik Hukum dan Keamanan
2	NOVIE PANDA CITRA, S.Sos	Penyusun Bahan Daya Dukung Lingkungan	Seksi Analisis Daya Dukung Lingkungan	Penyusun Bahan Data Kependudukan dan Keluarga Berencana
3	RACHMA DWI ARDIYANA, S.Kom	Analisis Sosial	Seksi Analisis Sosial	Analisis Politik Hukum dan Keamanan
4	SUHARTATI	Analisis Daya Tampung Lingkungan	Seksi Analisis Daya Tampung Lingkungan	Pengadministrasi Kependudukan
5	DEVI NOVITASARI, S.E	Analisis SDM Aparatur	Seksi Analisis Daya Dukung Lingkungan	Tetap
6	ENDAH LARASATI, S.Sos	Penyusun Bahan Dampak Ekonomi	Seksi Analisis Ekonomi	Penyusun Bahan Data Kependudukan dan Keluarga Berencana
7	NURUL SAFITRI , S.Kesos	Penyusun Bahan Data Kependudukan dan Keluarga Berencana	Seksi Analisis Sosial	Tetap
8	SUMARDI	Pemelihara Dokumen Analisis Politik	Seksi Analisis Politik	Pengadministrasi Kependudukan

### FORMULIR INFORMASI JABATAN

1. Nama Jabatan : Analis Politik (SIMSDM-Bipeg)  
Analis Kependudukan dan KB (SK)  
Analis Politik Hukum dan Keamanan (Permenpan No. 41)
2. Kode Jabatan : -
3. Unit Organisasi  
Eselon II : Direktur Analisis Dampak Kependudukan  
Eselon III : Kasubdit Analisis Politik Pertahanan dan Keamanan  
Eselon IV : Kasi Analisis Dampak Sosial

Kedudukan Dalam Struktur Organisasi : (gambaran struktur)



4. Ikhtisar Jabatan :

Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang politik hukum dan keamanan

Uraian Tugas:

- a. Mengumpulkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang analisis dampak kependudukan terhadap politik hukum dan keamanan

Tahapan :

1. Mengumpulkan bahan/materi masukan untuk perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang analisis dampak kependudukan terhadap politik hukum dan keamanan.
2. Membantu melakukan koordinasi dengan komponen lain dalam rangka mengumpulkan bahan masukan untuk perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang analisis dampak kependudukan terhadap politik hukum dan keamanan.
3. Membantu melakukan koordinasi dengan komponen terkait dan mitra dalam rangka penyusunan bahan masukan untuk perumusan dan pelaksanaan terhadap kebijakan teknis di bidang analisis dampak kependudukan terhadap politik hukum dan keamanan.
4. Membantu menyusun bahan-bahan yang sudah dikumpulkan dan merangkumnya menjadi usulan bahan masukan untuk perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang analisis dampak kependudukan terhadap politik hukum dan keamanan kemudian menyerahkannya kepada atasan langsung.
5. Membantu menyiapkan penyelenggaraan pertemuan dalam rangka masukan untuk perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang analisis dampak kependudukan terhadap politik hukum dan keamanan.

- b. Membantu mengumpulkan konsep bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang analisis dampak kependudukan terhadap politik hukum dan keamanan.

Tahapan :

1. Mengumpulkan bahan/materi yang diperlukan dalam penyusunan konsep draft NSPK di bidang analisis dampak kependudukan terhadap analisis dampak kependudukan terhadap politik hukum dan keamanan.
2. Membantu persiapan penyelenggaraan pertemuan penyusunan NSPK di bidang analisis dampak kependudukan terhadap analisis dampak kependudukan terhadap politik hukum dan keamanan.
3. Membantu melakukan koordinasi dengan komponen terkait dan mitra dalam menyiapkan penyelenggaraan pertemuan penyusunan NSPK di bidang analisis dampak kependudukan terhadap politik hukum dan keamanan.
4. Membantu mengumpulkan bahan/materi sosialisasi NSPK di bidang analisis dampak kependudukan terhadap politik hukum dan keamanan.

- c. Mengumpulkan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang analisis dampak kependudukan terhadap politik hukum dan keamanan.

Tahapan :

1. Mengumpulkan konsep bahan/materi yang diperlukan dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang analisis dampak kependudukan terhadap politik hukum dan keamanan.
2. Membantu menyiapkan bahan penyelenggaraan pertemuan dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang analisis dampak kependudukan terhadap politik hukum dan keamanan kepada atasan langsung.

3. Membantu melakukan koordinasi dengan komponen terkait dan mitra dalam penyiapan penyelenggaraan pertemuan dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi.
4. Membantu persiapan bahan umpan balik kepada mitra dan sektor tentang hasil bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang analisis dampak kependudukan terhadap politik hukum dan keamanan

d. Menerima pendelegasian tugas dari atasan dalam berbagai kegiatan.

Tahapan :

1. Melakukan pengumpulan bahan/materi yang berkaitan dengan tugas yang akan dikerjakan.

5. Bahan Kerja:

No	Bahan Kerja	Penggunaan Dalam Tugas
1.	SOP	sebagai acuan dalam melaksanakan pekerjaan
2.	Pedoman (Perka, Perpres, Kepres)	
3.	Panduan	
4.	Data-data pendukung	

6. Perangkat/Alat Kerja:

No	Perangkat Kerja	Digunakan Untuk Tugas
1.	PC	Sebagai pendukung kelancaran dalam menyelesaikan pekerjaan
2.	Laptop	
3.	In focus	
4.	Kursi	
5.	Meja	
6.	Printer & Scan	
7.	ATK & Mesin Fotokopi	

7. Hasil Kerja:

No	Hasil Kerja 1)	Satuan Hasil 2)
1.	Dokumentasi dalam bentuk file	
2.	Arsip bahan atau materi	-

8. Tanggung Jawab:

- a. Pengumpul bahan untuk perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis.
- b. Koordinator dengan komponen lain.
- c. Penyusun bahan masukan untuk perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis.
- d. Penyiap penyelenggaraan pertemuan dalam rangka penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis.
- e. Pengumpul dan penganalisa bahan/materi yang diperlukan dalam penyusunan konsep draft NSPK.
- f. Koordinator.
- g. Pengumpul bahan/materi.
- h. Koordinator.
- i. Pelaksana tugas.
- j. Pemberi laporan.

9. Wewenang:

- a. Mengumpulkan bahan persiapan perumusan dan pelaksana kebijakan teknis.
- b. Membantu mengkoordinasikan dengan komponen lain.
- c. Membantu mengumpulkan bahan masukan.
- d. Membantu menyediakan bahan-bahan penyelenggaraan pertemuan
- e. Membantu mengumpulkannya bahan/materi yang diperlukan dalam penyusunan konsep draft NSPK.
- f. Membantu mengkoordinir pelaksanaan pertemuan dengan komponen dan mitra untuk penyusunan NSPK di bidang analisis dampak kependudukan terhadap politik hukum dan keamanan.
- g. Membantu menyediakan konsep bahan/materi yang diperlukan.
- h. Membantu menyediakan bahan penyelenggaraan pertemuan.
- i. Membantu mengkoordinasikan dengan komponen terkait dan mitra.
- j. Membantu menyediakan bahan umpan balik.

- k. Membantu mengumpulkan bahan/materi.
- l. Membantu melaksanakan aktifitas yang didelegasikan.

10. Korelasi Jabatan:

No	Jabatan	Unit Kerja/ Instansi	Dalam Hal
1.	Pejabat eselon IV	Direktorat di lingkungan Kedeputian Bidang Pengendalian Penduduk;  Pusat Penelitian dan Pengembangan dan Pusat Pelatihan di lingkungan kedeputian Pelatihan dan Pengembangan;  Direktorat Perencanaan Anggaran	Koordinasi
2	Sesama Pelaksana	Seluruh komponen	Koordinasi

11. Kondisi Lingkungan Kerja:

No	Aspek	Faktor
1.	Tempat kerja	Cukup
2.	Suhu	Panas dan variasi Dingin
3.	Udara	Bersih
4.	Keadaan Ruangan	Cukup
5.	Letak	Cukup
6.	Penerangan	Cukup
7.	Suara	Cukup

8.	Keadaan tempat kerja	Cukup
9.	Getaran	Cukup

12. Resiko Bahaya:

No	Fisik / Mental	Penyebab
1.	Gangguan Mata	Radiasi Komputer
2.	Stress	Lingkungan kerja tidak kondusif dan birokrasi yang rumit
3.	Kelelahan	Melebihi porsi kerja yang seharusnya
4.	Cacat	Kecelakaan

13. Syarat Jabatan:

- a. Pangkat/Gol. Ruang : minimal penata muda/III a
- b. Pendidikan : S-1 (strata – satu)/ D-4 (diploma-empat)
- c. Kursus/Diklat
  - 1) Penjurusan : Pelatihan Dasar CPNS
  - 2) Teknis : Diklat Teknis Program KKBPK
- d. Pengalaman kerja :-
- e. Pengetahuan kerja : Program KKBPK
- f. Keterampilan kerja : 1) Mahir mengoperasikan perangkat komputer;  
2) Mampu meng-input data;  
3) Tertib administrasi (arsip dan dokumentasi)
- g. Bakat Kerja :
  - 1) Numerik
  - 2) Intelektual
  - 3) Ketelitian
  - 4) Verbal
- d. Temperamen Kerja:
  - a. Mampu menerima instruksi dalam hal pelaksanaan pekerjaan
  - b. Mampu melaksanakan kegiatan yang berulang-ulang
  - c. Mampu melaksanakan tugas yang berbeda



- e. Minat Kerja:
- a) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan data
  - b) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan orang lain
  - c) Melakukan kegiatan yang rutin dan teratur
- f. Upaya Fisik :
- 1) Duduk : 70%
  - 2) Berdiri : 10%
  - 3) Berjalan : 20%
- g. Kondisi Fisik :
- 1) Jenis Kelamin : wanita/laki-laki
  - 2) Umur : 25 s.d 53
  - 3) Tinggi badan : -
  - 4) Berat badan : -
  - 5) Postur badan : -
  - 6) Penampilan : -
- h. Fungsi Pekerjaan :
- a) -
  - b) -
  - c) dst

14. Prestasi Kerja yang diharapkan

No	Satuan Hasil1	Jumlah Hasil (Dalam 1 Tahun)	Waktu Penyelesaian 2)
1.	-	-	-
2.	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	Dst	dst	Dst

(NB : Sesuaikan dengan hasil Kerja)

15. Butir Informasi Lain :

.....  
.....

2019

Mengetahui Atasan Langsung

R.R Endang Wulandari, S.E

Jakarta,..... Desember

Yang membuat

Niken Arumsari, S.Sos

## DOKUMENTASI



## DAFTAR HADIR

DAFTAR HADIR			
Penyusunan Analisa Jabatan Pelaksana			
Tanggal : 27 November 2019			
NO	NAMA	KOMPONEN	TANDA TANGAN
1			
2	Nurmuhammad Idris	Ditaman	
3	Rosa Wijayanti H	BKPP	
4	Maria Nurul Hani	BKPP	
5	Budi Murni	Ditaman	
6	Anandika	Demas	
7	Banikahati S.P.	Demas	
8	Triyana Purwati	BKPP	
9	DINA TRI S.	PUSDA	
10	Pada	Pada	
11	B. ROSE FIDELIS, W.	Demas	
12	TUSOK SOROKO	"	
13	DEVI HARTASARI	"	
14	GRACELYNNA WAREPATTU	Demas	
15	Dani Utama	Demas	
16	Erika Herly	Demas	
17	Fitria	Demas	
18	Ti Hasti G.P.	Demas	
19	Vita	Demas	
20	Alfar	Demas	
21	Kartika R.	Demas	
22	Winda L.	Demas	
23	Setyawati	PUSDA	
24	M. Yusuf	PUSDA	
25	Yenni P.	Demas	
26	Yenni P.	Demas	

DAFTAR HADIR			
Penyusunan Analisa Jabatan Pelaksana			
Tanggal : 27 November 2019			
NO	NAMA	KOMPONEN	TANDA TANGAN
26	Latana	Demas	
27	Bagus Hartono	Demas	
28	Bardono	Demas	
29	Laili Puri	Demas	
30	Martina	Demas	
31	Rama Darmasanti	Demas	
32	Fitria Ramadhani	Demas	
33	Milla Y.	Demas	
34	Fakhri P.	Demas	
35	Eranda	Demas	
36	Dina	Demas	
37	M. Rizaldi	Demas	
38	Kristia Aida	Demas	
39	Aida Desvianah	Demas	
40	Latana	Demas	
41	Mitha Rizki	Demas	
42	Fitria Hartono	Demas	
43	Winda	Demas	
44	Winda A	Demas	
45	P. N. Susanto	Demas	
46	W. A. H. H.	Demas	
47	A. H. H.	Demas	
48	H. H.	Demas	
49	H. H.	Demas	
50	Kartika P.	Demas	

## NOTULENSI RAPAT PENYUSUNAN KLASIFIKASI KAMPUNG KB

Hari/Tanggal : Selasa, 19 November 2019

Tempat : Ruang Rapat Ditdamduk

Pimpinan : Dra. Hitima Wardhani, MPH

---

NO	PEMBAHAS	KETERANGAN
1	Ibu Hitima	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tujuan rapat hari ini adalah menyepakati indikator yang digunakan dasar penyusunan klasifikasi kampung KB.</li><li>• Kampung KB masih perlu penguatan tentang pengelolaan Kampung KB.</li><li>• Laporan Akhir Kampung KB Tahun 2018: masih perlu penguatan tentang pengelolaan Kampung KB, optimalisasi kegiatan yang berdampak pada peningkatan Program KKBPK, peningkatan kualitas keluarga dan masyarakat, serta monitoring dan evaluasi berkala dan terpadu guna memberikan feedback pengembangan program.</li><li>• Menyusun klasifikasi Kampung KB untuk memetakan permasalahan, kebutuhan dan solusi permasalahan dalam pengelolaan Kampung KB dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Kampung KB yang berkualitas dan komprehensif.</li><li>• Kemarin kita mencoba turun ke lapangan untuk bertemu pengelola kampung KB dengan lokus di Bali dan Jawa Timur. Seharusnya masih ada satu lagi yaitu Jawa Barat tetapi waktunya tidak cukup.</li><li>• Jumlah kampung KB saat ini adalah 15.130 Kampung kb.</li><li>• Pengelolaan Kampung KB masih mengarah kepada capaian secara kuantitatif</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengingat kembali dari masing-masing komponen untuk mengembangkan program dan kebijakan di kampung KB.</li> <li>• Harapannya di tahun 2022 seluruh kampung KB mempunyai pokja.</li> <li>• Kampung KB sudah dievaluasi oleh BPKP dengan 15 indikator.</li> <li>• Hasil evaluasi kampung KB secara nasional 71,3% (cukup berhasil)</li> <li>• Dari data yang sudah dikumpulkan, kita optimalkan untuk melakukan pemetaan dengan berbasis sistem.</li> <li>• Kita sudah berusaha untuk mengklasifikasikan. Kami butuh masukan dari Bapak/Ibu terkait pengklasifikasian ini karena hasil ini akan di paparkan pada saat diseminasi tanggal 27 November 2019 nanti.</li> <li>• Data yang ada di web adalah data yang sudah dilaporkan.</li> <li>• Di Banyuwangi, saat mereka melaporkan sering terkendala sinyal. Saat <i>entry</i> data sering gagal dan harus <i>entry</i> ulang akibatnya mereka menjadi sering tidak melaporkan.</li> <li>• Cocokan data yang ada di web dan data saat kita turun ke lapangan kemarin. Misal, di web kelompok kegiatan tidak diisi, apakah kenyataannya tidak melakukan kegiatan tersebut atau memang tidak dilaporkan.</li> </ul>
2	Ibu Ani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terkait pengelolaan, kampung KB kedepannya akan dikelola oleh bidang dalduk tetapi belum tahu komponen mana.</li> <li>• Kami memperoleh mandat bahwa tidak boleh melihat kampung KB berdasarkan kuantitas tetapi melihat kualitasnya juga.</li> <li>• Kita sudah melakukan <i>need assessment</i> di 2 lokasi. Dari hasil <i>need assessment</i> di 2 provinsi akan kita <i>share</i> hasilnya seperti apa baru nanti kita diskusikan.</li> </ul>
3	Ibu Dini	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kita melakukan klasifikasi bertujuan</li> </ul>

		<p>untuk pengembangan kampung KB kedepan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kami membagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu dasar, berkembang, mandiri, dan berkelanjutan.</li> <li>• Untuk pengklasifikasikan, kita menggunakan 1 alat monitoring evaluasi yaitu IPF</li> <li>• Dengan adanya pengklasifikasian ini, kami berharap bisa membedakan mana kampung KB yang dasar sekali sampai yang berkelanjutan.</li> <li>• Jika suatu kampung KB sudah dikatakan mandiri, apa kelanjutannya?</li> <li>• Pada kelompok kampung KB berkelanjutan harapannya tidak hanya berjalan saja tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan.</li> <li>• Kami memberikan pembobotan dari 1 sampai 4, mulai dari yang tidak penting sampai sangat penting.</li> </ul>
4	Ibu Ika	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dari hasil turun ke lapangan, terdapat perbedaan yang cukup jauh dari kampung KB percontohan dengan kampung KB biasa.</li> <li>• Di kampung KB percontohan, sarana prasarana dan administrasi sudah baik.</li> <li>• Yang menjadi pokok perhatian dan permasalahan adalah mereka masih menyebutkan tentang intervensi lintas sektor dan sumber pendanaan.</li> <li>• Mereka masih menanyakan tentang BOKB. Mereka berharap penggunaannya bisa lebih fleksibel. Mereka ingin BOKb bisa untuk peningkatan pengetahuan kader yang sangat mereka butuhkan. OPD sendiri tidak punya cukup anggaran karena pendanaan terbatas</li> <li>• Terkait sumber pendanaan, bagaimana cara meyakinkan kepala desa untuk memberikan mereka dana.</li> <li>• Permasalahan lainnya adalah Kampung KB Jambewangi yang merupakan juara 2 Nasional masih bertanya-tanya kenapa</li> </ul>

		<p>mereka bisa mendapatkan juara 2 padahal akses jalan ke kampung KB belum beraspal dan sinyal masih sangat susah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banyak hal yang dibutuhkan teman-teman di pokja. Seperti bagaimana meyakinkan pemda untuk meningkatkan kapasitas SDM. Bagaimana juga bisa OPD yang bersangkutan paham tupoksinya terkait kampung KB karena banyak OPD yang tidak terlalu paham kampung KB ini mau dibawa kemana.</li> </ul>
5	Ibu Wahidah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Salah satu alasan kampung KB Jambewangi tidak bisa menjadi juara 1 adalah karena pelaporan dan sangat rendahnya pencapaian kjp</li> <li>• Sebagai tim penilai, mereka hanya memperlihatkan yang bagus-bagus kepada kami seperti kontribusi pemerintah setempat terkait kampung KB</li> <li>• Mereka juga telah mempunyai inovasi yaitu adanya tim pasukan penjual sayur yang dibiayai oleh kepala desa.</li> <li>• Saran saya, inovasi harus menjadi salah satu indikator dalam pengklasifikasian kampung KB agar bisa menjadi acuan untuk teman-teman lain.</li> <li>• Kalau bisa inovasi dimasukkan dalam klasifikasi kampung KB mandiri atau berkelanjutan supaya terlihat jelas bedanya antara kampung KB dasar hingga berkelanjutan</li> </ul>
6	Ibu Ani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemarin saat kami turun ke lapangan, kami juga menanyakan tentang inovasi yang mereka punya. Seperti yang telah dikatakan, Banyuwangi memiliki inovasi penyediaan sayuran yang diberi nama Langkah Kasih. Mereka juga sedang menggarap program tengok kiri kanan.</li> <li>• Salah satu permasalahan yang ada disana juga adalah terkait UPPKS. Banyak pengrajin kopiah tapi mereka tidak tahu mau dijual kemana dan</li> </ul>



		<p>bagaimana cara memasarkannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kendala yang terdapat disana adalah akses menuju kampung KB tersebut &amp; internet yang susah diakses</li> </ul>
7	Ibu Wahidah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Banyuwangi juga terkenal dengan pariwisata, kami juga telah meminta mereka untuk memanfaatkan dan mempromosikan pariwisatanya</li> </ul>
8	Ibu Ika	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kampung KB Jambewangi heran mengapa mereka bisa mendapat juara 2 Nasional karena menurut mereka masih banyak hal yang kurang dari mereka.</li> <li>• Inovasi baru yang telah mereka laksanakan terkait pariwisata adalah mempromosikan hutan wisata. Program ini sudah berjalan tetapi sarana pendukungnya baru terbangun.</li> <li>• Remaja disana sudah senang ikut menghias tempat wisata baru untuk menarik perhatian wisatawan, tetapi saat mau dipromosikan mereka tidak tahu harus bagaimana dan susahnya mengakses internetl.</li> </ul>
9	Pak Ari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kalau dilihat dari matriks, memang seharusnya setiap kampung KB memiliki inovasi karena masing-masing daerah mempunyai kekhasannya sendiri.</li> <li>• Saran saya, harus ada 1 poin khusus untuk inovasi. Dari inovasi ini bisa dijadikan keunikan di kampung KB masing-masing.</li> <li>• Jambewangi bisa menjadi juara karena paling banyak melaporkan. PLKB mereka rajin melaporkan walaupun sinyal disana sangat susah.</li> </ul>
10	Ibu Ani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mungkin kita perlu berdiskusi bersama dengan ditifdok bagaimana membuat aplikasi yang mereka mudah untuk mengakses.</li> <li>• Terkait dengan BOKB, OPD di Banyuwangi kurang terinfokan karena diambil langsung oleh BAPEDA.</li> <li>• Kalau sudah dianggarkan di DAK &amp; BOKB, tidak boleh menganggarkan lagi kecuali yang belum masuk di DAK&amp;</li> </ul>

		<p>BOKB.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemarin juga ada pertanyaan apakah penerima DAK bisa bergantian karena ada 1 kecamatan yang memiliki 4 kampung KB</li> </ul>
11	Ibu Hitima	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada kesempatan ini, kita ingin tahu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi kampung KB yang ideal seperti apa</li> <li>2. Menyocokkan data lapangan dengan data web sehingga kita tahu sejauh mana penyimpangan atau perbedaan data yang ada</li> </ol> </li> <li>• Tim sudah mengelompokan, mari kita diskusikan apakah pengelompokan ini sesuai atau tidak</li> </ul>
12	Ibu Dini	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kita sepakati inovasi masuk ke dalam indikator output</li> <li>• Pembobotan ini menjadi pengukuran bagaimana kampung KB tersebut berkontribusi terhadap pencapaian.</li> <li>• Pembobotan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak Penting</li> <li>2. Cukup Penting</li> <li>3. Penting</li> <li>4. Sangat Penting</li> </ol> </li> </ul>
13	Ibu Ika	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poin 1 = SK &amp; Struktur pokja. Kampung KB rata-rata sudah memiliki SK namun bermacam-macam bentuknya dan rinciannya, masih terkesan asal ada.</li> <li>• Jika SK sudah baik, maka pokja juga pasti sudah terbentuk dengan baik</li> </ul>
14	Ibu Hitima	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kalau bisa sampaikan saja seluruh indikator agar semua teman-teman disini bisa langsung tahu semua. Setelah itu kita harus memilah indikator mana yang masuk kategori penting maupun tidak penting.</li> </ul>
15	Ibu Dini	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kami nanti akan mengambil nilai rata-rata lalu di kuadrankan. Terdapat 4 kuadran yang akan menampilkan posisi kampung KB tersebut.</li> <li>• Harapan kami bisa bekerja sama dengan ditifdok dan bisa mendapatkan data yang dibuthkan untuk mengklasifikasi.</li> </ul>
16	Ibu Hitima	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kira-kira apa yang bisa dilakukan</li> </ul>

		ditifdok untuk berkontribusi?
17	Ibu Emy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses <i>upload</i> lama bisa karena waktu penguploadan yang bersamaan dengan yang lain.</li> <li>• Terkait data, kami perlu tahu apa saja yang dibutuhkan</li> </ul>
18	Pak Adnan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kami hanya bisa menyediakan data yang diinput di website. Jika ada data yang diinput di website maka ada datanya di kami</li> </ul>
19	Ibu Dini	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kami berharap bisa mendapatkan data yang terus diperbaharui agar klasifikasi bisa terus berjalan dan bermanfaat</li> </ul>
20	Ibu Wahidah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana kami kedepannya akan melakukan <i>input</i> data pada aplikasi secara <i>offline</i> baru setelah itu secara <i>online</i>.</li> <li>• Kami juga mendapatkan data dari ditifdok. Data tersebut kami analisis sendiri satu persatu walaupun memang merepotkan, sehingga kami berencana akan ada aplikasi <i>offline</i></li> </ul>
21	Ibu Dini	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kita ingin memasukan indikator yang baru, mau tidak mau harus revisi.</li> <li>• Kami juga mau ada kesepakatan apakah mau menggunakan data yang sudah ada atau mengakomodir indikator dari masing-masing direktorat.</li> </ul>
22	Ibu Ika	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kalau hanya mengambil data dari website, sangat sedikit. Data yang ada di website hanya berbentuk pernyataan “Ya/Tidak, Ada/Tidak”, susah untuk dipotret.</li> </ul>
23	Ibu Wahidah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kita perlu tahu apakah kita hanya ingin apa yang ada saja atau ingin berkembang? Kalau kita ingin berkembang, mungkin hasilnya bisa lebih diperkuat lagi untuk direkomendasikan ke pimpinan.</li> </ul>
24	Pak Ridwan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tahun 2020 nanti, Linlap hanya sebagai penggerak dan pendayagunaan PLKB sedangkan untuk pengelolaan kampung KB untuk dalduk</li> <li>• Perlu effort untuk melakukan klasifikasi memetakan 15 ribu kampung KB yang</li> </ul>

		<p>akan dibantu ditifdok. Ketika sudah di klasifikasi, apa kegunaan klasifikasi ini? Apa intervensinya? Intervensi harus terukur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klasifikasi harus terukur, agar pengklasifikasiannya nanti lebih mudah</li> </ul>
25	Ibu Hitima	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk intervensi nanti lain lagi.</li> <li>• Dengan adanya klasifikasi ini nantinya bisa diintervensi. Klasifikasi ini sedang mengarah kesana namun intervensi itu adalah langkah selanjutnya nanti.</li> <li>• Dari variabel yang sudah ada, mana saja yang sudah ada di web? Kita harus bisa melakukan berbasis sitem. Silahkan diskusikan mana yang penting dan tidak penting lalu disandingkan dengan data di web. Sehingga selanjutnya kita bisa berkerja lebih intensif dengan ditifdok.</li> </ul>
26	Ibu Ani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kita akan menggunakan pelaporan yang sudah ada. Namun pelaporannya harus bisa berubah, tidak hanya ada/tidak ada tetapi juga harus ada rinciannya.</li> </ul>
27	Ibu Ika	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepemilikan SK &amp; Pokja hanya ada/tidak di web.</li> <li>• Anggaran kegiatan pokja, memang ada dan bisa dilihat apakah dari APBN, APBD atau dana desa. Tapi opsi di webnya hanya ada jumlah sumber pendanaan seperti 1 atau 2 pendanaan atau 2 atau 3 pendanaan</li> <li>• Kampung KB dengan pokja terlatih, terdapat 3 poin di web dan hanya ada keterangan terlatih atau tidak terlatih. Saya hanya pilih 1 poin.</li> <li>• Kepemilikan rencana kerja tahunan, belum ada</li> <li>• Kepemilikan sarana dan prasarana, hanya ya/tidak</li> <li>• Mekop sama dengan yang ada di web</li> <li>• Intervensi program &amp; lintas sektor, sebenarnya ada 3 tapi hanya 1 yang diambil karena datanya bukan berupa presentase tetapi berupa kegiatan.</li> <li>• Untuk bidang KSPK, mengusulkan indikator jumlah keluarga yang aktif</li> </ul>

		dalam BKB, BKR, BKL, PIK-R, UPPKS. Tapi jika bicara jumlah agak sulit. Lebih baik prosentase saja.
28	Ibu Wahidah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kalau hanya berdasarkan web, sangat susah diklasifikasikan.</li> <li>• Kalau hanya ya/tidak, damduk bisa mengerjakan sendiri.</li> <li>• Saran saya, berikan 2 opsi kepada pimpinan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jika hanya berdasar web, ini hasilnya.</li> <li>2. Jika ingin yang lebih bagus, berikan rekomendasi yang bagus.</li> </ol> </li> </ul>
29	Ibu Dini	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika ingin berdasarkan web bisa ambil dari hasil BPKP juga.</li> <li>• Idealnya untuk pengembangan kedepan, kita pakai pengklasifikasian yang baru</li> </ul>
30	Pak Ridwan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data yang mau dilihat dari sumber data kedeputan KSPK atau sumber data di pelaporan? Takutnya nanti akan ada selisih jumlah.</li> </ul>
31	Ibu Ani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kalau sumber data di pelaporan kan secara Nasional, sedangkan yang kita butuhkan hanya pemetaan di kampung KB.</li> </ul>
32	Ibu Ani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yang diminta oleh Pak Kepala kedepannya adalah <i>outcome</i>, bukan hanya proses. Kalau partisipasi itu termasuk ke dalam proses.</li> <li>• Untuk sementara, pemetaan kampung KB berdasarkan web.</li> </ul>
33	Ibu Sinta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bidang KS, jumlah keluarga yg aktif hanya ada atau tidak ada bukan angka, sedangkan indikatornya adalah jumlah, tidak nyambung.</li> </ul>
34	Ibu Ika	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ini <i>request</i>/masukan dari KSPK sendiri sesuai surat yang dikirimkan kepada kami.</li> <li>• Mohon diskusikan lagi poin2nya untuk dikoreksi.</li> </ul>
35	Ibu Ani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mohon koreksinya dari teman-teman KSPK karena hasil klasifikasi ini akan dipaparkan pada tanggal 27 November 2019 nanti.</li> </ul>
36	Ibu Sinta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kalau sudah ada tanda tangan deputi</li> </ul>

		KSPK, kami tidak bisa merubah. Tapi tolong jangan difinalisasi dahulu.
37	Ibu Dini	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sementara kami akan menampilkan data yang ada sesuai dengan keadaan saat ini.</li> </ul>
38	Ibu Ani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebenarnya di panduan monev, siapapun komponen yang turun ke lapangan harus menyempatkan ke kampung KB karena ini program bersama.</li> <li>• Pokja pusat juga sebenarnya sudah ada tapi belum berjalan</li> </ul>
39	Ibu Wahidah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah di dalam pelaporan web ada catatannya atau narasinya?</li> </ul>
40	Pak Ari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Itu ada di kolom intervensi. Narasinya bisa di cek pada masing-masing ceklis.</li> </ul>
41	Ibu Ani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saya minta tolong bantu data-datanya.</li> </ul>
42	Pak Adnan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Di list saja data-data yang dibutuhkan</li> </ul>
43	Ibu Nova	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PR kedepan, harus ada satu draft terkait SK dan harus tersosialisasikan dengan baik.</li> <li>• Harus ada menu tersendiri bagi orang lapangan untuk input data.</li> </ul>
44	Ibu Ani	Terimakasih atas masukan dan kehadiran. Semoga kedepan program kampung KB bisa lebih bermanfaat.

### **Kesimpulan :**

1. Klasifikasi Kampung KB disepakati bersama oleh masing-masing komponen
2. Klasifikasi Kampung KB dibagi menjadi 4, yaitu Dasar, Berkembang, Mandiri dan Berkelanjutan
3. Pembobotan yang akan dilakukan bernilai 1 hingga 4, dimana :
  - a. Tidak Penting
  - b. Cukup Penting
  - c. Penting

d. Sangat Penting

4. Hasil klasifikasi kampung KB akan di paparkan saat diseminasi tanggal 27 November 2019

**Rencana Tindak Lanjut :**

1. Jika ada koreksi atau masukan terkait klasifikasi kampung KB bisa disampaikan sebelum tanggal 27 November 2019
2. List data yang diperlukan untuk dimintakan kepada ditifdok
3. Klasifikasi berdasarkan data website dan akan disandingkan dengan data BPKP

**DOKUMENTASI**







**NOTULENSI**  
**UJI PUBLIK PENYUSUNAN NSPK SUB BIDANG PENGENDALIAN**  
**PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TINGKAT PROVINSI SULAWESI**  
**SELATAN**  
**4 NOVEMBER 2019**  
**HOTEL M REGENCY MAKASAR**

<b>Pembukaan</b> <b>Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars KB</b> <b>Sambutan Selamat Datang</b> <b>Arahan Deputi Bidang KB dan KR</b> <b>Pembacaan Doa</b> <b>Paparan Kewenangan Konkuren Daerah Kab. Kota</b>		
<b>Panel B (Paralel)</b> <b>Paparan Konsep NSPK Sub Bidang Pengendalian Penduduk</b>		
No.	Pembahas	Isi
1	<b>Ibu Hitima</b>  (Direktur Analisis Dampak Kependudukan)	<b>Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>  Agar tercipta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian berkewajiban membuat norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) untuk dijadikan pedoman bagi Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah dan menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian untuk melakukan pembinaan dan pengawasan (Penjelasan Umum UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).  Standar di tingkat Provinsi :  1. Tersedianya dokumen <i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan yang meliputi lima bidang, yaitu pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, dan penataan administrasi kependudukan;  2. Tersedianya data Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Indeks

		<p>Kepedulian terhadap Isu Kependudukan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Tersedianya Sistem Informasi Peringatan Dini Dampak Kependudukan;</li> <li>4. Terlaksananya kerjasama pendidikan kependudukan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pendidikan Formal: pelaksanaan Sekolah Siaga Kependudukan di tingkat SMA/MA/SMK/ sederajat,</li> <li>b) Pendidikan Nonformal: Pelaksanaan pendidikan kependudukan di Diklat Aparatur Sipil Negara dan Kepramukaan</li> </ol> </li> </ol> <p>Standar di tingkat Kab/Kota :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya dokumen <i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan yang meliputi lima bidang, yaitu pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, dan penataan administrasi kependudukan;</li> <li>2. Tersedianya data Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan;</li> <li>3. Tersedianya Sistem Informasi Peringatan Dini Dampak Kependudukan;</li> <li>4. Terlaksananya Kerjasama Pendidikan Kependudukan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pendidikan Formal: Pelaksanaan Sekolah Siaga Kependudukan di tingkat SD/SMP/ sederajat,</li> <li>b) Pendidikan Nonformal: Pelaksanaan pendidikan kependudukan di Diklat Aparatur Sipil Negara dan Kepramukaan,</li> <li>c) Pendidikan Informal: Pelaksanaan pendidikan kependudukan di Kelompok Kegiatan (poktan) melalui penyuluhan di masyarakat.</li> </ol> </li> </ol> <p>Kriteria di tingkat Provinsi :</p>
--	--	---

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya regulasi daerah tentang <i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan;</li> <li>2. Meningkatnya capaian nilai Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan;</li> <li>3. Tersedianya isu-isu kependudukan;</li> <li>4. Tersedianya analisis dampak kependudukan beserta model solusi strategis sebagai bagian dari sistem informasi peringatan dini dampak kependudukan dari aspek politik, sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan, daya dukung dan daya tampung lingkungan;</li> <li>5. Tersedianya publikasi dan rekomendasi kebijakan penanganan isu-isu kependudukan;</li> <li>6. Meningkatnya pemanfaatan Sistem Informasi Dampak Kependudukan dalam penanganan isu dan dampak kependudukan oleh para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan;</li> <li>7. Meningkatnya penanganan terpadu isu Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga oleh pemangku kepentingan dan mitra kerja di tingkat provinsi;</li> <li>8. Meningkatnya pelaksanaan Kerjasama Pendidikan Kependudukan, meliputi:</li> <li>9. Pelaksanaan Pendidikan kependudukan Jalur Formal melalui:</li> <li>10. Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan minimal 1 (satu) di setiap tingkat satuan pendidikan SMA/MA/SMK/ sederajat di tingkat provinsi.</li> <li>11. Terlaksananya orientasi penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan lembar kerja Siswa (LKS) yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar di sekolah.</li> <li>12. Terlaksananya orientasi guru dan petugas kegiatan kesiswaan untuk menyusun rencana kegiatan penyuluhan dalam kegiatan kesiswaan.</li> <li>13. Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Nonformal melalui pengintegrasian materi pendidikan kependudukan dalam pendidikan dan</li> </ol>
--	--	--

		<p>pelatihan Aparatur Sipil Negara di lembaga kediklatan,</p> <p>14. Membentuk Pojok Kependudukan di Sekolah Siaga Kependudukan tingkat SMA/ sederajat dan, Lembaga Kediklatan disertai dengan sarana prasarana penunjang.</p> <p>Kriteria di tingkat Kab/Kota :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya regulasi daerah tentang <i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan;</li> <li>2. Meningkatnya capaian nilai Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan;</li> <li>3. Tersedianya isu-isu kependudukan yang aktual;</li> <li>4. Tersedianya analisis dampak kependudukan beserta model solusi strategis sebagai bagian dari sistem informasi peringatan dini dampak kependudukan dari aspek politik, sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan, daya dukung dan daya tampung lingkungan;</li> <li>5. Tersedianya publikasi dan rekomendasi kebijakan penanganan isu-isu kependudukan;</li> <li>6. Meningkatnya pemanfaatan Sistem Informasi Dampak Kependudukan dalam penanganan isu dan dampak kependudukan oleh para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan;</li> <li>7. Meningkatnya penanganan terpadu isu Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga oleh pemangku kepentingan dan mitra kerja di tingkat provinsi;</li> <li>8. Tersedianya Rumah Data Kependudukan paripurna di desa/kelurahan;</li> <li>9. Pelaksanaan Pendidikan kependudukan Jalur Formal       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan minimal 1 (satu) di setiap tingkat satuan pendidikan SD/MI/ sederajat dan SMP/MTS/ sederajat</li> </ol> </li> </ol>
--	--	--

		<p>b. Terlaksananya orientasi penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan lembar kerja Siswa (LKS) yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar di sekolah.</p> <p>c. Terlaksananya orientasi guru dan petugas kegiatan kesiswaan untuk menyusun rencana kegiatan penyuluhan dalam kegiatan kesiswaan.</p> <p>10. Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Nonformal</p> <p>a. Pengintegrasian materi pendidikan kependudukan dalam pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara di lembaga kediklatan.</p> <p>b. Pembentukan minimal 1 (satu) saka kencana di tingkat cabang/ranting dan melaksanakan krida kependudukan.</p> <p>11. Pelaksanaan Pendidikan kependudukan Jalur Informal merupakan pengintegrasian materi pendidikan kependudukan di tingkat Kabupaten dan Kota dalam kegiatan penyuluhan, minimal di 1 (satu) kelompok kegiatan (baik tribina, maupun kelompok kegiatan lainnya di masyarakat).</p> <p>12. Membentuk Pojok Kependudukan di Sekolah Siaga Kependudukan tingkat SD, SMP dan Lembaga Kediklatan, Saka Kencana di tingkat Cabang/Ranting, dan di desa/kelurahan disertai dengan sarana prasarana penunjang.</p>
2	Pak Mustakim	<p><b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk</b></p> <p><u>Norma (Provinsi)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No 52 tahun 2009</li> <li>2. UU No 23 tahun 2014</li> <li>3. PP No 87 Tahun 2014</li> <li>4. PP No 18 tahun 2016</li> <li>5. PP No 12 tahun 2017</li> <li>6. Perka BKKBN Nomor 48/PER/G4/2016 tentang Sistem Informasi Keluarga</li> </ol> <p><u>Norma (Kab/Kota)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No 52 tahun 2009</li> <li>2. UU No 23 tahun 2014</li> <li>3. PP No 87 Tahun 2014</li> <li>4. PP No 18 tahun 2016</li> </ol>

		<p>5. PP No 12 tahun 2017 6. Perka BKKBN Nomor 48/PER/G4/2016 tentang Sistem Informasi Keluarga</p> <p><u>Standar (Provinsi)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>Tersedianya data yang mencakup indikator Program KKBPK;</u></li> <li>2. <u>Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipercaya dan merupakan data yang mutakhir;</u></li> <li>3. <u>Tersedianya sumber data, meliputi data hasil;</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Sensus Penduduk SP;</u></li> <li>- <u>Survei Penduduk Antar Sensus SUPAS;</u></li> <li>- <u>Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia SDKI;</u></li> <li>- <u>Survei Sosial Ekonomi Nasional SUSENAS;</u></li> <li>- <u>Survei Angkatan Kerja Nasional SAKERNAS, Daerah Dalam Angka;</u></li> <li>- <u>Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data Keluarga Indonesia;</u></li> <li>- <u>Riset Kesehatan Dasar RISKESDAS; dan</u></li> <li>- <u>Registrasi Penduduk.</u></li> </ul> </li> </ol> <p><u>Standar (Kab/Kota)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>Tersedianya data yang mencakup indikator Program KKBPK;</u></li> <li>2. <u>Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipercaya dan merupakan data yang mutakhir;</u></li> <li>3. <u>Tersedianya sumber data, meliputi data hasil;</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Sensus Penduduk SP;</u></li> <li>- <u>Survei Penduduk Antar Sensus SUPAS;</u></li> <li>- <u>Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia SDKI;</u></li> <li>- <u>Survei Sosial Ekonomi Nasional SUSENAS;</u></li> <li>- <u>Survei Angkatan Kerja Nasional SAKERNAS, Daerah Dalam Angka;</u></li> <li>- <u>Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data Keluarga Indonesia;</u></li> <li>- <u>Riset Kesehatan Dasar RISKESDAS; dan</u></li> <li>- <u>Registrasi Penduduk.</u></li> </ul> </li> </ol> <p><u>Prosedur (Provinsi)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan</li> <li>2. Pelaksanaan</li> <li>3. Pelaporan</li> <li>4. Pendanaan</li> </ol>
--	--	--

		<p>5. Pemantauan dan Evaluasi 6. Pembinaan dan Pengawasan</p> <p><u>Prosedur (Kab/Kota)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>Perencanaan</u></li> <li>2. <u>Pelaksanaan</u></li> <li>3. <u>Pelaporan</u></li> <li>4. <u>Pendanaan</u></li> <li>5. <u>Pemantauan dan Evaluasi</u></li> <li>6. <u>Pembinaan dan Pengawasan</u></li> </ol> <p><u>Kriteria (Provinsi)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>Menyediakan data parameter Program KKBPK yang lengkap, akurat, mutakhir, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan;</u></li> <li>2. <u>Menyediakan Profil Program KKBPK sesuai dengan dinamika kependudukan dan program;</u></li> <li>3. <u>Menyediakan parameter dan profil program KKBPK sesuai dengan isu strategis kependudukan yang terjadi antar kabupaten/kota;</u></li> <li>4. <u>Mensosialisasikan parameter dan profil Program KKBPK;</u></li> </ol> <p><u>Kriteria (Kab/Kota)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>Menyediakan data parameter Program KKBPK yang lengkap, akurat, mutakhir, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan;</u></li> <li>2. <u>Menyediakan Profil Program KKBPK sesuai dengan dinamika kependudukan dan program;</u></li> <li>3. <u>Menyediakan parameter dan profil program KKBPK sesuai dengan isu strategis kependudukan;</u></li> <li>4. <u>Mensosialisasikan parameter dan profil Program KKBPK; dan</u></li> <li>5. <u>Menyediakan Parameter dan Profil Program KKBPK di tingkat mikro;</u></li> </ol>
<b>DISKUSI</b>		
1.	Perwakilan Prov Sulsel	Kami di Kabupaten Wajo di- <i>merger</i> menjadi dinas sosial, pembangunan keluarga, keluarga berencana dan perlindungan perempuan dan anak. Di Kabupaten Wajo

		<p>mempunyai tipe A. Setelah disahkan kemarin hanya 2 yang bertahan dinsos.</p> <p>Kami ingin mempertanyakan akan dikemanakan NSPK yg dibahas hari ini. Padahal kegiatan ini seharusnya dilakukan di bulan April. Jika saja dilaksanakan tepat waktu, kami dapat berupaya mempertahankan eksistensi pada saat kami di-<i>merger</i>, atau mungkin kami dapat pertahankan dan berjuang di asistensi. Dengan ini, kami akhirnya menjadi belum punya acuan yg tepat. Kini Kab. Wajo hanya tinggal menunggu pelantikan karena sudah disahkan di DPRD. Jika sesuai jadwal, 1 Januari kami akan dimerger sehingga pemetaan sinkronisasi masuk bid dalduk. Ini hanya keluh kesah dan masukan dari kami, agar mungkin pembuatan NSPK dapat mempertimbangkan kondisi restrukturisasi di provinsi.</p>
2.	Disdukcapil dan dalduk	<p>Sama hal nya seperti yang dialami oleh penanya sebelumnya, NSPK ini sudah ditunggu-tunggu. Saat ini disdukcapil dalduk ada di tipe A. Sementara hambatan di kami, ada perubahan perihal OPD. Ditambah, informasinya bidang dalduk KS dan akan gabung dengan perempuan &amp; anak. Sangat disayangkan tiba-tiba di tengah jalan kami harus bergabung dengan perempuan dan anak karena komponen yang bergabung biasanya akan dikecilkan oleh komponen asli.</p> <p>Usulan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kenapa tidak dibuat contoh seperti dinas disdukcapil yang mendapatkan payung perlindungan dari pusat.</li> <li>2. Jika memungkinkan, nomenklatur disatukan menjadi satu judul. Jangan sementara dipindah-pindah dan pada akhirnya tidak konsen.</li> </ol> <p>GDPK hampir semua di sulsel sudah selesai. Kita tunggu dari pusat membuat kriteria sebagai acuan agar ada sinergitas di daerah.</p>
3.	Direktur Analisis	<p>Saya meminta maaf. Saya paham dengan keresahan bahwa NSPK sudah ditunggu oleh provinsi. Untuk</p>



	Dampak Kependudukan	<p>pertanyaan terkait kenapa tidak progresif karena bila kita meruntun pd UU 23 harusnya keluar dulu PP kemudian baru keluar NSPK. Akhirnya, baru tempo lalu Kemendagri baru mengeluarkan aturan bahwa instansi dapat mengeluarkan NSPK sesuai kriteria instansi masing-masing. Kedepannya, apa yang harus dilakukan harus sesuai pembagian urusan. Sudah ada Permendagri Nomor 86 yang dapat menjadi acuan pada saat memberikan justifikasi pentingnya suatu kelembagaan dalam pembangunan keluarga.</p> <p>Dengan adanya NSPK, kami ingin memperkuat KB dan PK yang berazas konkuren. Tidak masuk pelayanan dasar tapi wajib.</p> <p>Pada sesi ini, dari langkah-langkah yang sudah dikonsepskan, apakah dapat dilaksanakan?</p>
4.	Pak Mustakim	<p>Terkait keluhan mengenai keterlambatan NSPK, saya juga menyesalkan dan mengakui kondisi sebelumnya saat belum adanya kepala definitif itu cukup berpengaruh terhadap koordinasi lintas kementerian dan instansi. Namun, kami tetap menjalankan kelembagaan dengan kekuatan yang kami punya.</p> <p>Mendengar masukan dari saudara-saudara, saya cukup kaget kelembagaan ini menjadi mundur dengan penggabungan-penggabungan komponen.</p> <p>Pengalaman saya sebagai Plt di Sultra, saya mengakui betapa berpengaruhnya fungsi dan kemampuan untuk dapat menjelaskan kepada Bupati dan Pemda terkait pentingnya untuk menjadikan tipe A sebagai acuan. Kadang bupati/pemda tidak paham, tetapi begitu tahu, ia dapat menganggarkan banyak dana untuk program kita jika kita mampu menjelaskan dengan pendekatan yang holistik.</p>
5.	Perwakilan Kab. Sinjai	<p>Untuk menjalankan program di daerah, begitu isunya tidak seksi, tidak akan ada di RPJMD. Dibanding jika program berasal dari kementerian, hanya karena BKKBN secara kelembagaan kita hanya badan, kab/kota tidak responsif karena jalur koordinasi kementerian dan badan itu berbeda. Saya memohon</p>

		untuk dipertajam dari atas karena jika tidak dilakukan ada kekhawatiran tiap tahun anggaran di daerah berkurang.
6.	Dirditdamduk	Sebagai sedikit penjelasan, kelembagaan ini tidak sesuai dengan pemetaan wilayah. Masukan terkait adanya perampingan struktur ini menjadi berat untuk Kab/Kota dan Provinsi untuk melaksanakan KKBPK ini merupakan masukan yang baik, kami catat.
7.	Perwakilan Kab. Wajo	Kami tidak dapat info apa kegiatan yang harus dilakukan jika sudah menentukan tipe. Menurut kami, terlalu banyak kegiatan, tetapi tidak memperhatikan dana di kabupaten.  Contoh sekolah, kami tidak punya dana untuk pengembangan selanjutnya. Mohon pembentukan sekolah ini harus mempunyai dana yang besar. Tentu perlu diskusi panjang untuk perihal ini.
8.	Perwakilan Kab. Enrekang	Mohon agar adanya pembentukan program juga harus disokong dengan adanya dukungan. Tingkat atas (pusat) selalu membuat program yang bagi kami walaupun bagus belum tentu dapat dilakukan di lapangan.
9.	Moderator	Kekuatan BKKBN sejak dulu ada di KKBPK dan advokasi. GDPK memang menjadi prioritas disini. NSPK saat ini sedang diupayakan agar mempunyai kekuatan hukum. Sebelumnya, kita sudah koordinasi dengan Kemendagri. Bappenas sudah meminta BKKBN menjadi motor penggerak agar GDPK khususnya dapat menjadi program yang seksi karena menyangkut kependudukan. Jika melihat respon ini, ternyata program seksi karena dilanjut hingga 2024 oleh bappenas. Kita akan selesaikan di akhir tahun ini berapa pun bidang yang berhasil. Tahun depan kita dorong untuk pelaksanaan di 5 bidang. Masukan tentang bagaimana kelembagaan ini dapat dilaksanakan tidak hanya dicanangkan inilah yang harus menjadi fokus kami dari pusat.

10.	Direktur Analisis Dampak Kependudukan	<p>Saya ingin tambahkan sedikit sebagai penekanan. Perihal kaitannya dengan GDPK, bagaimana runtunan rancangan kedepan ada di RPJMN thn 2020-2024. Kita sudah mendengar bahwa salah satu fokus dari 7 agenda pidato presiden ini adalah pembangunan SDM dan revolusi mental. KKBPK penting untuk pembangunan SDM dan Pembangunan karakter agar terwujud sumber daya berkualitas untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang. Jika dilihat, program kita menjadi sangat strategis.</p> <p>Semua ini menjadi gugur bila dikembalikan ke UU 23.</p> <p>Dana penggerakan masih kami usahakan untuk masuk ke APBN.</p> <p>Jika berprinsip money follow program, ini dapat menjadi senjata.</p> <p>Tidak mungkin OPD KB melaksanakan sendiri meskipun mereka kuat dalam advokasi dan penggerakan.</p> <p>Adpin sedang membicarakan NSPK diantaranya terkait walking group. Kami berusaha agar kelembagaan di tingkat pusat dan provinsi dengan Kab/Kota ini diharapkan baik pembagian wewenangnya.</p> <p>Saya mendapatkan masukan yang baik, bahwa diskusi ini menyadarkan kita bahwa tipologi kelembagaan di tingkat provinsi sangat beragam dan ini harus menjadi perhatian di tingkat pusat.</p>
11.	Perwakilan Kab. Bulukumba	<p>Bicara kampung KB, dengan anggaran yang pas-pasan, jangan kita dilepaskan begitu saja. KB di Bulukumba ada di garis merah, tetapi kami semangat untuk KB. Namun, kami punya kendala dari segi ketersediaan alkon yang menjadi hambatan. Jika Bulukumba ingin berhasil jangan kecewakan kita di lapangan.</p>
12.	Moderator	<p>Intinya, dari semua masukan dari saudara-saudara, masalah ketersediaan alkon masih menjadi hambatan</p>

		yang dapat menurunkan semangat di lapangan sudah tinggi.
13.	Direktur Analisis Dampak Kependudukan	Kami sangat apresiasi, salah satu hal yang sangat strategis.  Pengadaan alkon ini menjadi kondisi yang terjadi secara nasional, dan sedang dicarikan jalan keluar untuk ketersediaan alkon.
14.	Bapak Yosep	Satu hal yang saya lihat, terkadang mungkin permintaan alkon tidak terdata di kabupaten tertentu. Hal ini yang menjadikan pengadaan alkon menjadi terhambat.  Sedikit masukan lagi dari saya, saya harapkan kegiatan dari BKKBN ini masuk ke RPJMD ini.
15.	Ibu Ani	Mohon poin NSPK untuk di Prov dan Kab/Kota diberikan kepada kami agar dapat disampaikan ke kemendagri. PP pembagian kewenangan ini membutuhkan keterlibatan tidak hanya dari BKKBN tapi juga kementerian lain. BKKBN sudah mengusulkan kampung KB masuk dana di APBN. Permendes juga sudah mengalokasikan dana 2020 dimana ada kampung KB di dalamnya. Semoga ini menjadi titik terang bagi kita semua
16.	Ibu Rika	Saya mencoba menyimpulkan, NSPK ini mohon dapat menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan meskipun masih banyak catatan. Masukan dari saudara-saudara yang sudah disampaikan nanti akan kita sampaikan di forum selanjutnya.

#### **Kesimpulan:**

1. Masalah kelembagaan di daerah dimana kedepan mereka akan merger akan mempersempit peluang pendanaan terutama untuk pengendalian penduduk.
2. Terbatasnya SDM yang kurang mumpuni secara kompetensi
3. Keterbatasan Anggaran

#### **Tindak Lanjut:**

Tipologi kelembagaan di tingkat provinsi sangat beragam dan ini harus menjadi perhatian di tingkat pusat.

**DOKUMENTASI**



## NOTULENSI

### RAPAT EXIT MEETING PENGAWAS INTERNAL

Tanggal : 14 November 2019

Tempat : Ruang Rapat Direktorat Analisis Dampak Kependudukan

Pimpinan : Dra. Hitima Wardhani, MPH.

NO.	Pembahas	Isi
1.	Bu Hitima	<ul style="list-style-type: none"><li>• Selamat sore dan salam sejahtera, yang saya hormati pengelola anggaran, ketua tim dari provinsi dan tim dari Irwil 3.</li><li>• Kami siap untuk mendengarkan paparan yang telah dilakukan, jika ada masalah mohon menjadi pembelajaran untuk kita agar kedepan menjadi lebih baik.</li></ul>
2.	Pak Hamzah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Komunikasi dan konsultasikan dengan teman-teman BPK.</li><li>• Teman-teman setidaknya perlu belajar dari kami.</li><li>• Saya masih melihat kesalahan yang sama, terutama terkait RDK.</li><li>• Laporan kami dibaca BPK, contoh uang makan penyuluh di Jatim tetapi yang kena bisa ke seluruh Indonesia.</li></ul>
3.	Mba Yublilia	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terima kasih Bapak Ibu, pertama kami sampaikan realisasi sampai 7 November 2019 sebesar 7.932.870.737</li><li>• Berdasarkan realisasinya, peringkat tertinggi ada di Renduk</li><li>• Berdasarkan SPJ nya, peringkat tertinggi ada di Penduk.</li><li>• Untuk temuan-temuannya sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tidak hanya karena absen tidak memenuhi syarat RDK tetapi juga ada masalah yang kaitannya dengan RL dan DL.</li><li>2. Kurang bukti SPJ</li><li>3. Ketidaksesuaian SPM dan SPJ.</li><li>4. SPJ beda tanggal kegiatan.</li><li>5. Tidak ada lampiran setor bukti pajak</li><li>6. Administrasi<ul style="list-style-type: none"><li>○ Terkait perjalanan deputi, jika tidak didampingi, maka itu menjadi tugas sekretaris.</li><li>○ Mohon menjadi perhatian perjalanan yang tidak ada bukti visum.</li></ul></li></ol></li></ul>
	Pak Hamzah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sebagai tindak lanjut kedepan, teman-teman</li></ul>

		<p>mohon perlu klarifikasi bukti pajak ini begitu juga dengan SPM. Saya telah dari jauh hari sampaikan untuk melengkapi SPJ. Harap sampai Jumat ini selesai.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kita diperiksa provinsi, mohon kehati-hatiannya karena orang provinsi lebih teliti.</li> </ul>
	Mba Yublilia	<p>SPJ saya sering lihat surat tugas itu scan, padahal harus asli.</p>
	Pak Hamzah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sampaikan ke Deputi bahwa tanda tangan dan paraf tidak boleh scan karena jika diperiksa BPKB ini rawan.</li> </ul>
	Ibu Hitima	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terima kasih, atas paparan saudara.</li> <li>• Terdapat beberapa catatan:</li> <li>• Baru 49% SPJ yang dapat diperiksa, sudah ada warning kemungkinan diperiksa BPK dan harus ada justifikasi.</li> <li>• Jika semua bisa dijelaskan esok dapat di <i>follow-up</i></li> <li>• Saya yakin teman-teman pengawas sudah sangat bekerja keras dalam mengelola anggaran.</li> <li>• Yang cukup memprihatinkan adalah RDK karena kekurangan jam dan dukungan administrasi lainnya.</li> <li>• Kita sepakat besok optimal dalam menghadapi auditor.</li> <li>• Kesibukan akhir tahun sehingga tidak bisa mendampingi secara intensif.</li> <li>• Demikian saya sampaikan, kita akhiri dengan hamdallah. Selamat sore.</li> </ul>

Kesimpulan:

Terdapat temuan-temuannya sebagai berikut:

1. Tidak hanya karena absen tidak memenuhi syarat RDK tetapi juga ada masalah yang kaitannya dengan RL dan DL.
2. Kurang bukti SPJ
3. Ketidaksesuaian SPM dan SPJ.
4. SPJ beda tanggal kegiatan.
5. Tidak ada lampiran setor bukti pajak
6. Administrasi
  - Terkait perjalanan deputi, jika tidak didampingi, maka itu menjadi tugas sekretaris.
  - Mohon menjadi perhatian perjalanan yang tidak ada bukti visum.

Tindak Lanjut :

Siapkan justifikasi jika diperiksa BPK.

**DOKUMENTASI**









**Lampiran 4**

Fotokopi/Scan Sertifikat mengikuti Orientasi Penguatan Kompetensi Teknis Bidang di Rindam selama 1 minggu

**Lampiran 5**

Fotokopi/Scan Sertifikat mengikuti Orientasi Penguatan Kompetensi Teknis Bidang berupa Kelas E-Learning Demografi saat Off Class

**Lampiran 6**

Kegiatan 1: Membuat *leaflet*



Mempelajari panduan Rumah Data Kependudukan Ditdamduk  
&  
Inventarisasi materi yang akan dimasukkan ke dalam *leaflet*



Pemilihan desain  
&  
Penyusunan *leaflet* rumah dataku



Konsultasi ketersediaan *leaflet* dengan Kasubdit  
&  
Melakukan perizinan ke Kasubdit untuk mencetak *leaflet*

## Kegiatan 2: Membuat Form Penilaian *leaflet*



Inventarisasi indikator penilaian yang akan dimasukkan ke dalam form penilaian *leaflet*, Mengkonsultasikan form indikator dengan Kasubdit, Membuat *form*, dan Melakukan perizinan ke Kasubdit untuk mencetak form penilaian *leaflet*

**EVALUASI LEAFLET SKEMA PENDATAAN  
RUMAH DATA KEPENDUDUKAN OLEH PENGELOLA**

Nama Pengelola : \_\_\_\_\_  
 Jabatan : \_\_\_\_\_  
 Lokasi : \_\_\_\_\_  
 Hari, Tanggal : \_\_\_\_\_

No	Unsur-unsur yang dinilai	1 - 60	60,1 - 70	70,1 - 80	80,1 - 90	90,1 - 100
1	Kelengkapan informasi					
2	Estetika penyajian					
3	Penggunaan bahasa					
4	Kerapihan <i>leaflet</i>					
5	Tata letak penyajian					
6	Kebermanfaatan <i>leaflet</i> untuk pengelola					
7	Kemudahan <i>leaflet</i> untuk dipahami					

Catatan/Saran :

Terima kasih,

Keterangan :

Tulis nilai yang Saudara berikan pada kolom yang tepat (misal Saudara memberikan nilai 77), maka tulis:

1 - 60	60,1 - 70	70,1 - 80	80,1 - 90	90,1 - 100
		77		

Kegiatan 3: Melakukan ujicoba *leaflet*



Mengkonsultasikan lokus ujicoba dengan Kasubdit &  
Membuat surat tugas untuk ujicoba *leaflet*

**NOTULENSI DISKUSI SKEMA MEKANISME OPERASIONAL DENGAN  
OPD SULAWESI SELATAN DAN UJICOBA LEAFLET DENGAN  
PENGELOLA RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DI KAMPUNG KB  
TERATAI**

**Notulensi Diskusi Skema Mekanisme Operasional dengan OPD Provinsi**

Tanggal : 3-5 November 2019.

Berikut merupakan masukan dari OPD Provinsi:

Skema dari pusat langsung ke BKKBN perwakilan, OPD provinsi dilewatkan padahal seharusnya tidak boleh demikian. OPD Provinsilah yang menginformasikannya ke BKKBN perwakilan. Hal ini melanggar UU 23 tahun 2014 karena yang wajib melaporkan ke BKKBN Pusat adalah OPD Provinsi bukan kab/kota.

**Notulensi Ujicoba dengan Pengelola Rumah Data Kependudukan di  
Kampung KB Teratai**

Tanggal : 15 November 2019.

Berikut merupakan masukan dari Pengelola Rumah Data:

- Secara estetika leaflet sudah dapat dipahami, namun secara garis/jalur otoritas yang berwenang dalam melakukan koordinasi perlu didiskusikan bersama karena pengelola di lapangan akan menginduk skema yang telah dibuat.
- Kepengurusan rumah data tidak menjadi satu dengan kepengurusan kampung KB. Hal ini menyebabkan tidak ada dua kepemimpinan di dalam satu lokasi.
- Jika nantinya pendataan ini akan berujung pada dilakukannya klasifikasi, maka perlu dilakukan sosialisasi yang mendalam kepada masyarakat dan petugas, khususnya PKB.

<b>Masukan</b>	<b>Masalah</b>	<b>Tindak Lanjut</b>
<b>Dinas PPAPP</b>		
Kampung KB & Rumah Dataku sama-sama mempunyai 4 klasifikasi tetapi berbeda namanya. Saran kami, semua klasifikasi poktan KKBPK sama semua agar yang di lapangan tidak bingung.	Perubahan renstra masih berjalan.	Belum dapat dilakukan tindak lanjut.
Laporan DALAP kependudukannya tidak ada	Kependudukan belum mempunyai indikator operasional.	Rumah data kependudukan dapat direkomendasikan menjadi DALAP-nya kependudukan.
Dari pusat langsung ke BKKBN perwakilan, OPD provinsi dilewatkan padahal seharusnya tidak boleh. OPD Provinsilah yang menginformasikannya ke BKKBN perwakilan. Ini melanggar UU 23 tahun 2014. Yang wajib melaporkan ke BKKBN Pusat adalah OPD Provinsi bukan kab/kota.	Tidak semua provinsi memiliki OPD Provinsi. Berdasarkan data dari Biho, terdapat 7 provinsi yang belum memiliki OPD Provinsi sehingga perlu ditambahkan klausul pengecualian.	Bagi daerah yang belum memiliki OPD Provinsi, otoritas OPD Provinsi dapat digantikan sementara oleh BKKBN Provinsi, sampai ada OPD Provinsi. --> Untuk mengakomodir 7 Provinsi yang belum memiliki OPD Provinsi, skema pelaporan pada pedoman pelaporan rumah dataku perlu ditambahkan klausul pengecualian.



<b>Direktur Ditdamduk</b>		
Di Kecamatan tidak ada lagi koordinator PLKB	Saat turun lapangan, ada masukan untuk melibatkan kecamatan.	Kecamatan tetap dilibatkan dengan pertimbangan bahwa terdapat penunjukkan koordinator di lapangan.
<b>Perwakilan BKKBN Provinsi</b>		
Klasifikasi rumah data apakah dari pusat atau dari kami? Banyak sekali poktan KKBPK. Saran saya, klasifikasinya disamakan agar lebih bagus dan sederhana. Kampung KB dan Rumah Data disamakan klasifikasinya.	Rumah data kependudukan terikat dengan Renstra	Belum dapat dilakukan tindak lanjut
<b>Ketum IPeKB</b>		
Kenapa kepengurusan rumah data tidak menjadi satu dengan kepengurusan kampung KB agar tidak ada dua kepemimpinan di dalam satu lokasi.	Terdapat keterikatan dengan kebijakan yang sudah ada sebelumnya.	Belum dapat dilakukan tindak lanjut
Klasifikasi perlu sosialisasi yang mendalam kepada masyarakat khususnya PKB. Harapan saya pertemuan seperti ini lebih banyak mengundang PKB.		Hal ini akan menjadi masukan untuk kegiatan ke depan, agar lebih banyak forum yang melibatkan PLKB/PKB dan pengguna langsung untuk diajak diskusi.



Melakukan diskusi skema pelaporan bersama OPD Provinsi Sulawesi Selatan



Melakukan ujicoba ke Rumah Data Kependudukan di kampung KB,  
Mengumpulkan form masukan *leaflet* dari pengelola rumah data, dan Menginventarisasi masukan  
dari pengelola rumah data untuk perbaikan *leaflet*

**EVALUASI LEAFLET SKEMA PENDATAAN  
RUMAH DATA KEPENDUDUKAN OLEH PENGELOLA**

Nama Pengelola: AMINATI  
 Jabatan: TPD  
 Lokasi: Kel. CURUG CIMENTAH K.A.B. TERATE  
 Hari, Tanggal: Jumat 21-11-2019

No	Unsur-unsur yang dinilai	1 - 60	60,1 - 70	70,1 - 80	80,1 - 90	90,1 - 100
1	Kelengkapan informasi					90,1
2	Estetika penyajian					90,1
3	Penggunaan bahasa					90,1
4	Kerapihan leaflet					100
5	Tata letak penyajian					100
6	Kebermanfaatan leaflet untuk pengelola					100
7	Kemudahan leaflet untuk dipahami					100

Catatan/Saran:

Terima kasih,

**Keterangan**

Tulis nilai yang Saudara berikan pada kolom yang tepat (misal: Saudara memberikan nilai 77, maka tulis

1 - 60	60,1 - 70	70,1 - 80	80,1 - 90	90,1 - 100
		77		

Form penilaian leaflet yang telah diisi oleh pengelola rumah data

Kegiatan 4: Melakukan perbaikan *leaflet* atas masukan dari ujicoba dengan pengelola rumah data



Mengkonsultasikan hasil ujicoba dengan Kasubdit & Melakukan revisi *leaflet* rumah dataku

Kegiatan 5: Sosialisasi *leaflet* ke Rumah Data di Kampung KB



Berkonsultasi dengan atasan, Membuat surat tugas untuk sosialisasi, dan Membuat surat perizinan ke kampung KB



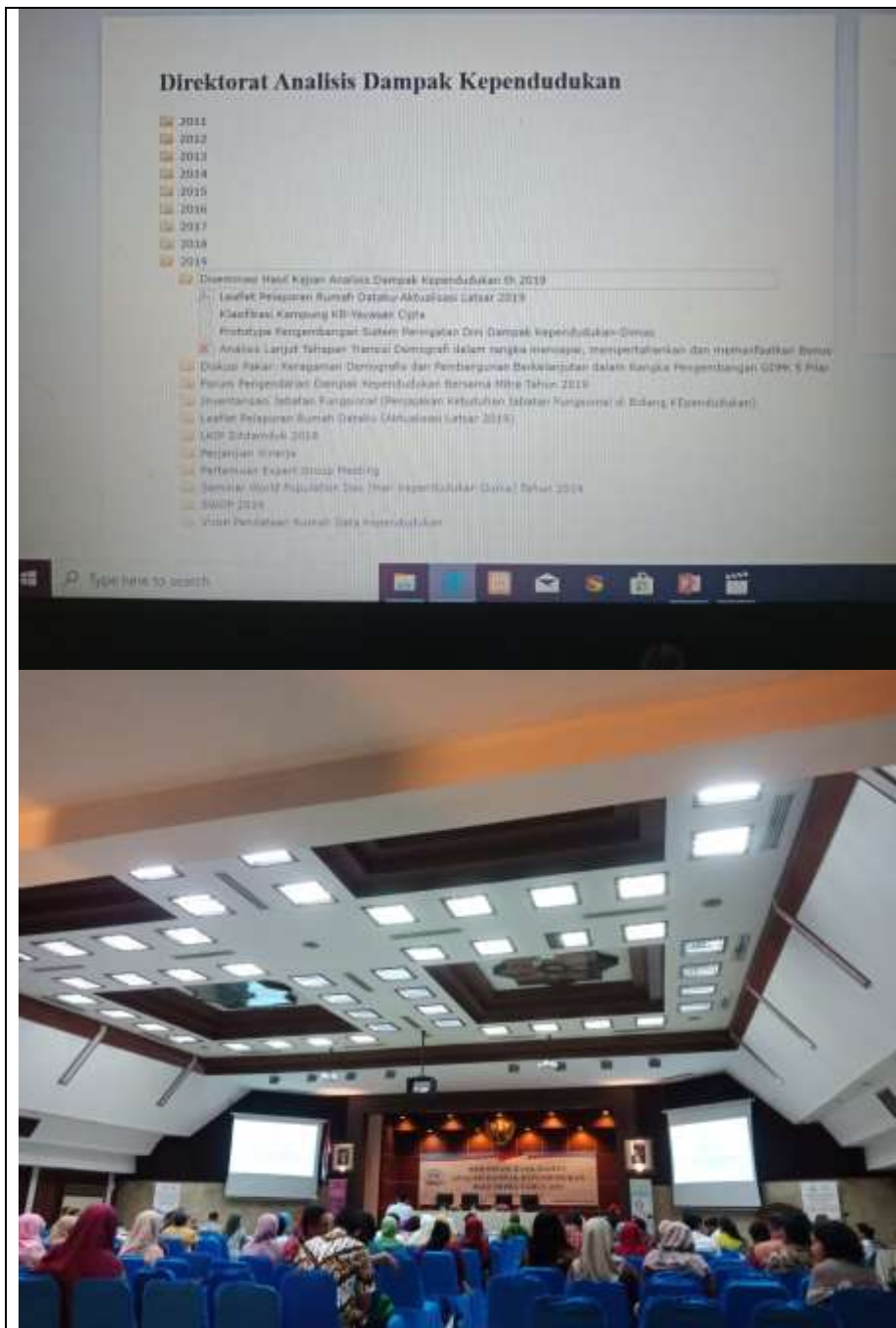
Melakukan kunjungan

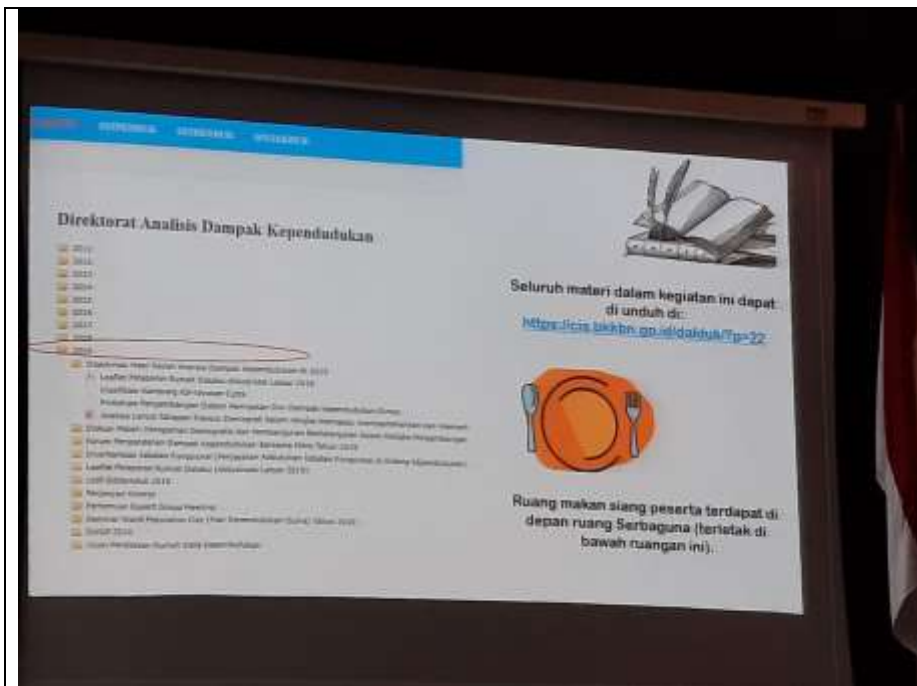
Kegiatan 5: Monitoring pemanfaatan *leaflet*



Melakukan kunjungan ke Balai Penyuluhan di Kelurahan Curug untuk memasang leaflet di Balai Penyuluhan, Kampung KB Melati dan Kampung KB Teratai.







Pemanfaatan leaflet dalam kegiatan diseminasi hasil kajian Direktorat Analisis Dampak Kependudukan dengan mengupload materi leaflet ke website CIS BKKBN